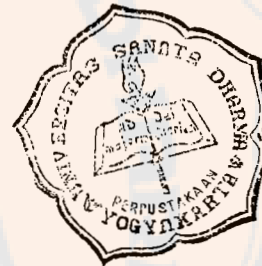
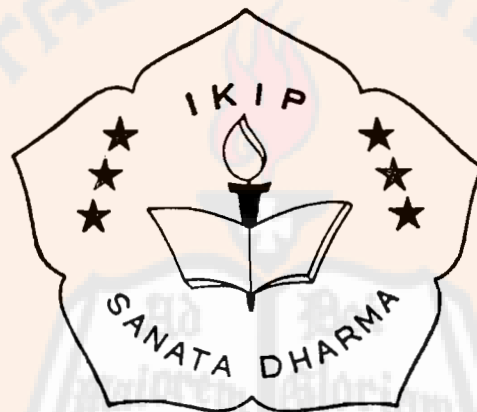


**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA TAHUN 1957**

**SKRIPSI**

**DISUSUN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**



**OLEH**

***Y. B. Sudarmanto***

**NIM : 85214019**

**NIRM : 855027260112**

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH**

**FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**

**IKIP SANATA DHARMA**

**YOGYAKARTA**

**1990**

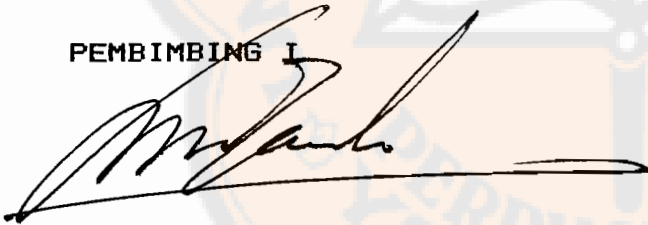
SKRIPSI

NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA TAHUN 1957

OLEH  
Y.B. SUDARMANTO  
NIM : 85214019  
NIRM: 855027260112

TELAH DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING I



DRS. G. MOEDJANTO, M.A.

TANGGAL .....

PEMBIMBING II



DRS. A. KARDIYAT WIHARYANTO

TANGGAL.....


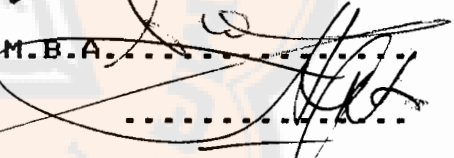

SKRIPSI

NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA TAHUN 1957

YANG DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH  
Y.B. SUDARMANTO  
NIM: 85214019  
NIRM: 855027260112

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN PANITIA PENGUJI  
PADA TANGGAL 7 MEI 1990  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI SYARAT

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
KETUA / ANGGOTA : Drs. G. Moedjanto, M.A.	
SEKRETARIS : Drs. E. Soemardjono, M.B.A.	
ANGGOTA : Drs. A.K. Wiharyanto	
ANGGOTA : Drs. P.J. Suwarno, S.H.	.....

YOGYAKARTA, .....

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

IKIP SANATA DHARMA

DEKAN



  
DRS. G. MOEDJANTO, M.A.

## KATA PENGANTAR

Penulis pantas bersyukur atas selesai dan tersusunnya skripsi ini. Hal itu merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Sarjana pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini sepenuhnya ada di bawah bimbingan Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A. dan Bapak Drs. A. Kardiyat Wiharyanto.

Menyertai rasa gembira penulis, dengan rasa syukur saya sampaikan rasa dan ungkapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A. yang telah sudi membimbing, mengoreksi skripsi ini
2. Bapak Drs. A. Kardiyat Wiharyanto yang dengan senang hati membimbing dan mendampingi penulisan skripsi ini
3. Bapak Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, dari Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang telah memberi saran-sarana yang sangat berguna untuk melengkapi kepustakaan skripsi ini
4. Bapak Hadi Purnomo S.H. dari Fakultas Hukum Universitas Duta Wacana, Yogyakarta, yang telah memberikan nasehat dan buku-buku yang diperlukan
5. Teman-teman yang telah memberi berbagai bantuan yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

v

Akhirnya ungkapan terimakasih kiranya pantas diucapkan kepada para Romo SJ di Komunitas Puskat, Tegalrejo, Yogyakarta.

Segala hal yang tertuang dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran demi perbaikannya diterima dengan hati terbuka. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi peminat studi sejarah.

Yogyakarta, Agustus 1990

Penulis

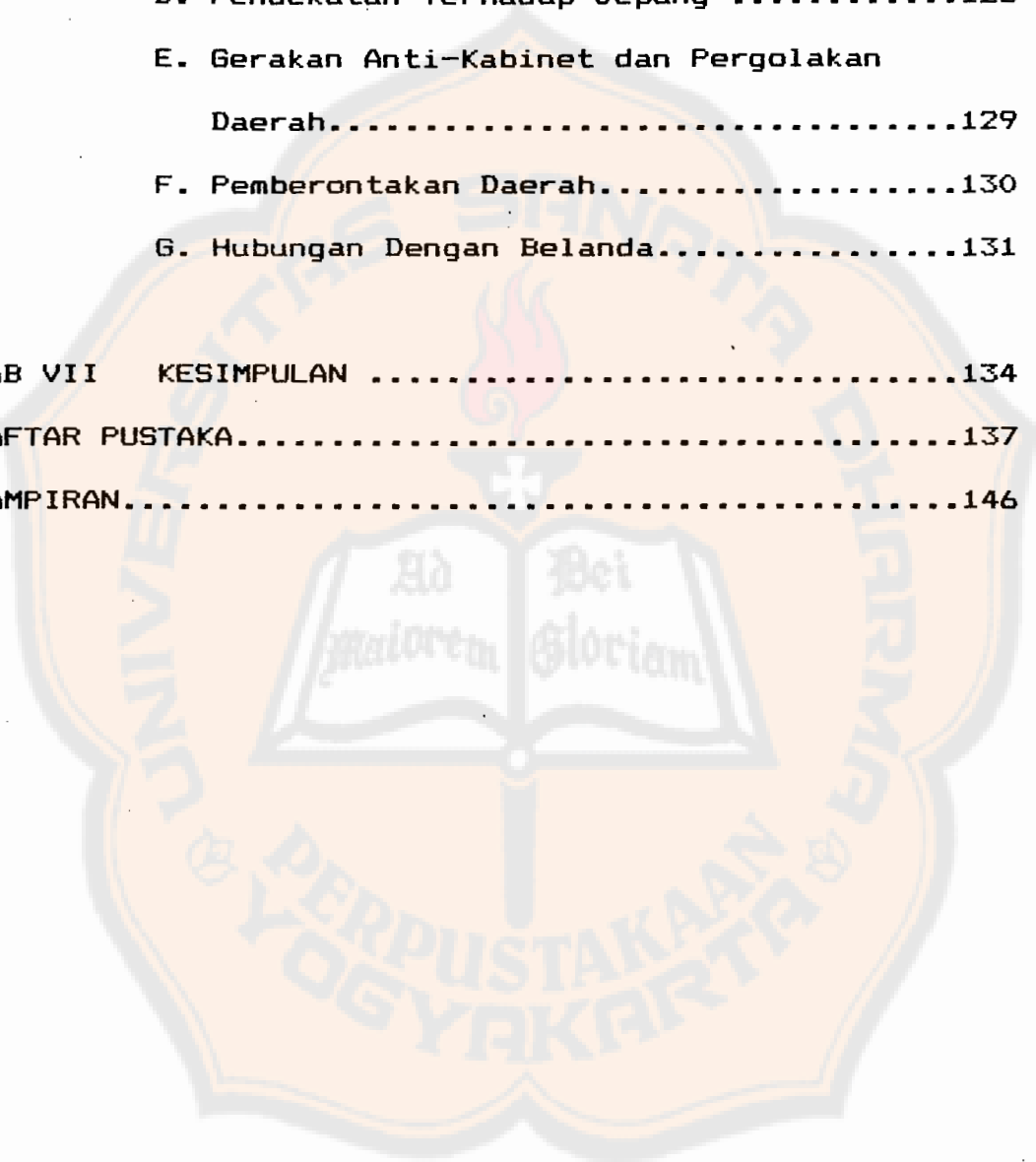
Y.B. Sudarmanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
ABSTRAK .....	x
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A. Politik Perekonomian Indonesia.....	3
B. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda.....	5
C. Perumusan Masalah Dan Sistematisa Pemahasannya.....	8
D. Metode Penelitian .....	10
BAB II     NASIONALISASI SEBAGAI POLITIK PEREKONOMIAN .....	12
A. Pengertian Nasionalisasi.....	12
B. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Nasionalisasi.....	14
C. Nasionalisasi Sebagai Politik	

	Perekonomian .....	15
	D. Nasionalisasi di Indonesia .....	19
	E. Dasar Hukum Nasionalisasi.....	26
	F. Perusahaan Yang Dinasionalisasi.....	28
BAB III	PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA-KAMB.....	29
	A. Kembalinya Perusahaan-Perusahaan Belanda.....	29
	B. Dampak Dalam Bidang Perekonomian.....	30
	C. Berbagai Permasalahan Yang Timbul.....	34
	D. Pemikiran Indonesianisasi Perekonomian..	41
BAB IV	SITUASI POLITIK DALAM NEGERI 1950 – 1958	54
	A. Kehidupan Kepartaian.....	56
	B. Militer Sebagai Kekuatan Politik.....	61
	C. Kabinet Dan Instabilitas Politik.....	65
	D. Berbagai Permasalahan Politik .....	66
BAB V	MASALAH IRIAN BARAT DAN TINDAKAN NASIONALISASI.....	84
	A. Masalah Irian Barat .....	84
	B. Hubungan Dengan Negara Adi-Daya.....	95
	C. Nasionalisasi Sebagai Perjuangan Merebut Irian Barat.....	99
BAB VI	AKIBAT NASIONALISASI .....	123
	A. Inflasi.....	125
	B. Hubungan Antar Pulau.....	126

C. Ekonomi Barter.....	127
D. Pendekatan Terhadap Jepang .....	128
E. Gerakan Anti-Kabinet dan Pergolakan Daerah.....	129
F. Pemberontakan Daerah.....	130
G. Hubungan Dengan Belanda.....	131
BAB VII KESIMPULAN .....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	146





DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 NILAI RUPIAH PERDAGANGAN LUAR NEGERI JAWA, LUAR JAWA DAN INDONESIA TAHUN 1958.....	69
TABEL 2 NILAI RUPIAH PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN ANTAR DAERAH JAWA DAN LUAR JAWA TAHUN 1958.....	70
TABEL 3 NILAI IMPOR BARANG-BARANG : JAWA, SUMATERA, KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA.....	71

## ABSTRAK

Peranan pemerintah dalam bidang perekonomian merupakan suatu hal yang menentukan. Campurtangan pemerintah dalam bidang itu dapat mengurangi kecenderungan *free fight liberalism*. Kecenderungan itu merupakan akibat langsung dari mekanisme pasar yang bertumpu pada hukum permintaan dan penawaran.

Dengan ikut mengambil bagian dalam pengaturan perekonomian, pemerintah dapat melindungi kepentingan rakyat. Hal itu dapat dilakukan misalnya dengan penetapan Undang-Undang (UU) Anti Monopoli, UU Perusahaan Kecil dan Menengah. Nasionalisasi merupakan tindakan pemerintah atau negara untuk mengambil alih perusahaan milik swasta, baik asing maupun nasional demi kepentingan negara dan rakyat. Pengambilalihan itu dan ganti kerugian yang wajar ditetapkan dengan UU.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pernah dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1957. Mengapa tindakan itu dijalankan? Siapa pemrakarsa utama tindakan itu? Dan Bagaimana akibatnya?

### Nasionalisasi dan Masalah Irian Barat

Gagasan untuk melakukan tindakan nasionalisasi secara kuat dicetuskan, ketika perundingan-perundingan masalah Irian Barat mengalami kemacetan. Pengambilalihan perusahaan dan modal milik Belanda itu dijalankan sebagai senjata ekonomi untuk memaksa Belanda berunding kembali.

Pada awal tahun 1950-an sudah disadari perlunya melakukan "Indonesianisasi" perekonomian nasional. Ada dua pandangan yang saling bertentangan untuk melakukannya. Pertama, kelompok Soekarno : Indonesianisasi dilakukan

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xi

dengan radikal, merombak struktur perekonomian yang masih dikuasai Belanda yang mendapat legitimasi dari KMB. Kedua, kelompok Hatta menghendaki agar dilakukan secara evolutif. Bagi Hatta kehadiran modal dan dunia usaha asing tidak menjadi masalah, kalau pemerintah mampu menjaga agar kehadirannya tidak merugikan rakyat. Indonesianisasi perekonomian harus dilakukan tahap demi tahap, sampai pada akhirnya pengusaha nasional mampu mengambil alih.

Kelompok Hatta yang terkesan kurang patriotik dan populer, dapat "dikalahkan" oleh kelompok Soekarno. Maka Indonesianisasi perekonomian dengan nasionalisasi terjadi.

Soekarno pada awal bulan Desember 1957 sudah memerintahkan kepada bekas-bekas tentara pelajar untuk menguasai perusahaan Belanda. Dengan bekerjasama dengan para buruh, mereka mengadakan aksi penguasaan Perusahaan Pelayaran Belanda (KPM) di Jalan Merdeka Timur, disusul oleh semua perusahaan dan perkebunan Belanda. Langkah itu segera diikuti oleh organisasi-organisasi buruh PKI dan PNI. Di samping itu TNI-AD, dengan alasan keamanan, menguasai untuk sementara perusahaan bekas milik Belanda itu. Langkah AD itu disetujui oleh Soekarno dan Djuanda.

Akibat yang sudah diperkirakan oleh kelompok Hatta, terjadi. Ketidak mampuan managerial dan teknis perusahaan menjadikan menurunnya produksi. Belanda mengalami penurunan pendapatan yang diperoleh dari Indonesia dari sebesar 10 persen dari pendapatan nasionalnya menjadi 1,5 - 2 persen. pada akhir tahun 50-an. Tetapi penurunan itu tidak melumpuhkannya karena mendapat suntikan dana dari AS dalam rangka program Marshall. "Senjata ekonomi" itu tidak berhasil memaksa Belanda berunding membicarakan masalah penyerahan Irian Barat. Tetapi keadaan perekonomian yang memburuk menjadikan rasa permusuhan dengan Belanda memuncak. Dan penyelesaian dengan kekuatan senjata pun terjadi.

BAB I  
PENDAHULUAN

Pembahasan tentang nasionalisasi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang peranan negara dalam bidang perekonomian. Sejak John Maynard Keynes menulis, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1930), terjadi perubahan dalam peran negara di negara-negara Liberal. Depresi ekonomi pada 1929 diakibatkan oleh sistem ekonomi, khususnya di negara-negara Barat, yang terlalu liberal. Sebagai sistem yang lebih baik dan yang mampu menjamin keseimbangan ekonomi, Keynes mengusulkan peranan negara yang lebih besar. Peranan itu diwujudkan dengan investasi pemerintah (melalui kebijakan tingkat bunga dan perpajakan), tanpa harus menjadi sistem ekonomi yang sosialis-komunis<sup>1</sup>.

Negara-negara Barat yang liberalistis menyadari sistem perekonomiannya yang mengandalkan pertumbuhan dan mekanisme pasar, dapat merugikan, seperti diungkapkan Keynes. Campur tangan negara yang sangat besar di negara-negara komunis, belum menunjukkan hasil yang berarti, pada masa itu.

Memang baik sistem ekonomi Kapitalistis maupun

---

<sup>1</sup> Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin (Jakarta: Penerbit Fasco, 1960), hlm. 51

Sosialistis, merupakan sistem yang timpang. Negara-negara berkembang berupaya memadukannya, seperti amat menyolok terlihat dalam perumusan Pasal 33 UUD 1945, yang mengatakannya:

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan (ayat 1); Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat "(ayat 2).

Peranan swasta tidak disebutkan secara eksplisit tetapi secara implisit, seperti dikatakan Hatta:

"UUD 1945 tidak menghalangi keluarnya inisiatif swasta dalam rencana pemerintah, pada lahirnya kesempatan itu tidak banyak dapat dipergunakan oleh usahawan Indonesia. Masyarakat Indonesia miskin akan kapital, miskin akan tenaga ahli dan belum banyak melahirkan petindak (pelafu - pen) yang seukuran dengan tugasnya untuk pembangunan"<sup>2</sup>.

Perpaduan anantara dua sistem ekonomi dilakukan untuk mencapai kemerdekaan ekonomis, setelah merdeka secara politis. Pandit Jawaharal Nehru dari India ketika dalam tawanan Inggris pada 1944 mengatakan:

"Hampir tidak mungkin dipersoalkan, bahwa dalam rangka dunia modern tidak ada negara yang dapat merdeka secara politik dan ekonomi... kecuali kalau negara itu industrinya kuat dan memanfaatkan sumber-sumber energinya sampai batas kemampuannya. Suatu negara yang industrinya terbelakang akan selalu mengganggu keseimbangan dunia dan akan membangkitkan kecenderungan agresif dari negara-negara yang lebih maju. Juga kalau negara itu secara politik tetap merdeka, kemerdekaan itu hanya nominal saja, akan tetapi pengawasan atas ekonominya akan ada di tangan

---

<sup>2</sup>Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin (Jakarta: Penerbit Fasco, 1960), hlm. 51

lain<sup>3</sup>.

Sesudah pengakuan kedaulatan, Indonesia sangat merasakan seperti yang diungkapkan oleh Nehru tsb. Di samping dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) hak-hak pengusaha swasta Belanda dan segala harta miliknya harus diakui oleh Indonesia juga masalah Irian Barat bagian wilayah Indonesia masih di bawah pemerintah Belanda (pasal 22)<sup>4</sup>.

Tindakan nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1957 merupakan upaya pemerintah Indonesia mengubah keadaan yang tidak menguntungkan itu.

## A. Politik Perekonomian Indonesia<sup>5</sup>

Ada dua pilihan dasar dalam strategi pembangunan di negara-negara-berkembang, seperti Indonesia:

<sup>3</sup>J. W.Schrool, Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang ( Terj. R.G. Soekadjo) (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 13

<sup>4</sup>Notosoetardjo, Dokumen2 Konferensi Medja Bundar, K.M.B. (Jakarta: Penerbit Endang, 1956), hlm. 74

<sup>5</sup>"Politik Perekonomian " dalam uraian ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari Sejarah Perekonomian. Fokus Sejarah Perekonomian adalah proses pertumbuhan (kemunduran) ekonomi dan kesejahteraan suatu masyarakat di masa lampau. Obyek perhatian sejarah perekonomian pada dasarnya sama dengan obyek sejarah Ekonomi. Satu-satunya perbedaan pokok antara Sejarah Perekonomian dan Ilmu Ekonomi Umum adalah sejarah perekonomian mempelajari masalah-masalah ekonomi di masa lampau sedangkan ilmu ekonomi umum mempelajari masalah-masalah ekonomi pada masa kini pada umumnya. Sedangkan politik perekonomian membicarakan dampak keputusan suatu negara (keputusan politik) dalam masalah pertumbuhan (atau kemunduran) ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Douglas C. North, "Economic History" , International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. 5 (New York: Macmillan & The Free Press, 1972), hlm. 468

1. Politik Sebagai Panglima
2. Ekonomi Sebagai Panglima

## 1. Politik Sebagai Panglima (Ekonomi Sebagai Akibat)

Pandangan ini menekankan bahwa politiklah yang menjadi determinan dalam pembangunan yang utama. Atau menurut istilah yang masih populer hingga kini "Politik Sebagai Panglima". Kalau kehendak politik (*political will*) pemerintah memberi peluang kepada dunia usaha dan pranata-pranata (institusi) perekonomian masyarakat, maka bidang ekonomi akan mengalami kemajuan. Hal itu nampak dalam kenaikan pendapatan per kapita, tersedianya lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, terjaminnya pelayanan umum dsb. Kehidupan perekonomian yang baik itu pada gilirannya akan mendorong pula peran serta politik masyarakat dalam bidang pemerintahan dan kengaraan lewat jalur lembaga dan pranata yang tersedia.

## 2. Ekonomi Sebagai Panglima (Politik Sebagai Akibat)

Pendekatan ekonomi politik, tidak memperhatikan faktor-faktor politik sebagai prasyarat atau pun sebagai penghambat pembangunan. Faktor politik sebagai variabel terikat (akibat). Pendekatan ini berasal dari analisis Marxis dan Neo-Marxis, sama halnya dengan analisa konvensional tentang perekonomian liberal yang mengasumsikan pentingnya akibat-akibat politik dalam

pembangunan ekonomi. Kaum Marxis cenderung memberi penilaian bahwa substruktur ekonomi menentukan superstruktur politik. Kaum ekonom liberal juga berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan mendatangkan pemekaran demokrasi politik<sup>6</sup>.

Strategi apakah yang dipilih RI dalam dekade 1950-an.? Pertanyaan itu sangat relevan dalam pembahasan tentang nasionalisasi.

#### B. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda

Nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957 merupakan politik perekonomian RI guna menghadapi Belanda dalam masalah Irian Barat. Dengan tindakan itu diharapkan Belanda lebih lunak dalam mencairkan masalah Irian Barat yang mengalami jalan buntu semenjak KMB. Tetapi usaha yang nampaknya memberi keuntungan di bidang politik luar negeri itu sangat merugikan perekonomian RI, seperti dalam hal nasionalisasi Perusahaan Perkapalan Belanda (KPM: *Koninklijk Packetvaart Matschappij*) sangat mengcaukan transportasi antar pulau di Indonesia. Di samping pengambilalihan perusahaan perkebunan menyebabkan

-----

<sup>6</sup> Pandangan ekonomi sebagai panglima nampak jelas dalam karya Daniel Bell, The End of Ideology (Glencoe III: The Free Press, 1960) yang pada pokoknya mengatakan bila pembangunan ekonomi berlangsung dengan lancar pada akhirnya akan mendorong perkembangan dalam demokratisasi politik. Tetapi pembangunan ekonomi harus disertai dengan stabilitas politik.



transportasi antar pulau di Indonesia. Di samping pengambilalihan perusahaan perkebunan menyebabkan penurunan produksi barang komoditas ekspor gula, karet, kopra, tembakau. Tetapi ketiga kekuatan politik yakni TNI-AD, Soekarno dan PKI mendapatkan keuntungan yang besar. PKI menegaskan bahwa nasionalisasi itu merupakan kepentingan rakyat, seperti dikatakan oleh seorang tokohnya:

"Musuh utama rakyat Indonesia berdasarkan kekuatannya di beberapa bidang, khususnya di bidang ekonomi adalah imperialisme Belanda. Oleh karena itu front nasional terutama harus diarahkan melenyapkan imperialisme Belanda, dan bukan pada imperialisme asing di Indonesia" .

Dalam tubuh TNI-AD, Nasution dapat mengendalikan mayoritas perwira, pertama-tama dapat dijelaskan oleh kemampuannya untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan material AD, untuk memberikan pengarahan kepada mereka, menawarkan suatu kerangka ideologis bagi rekan-rekannya sesama perwira serta mencarikan "lahan basah" bagi para perwira<sup>8</sup>.

Ternyata ketiganya berhasil menyingkirkan lawan-lawan dan pengkritiknya baik dari parpol maupun tokoh-tokoh masyarakat, seperti Hatta yang pernah

---

<sup>7</sup> Donald Hindley, The Communist Party of Indonesia 1951 - 1963 (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966), hlm. 124

<sup>8</sup> Ulf Sundhausen, Politik Militer Indonesia, 1945 - 1957 (Terj.) (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 215 - 216

orang politik yang tidak paham ekonomi tidak akan berhasil menentukan tujuan yang tepat bagi politik perekonomian. Hanya bencana yang akan diderita oleh negara dan rakyat apabila politik perekonomian ditentukan oleh orang-orang politik yang tidak paham ekonomi" .

Kritik Hatta itu seirama dengan pandangan Sjafruddin Prawiranegara yang berpendapat bahwa bila nasionalisasi dijalankan pada waktu itu hanya berarti pemborosan keuangan negara. Pada masa itu negara sedang kekurangan dana, baik rupiah maupun devisa. Daripada dana yang terbatas itu dipakai dipakai untuk mengganti modal asing, lebih baik dipergunakan untuk membangun pertanian, terutama mencapai swasembada pangan dan membangun daerah dengan transmigrasi. Perusahaan-perusahaan asing terutama milik Belanda perlu dipertahankan dan malah dianjurkan untuk mengundang modal asing lainnya. Ia berpendapat bahwa untuk sementara industrialisasi lebih baik diserahkan kepada modal asing lainnya. Tetapi bangsa Indonesia perlu belajar banyak memproduksi dan memimpin perusahaan. Strategi yang dipilihnya bukan nasionalisasi melainkan Indonesianisasi<sup>10</sup>.

Kritik Hatta menjadi jelas kebenarannya setelah tindakan di akhir tahun 1957 itu ternyata tidak efektif

---

<sup>9</sup> Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), hlm. 180

<sup>10</sup> M. Dawam Rahardjo, "Wafatnya Seorang Sosialis-Religius" (*Obituari*), Tempo, No. 25, Thn. XVIII, Pebruari 1989

untuk memaksa Belanda berunding dan menyerahkan Irian Barat. Pendekatan "Politik Sebagai Panglima" itu harus dipadukan dengan pandangan "Ekonomi Sebagai Panglima" yang oleh Apter disebut sebagai pendekatan behavioral<sup>11</sup>. Kebijakan politik harus memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi kalau tidak ingin kebijakan itu membawa akibat kerugian politik itu sendiri.

C. Perumusan Masalah Dan Sistematika Pembahasannya

Masalah utama yang menjadi pokok pembahasan uraian ini adalah bagaimana nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957 itu terjadi?

Masalah utama itu diperinci dalam beberapa masalah khusus. Apa makna nasionalisasi sebagai politik perekonomian? Bagaimana keadaan perekonomian dan situasi politik Indonesia pasca-KMB? Mengapa nasionalisasi itu dijalankan dan siapakah penggerak utamanya? Apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia sesudah nasionalisasi itu terjadi dan apa akibat-akibat tindakan itu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dibagi dalam beberapa bab berikut ini.

Dalam bab II, akan diuraikan tentang makna

---

<sup>11</sup> David E. Apter, Pengantar Analisa Politik (terj.) (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 209-236

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9

nasionalisasi. Nasionalisasi merupakan politik perekonomian suatu negara dengan mengambil alih perusahaan swasta asing maupun nasional. Pengambilalihan itu ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) yang menjamin pelaksanaan ganti kerugian yang layak.

Latar belakang tindakan ini adalah keadaan ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh pengusaha dan pemilik modal asing, khususnya Belanda. Dan dominasi itu ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan Konferensi Meja Bundar (KMB). Pentingnya kemerdekaan secara ekonomis sudah disadari oleh para pemimpin Indonesia, sesudah pengakuan kedaulatan terjadi (1950). Langkah-langkah konkret menuju Indonesianisasi perekonomian telah dijalankan oleh kabinet-kabinet yang berkuasa. Tetapi karena ketidakstabilan kabinet tidak dapat menyelesaikan program-programnya. Bab III akan menjelaskan keadaan ekonomi dan politik itu?

Keadaan dalam negeri yang tidak stabil, masih ditunjang oleh masalah luar negeri yang belum tuntas berupa tuntutan wilayah Irian Barat. Presiden Soekarno mengambil prakarsa untuk melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda sebagai senjata ekonomi. Tindakan itu dijalankan sebagai upaya memaksa Belanda berunding untuk menyerahkan wilayah itu. Uraian ini dikemukakan dalam bab IV.

Dalam bab V, akan dikemukakan dampak tindakan nasionalisasi itu. Banyak unsur ketidaksiapan dalam pengelolaan perusahaan sehingga merugikan secara ekonomis. Tetapi penolakan Indonesia terhadap modal dari Belanda membuka peluang bagi Jepang untuk menanamkan kembali modalnya.

Uraian itu ditutup dengan kesimpulan pada bab VI. Politik sebagai "panglima" sebenarnya timpang, karena banyak faktor dan pranata-pranata politik yang justru dikondisikan oleh faktor ekonomi. Perpaduan antara kebijakan politik dan kemampuan ekonomis tetaplah diperlukan.

#### D. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* dengan menimba sumber-sumber kepustakaan yang tersedia. Adapun langkah-langkahnya seperti diusulkan oleh Louis Gotschalk sbb:

1. Pemilihan subyek untuk diselidiki;
2. Pemilihan sumber selengkap-lengkapny;
3. Mengadakan kritik sumber dengan tujuan menguji keotentikan dengan kritik ekstern dan intern;
4. Analisa sumber keterangan;
5. Sintesa sumber, keterangan dari berbagai sumber untuk diperbandingkan;
6. Koraborasi, membandingkan dengan sumber lain

yang otentik;

7. Interpretasi sejarah berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh;
8. Penulisan laporan sejarah <sup>12</sup>.

Metode seperti tersebut di atas, akan mengiringi uraian tentang masalah nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957. Pada bab II berikut ini akan mengawali pembahasan dengan melihat lebih jauh makna tindakan nasionalisasi.

---

<sup>12</sup> Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (terj. Nugroho Notosusanto) (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), hlm. 34

BAB II

NASIONALISASI SEBAGAI POLITIK PEREKONOMIAN

A. Pengertian Nasionalisasi

Nasionalisasi berasal dari *nation* yang berarti bangsa atau negara (negeri) dan akhiran *isasi* yang berarti tindakan. Jadi kata itu berarti menegerikan atau menjadikan milik negara. Pada umumnya, kata "nasionalisasi" diartikan sebagai "proses, perbuatan (hal) menjadikan milik bangsa atau negara (terutama milik asing), yang biasanya diikuti dengan penggantian yang merupakan kompensasi"<sup>13</sup>. Nasionalisasi<sup>14</sup> sebagai tindakan hukum merupakan tindakan negara mengambil alih perusahaan perusahaan milik swasta baik asing maupun nasional guna kepentingan negara yang bersangkutan. Tindakan itu ditetapkan dengan Undang Undang (UU) yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Gouw Giok Siong, merumuskan dengan lebih singkat makna nasionalisasi yang diartikan sebagai "suatu perusahaan menjadi milik

---

<sup>13</sup>Bdk. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), kata "nasionalisasi". Dalam uraian ini kata "pengambilalihan" atau "pengambilalihan Perusahaan asing" dipakai sebagai padanan kata "nasionalisasi".

<sup>14</sup>C.F.G. Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia (Bandung: Binatjipta, 1972), hlm. 172 - 178

negara ..menjadi a nation affair"<sup>15</sup>

Dalam istilah nasionalisasi termasuk baik *expropriation* (pengambilalihan) maupun *confiscation* (penyitaan). Artinya, suatu nasionalisasi dapat bersifat pencabutan hak (*onteigening*) dengan disertai ganti rugi atau bersifat penyitaan hak milik karena tidak disertai ganti rugi.<sup>16</sup>

*Contoh-contoh nasionalisasi dalam sejarah:*

Nasionalisasi bank-bank oleh pemerintahan komunis Rusia pada 26 Oktober 1917; Mexico dengan menasionalisasikan perusahaan *Asiatic Petroleum Corp* pada 18 Maret 1938, disusul oleh percobaan nasionalisasi industri semen oleh Turki pada 21 Juli 1938 (yang dicabut dengan dekrit pada 25 Mei 1939). Bulgaria pada tanggal 25 Desember 1942 dengan menasionalisasi bank-bank; Perancis menyusul pada 13 Desember 1944 dengan nasionalisasi pertambangan batu bara, dan nasionalisasi bank-bank besar. Negeri Belanda juga melakukan hal sama dengan industri pertambangannya pada 20 April 1945; Chekoslowakia dengan menasionalisasi seluruh industri yang ada pada 27 Oktober 1945; Hongaria dengan mengambilalih industri pertambangan dan pabrik-pabrik pada 1 Januari 1946, pada 30 Nopember 1946 menasionalisasi industri -industri beratnya dan pada 24 Juli 1947 bank-bank yang ada juga dinasionalisasikan.

<sup>15</sup>Gouw Giok Siong, Seqi-Seqi Hukum Internasional Pada Nasionalisasi Di Indonesia (Djakarta: Penerbit Universitas, 1960), hlm. 8

<sup>16</sup>Gouw Giok siong, op.cit., hlm. 6



Negera Polandia menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Jerman tanpa ganti rugi. Hal yang sama terjadi di Rumania, Yugoslavia, Burma, Iran, RRC pada 1953 dengan menasionalisasi semua perusahaan perorangan dan Mesir di tahun 1956 dengan nasionalisasi terusan Suez yang menimbulkan persengketaan dengan Inggris dan Perancis.<sup>17</sup>

**B. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Nasionalisasi**

Tindakan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta baik asing maupun nasional dilakukan karena berbagai faktor.

**a. Faktor finansial:**

untuk memperbesar penghasilan negara. Misalnya, menasionalisasi tambang-tambang.

**b. Faktor strategis:**

Nasionalisasi dilakukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, seperti menasionalisasi industri-industri senjata. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing juga sebagai strategi ekonomi, untuk memaksa negara lain agar mau memenuhi tuntutan politik tertentu.

**c. Faktor ekonomi:**

Tindakan itu dilakukan guna mempertinggi kedudukan ekonomis negara. Umpamanya, nasionalisasi perusahaan-

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 99 - 100

perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan umum: listrik, air, transportasi, pos.

d. Faktor sosial:

Nasionalisasi dilakukan untuk memindahkan alat-alat produksi ke tangan pengusaha-pengusaha nasional / pribumi dari pengusaha-pengusaha asing. Di negara-negara komunis, negara mengambilalih dan mengelola seluruh dunia usaha.

e. Faktor nasionalisme (politik):

Tindakan nasionalisasi ini tidak secara langsung memberi keuntungan sosial-ekonomis maupun finansial, tetapi mempertebal kesadaran nasional bangsa. Hal itu biasanya dihubungkan dengan perlawanan terhadap "neokolonialisme", atau kolonialisme dalam bidang perekonomian.

Keempat faktor tersebut sangat mempengaruhi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957 oleh pemerintah RI.

C. Nasionalisasi Sebagai Politik Perekonomian

Nasionalisasi merupakan bentuk campur tangan negara dalam perekonomian, dengan mengambilalih perusahaan-perusahaan asing untuk dikelola sendiri atau diserahkan kepada pihak swasta nasional. Tindakan itu dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa politiklah yang menjadi penentu utama dalam pembangunan. Atau menurut istilah yang sangat laku di Jaman Orde Lama disebut "*politik sebagai panglima*". Kalau kehendak politik

(*political will*) pemerintah memberi peluang kepada dunia usaha dan pranata-pranata (institusi) perekonomian masyarakat maka perekonomian akan mengalami perkembangan. Perkembangan itu akan nampak dalam kenaikan pendapatan per kapita, tersedianya lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, terjaminnya pelayanan umum serta timbulnya pengusaha-pengusaha nasional.

Ada dua alasan yang mendukung pandangan bahwa bagaimanapun juga pembangunan ekonomi pada akhirnya amat bergantung pada dan ditentukan oleh struktur politik.

*Pertama*, paham "politik sebagai panglima" dilontarkan oleh para antropolog yang mengutamakan kesinambungan budaya (*cultural continuity*). Dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia, pertukaran barang dan jasa dilakukan terutama atas dasar hubungan kekuasaan sebab dunia politiklah yang menentukan stratifikasi sosial. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk meraih kekuasaan dan membina kewenangan politik. Sekalipun kegiatan perekonomian modern menembus dan merombak struktur masyarakat, tekanan yang diberikan pada kewenangan politik mempengaruhi konsep-konsep perencanaan modern di bidang ekonomi. Misalnya, Indonesia minimal secara formal mengajukan prinsip "ekonomi gotong royong" atau "ekonomi

terpimpin"<sup>18</sup>. Terlepas dari kemungkinan bahwa proses ekonomi yang terjadi pada waktu itu berjalan atas dasar mekanisme lain, paling tidak konsepsi kolektivisme sudah menjadi bagian resmi dari kebijakan politik.

*Kedua*, politik sebagai panglima terbukti pula dari kebutuhan situasional (*situasional necessity*). Perencanaan pembangunan dan campur tangan pemerintah di negara-negara sedang berkembang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai itu memberi isi pada makna kedaulatan rakyat di bidang politik dan ekonomi. Falsafah campur tangan pemerintah demi kesejahteraan rakyat bagaimanapun juga lahir dari kesadaran politik bahwa jika "mekanisme pasar" diberi terlalu banyak kekuasaan maka cenderung hanya memperkuat golongan ekonomi kuat<sup>19</sup>.

Politik perekonomian sebagai produk proses politik yang ditentukan oleh para "pemain-pemain" politik. Feith, membedakan tiga golongan pemain politik:

1. Elite Politik
2. Masyarakat Politik
3. Massa

*1. Elite politik:*

Kelompok paling berpengaruh dalam kehidupan politik

---

<sup>18</sup> Bdk. Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin (Jakarta: Penerbit Fasco, 1960)

<sup>19</sup> Yuwono Sudarsono, "Teori Pembangunan: Sebuah Himbauan Untuk Pendekatan Ekonomi Politik" Prisma, Januari 1980

yang terdiri dari birokrat tinggi sipil dan militer. Jumlah mereka pada pertengahan tahun 1950-an sekitar 200 - 500 orang. Di samping birokrat sipil dan militer kelompok ini juga terdiri dari pengacara, dokter, guru besar dan beberapa pedagang;

*2. Masyarakat politik:*

Kelompok ini mempunyai pengaruh kecil terhadap politik tetapi mereka merasa mampu untuk berbuat sesuatu di dalamnya. Mereka terdiri dari orang-orang yang mempunyai status sosial yang tinggi, pegawai negeri, pemimpin desa, ulama, pemimpin buruh, pedagang kecil dan veteran yang radikal. Sekitar 420.000 pegawai negeri pada masa itu termasuk dalam kelompok masyarakat politik;

*3. Massa:*

Massa merupakan kelompok yang hampir tidak mempunyai pengaruh dalam kehidupan politik tetapi menjadi ajang perebutan pengaruh elite politik. Golongan inilah yang terbesar<sup>20</sup>.

Elite politik dalam dasawarsa-dasawarsa setelah pengakuan kedaulatan terbagi dalam dua kubu: *administrator*, yang memiliki keahlian teknis dan wawasan praktis (*practical outlook*). Mereka menekankan peningkatan kesejahteraan hidup rakyat dan untuk itu mereka menyambut

---

<sup>20</sup> Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962), hlm. 108 - 111

kehadiran modal asing. Untuk mereka masalah nasionalisasi adalah rencana jangka panjang<sup>21</sup>; dan *solidarity maker* (penggalang persatuan) yang mempunyai cita-cita tinggi (Utopia); bagi mereka pembangunan bersifat sosial dan politis dari pada ekonomis. Golongan ini kurang memiliki kecakapan teknis dan sikap pragmatis dan melupakan tujuan-tujuan *intermediar* atau *middle range goals* dalam gerak politiknya<sup>22</sup>.

Ketiga golongan dan dua kubu itu akan menentukan proses proses politik di tahun 1950 -an bahkan hingga kini.

#### D. Nasionalisasi di Indonesia

Ketika memperjuangkan kemerdekaannya secara fisik, pemerintah RI juga tidak melupakan lembaga-lembaga lain yang akan menopang perjuangan dan nantinya mendukung negara. Maka didirikanlah Bank Negara Indonesia, *Central Trading Company*, CTC (cikal bakal Panca Niaga) serta Pusat Perkebunan Negara<sup>23</sup>. Usaha menegakkan "kelas menengah" atau pengusaha pribumi dilakukan dengan mengumumkan *Program*

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 33

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 34

<sup>23</sup> Christianto Wibisono, "Profil dan Anatomi BUMN", Kompas, 6 Oktober 1989

*Banteng*<sup>24</sup> pada bulan April 1950. Kabinet Natsir pada waktu itu membuat kategori barang tertentu yang diserahkan kepada importir-importir pribumi; dan menyediakan kemudahan untuk memperoleh kredit lewat BNI bagi mereka yang berperan serta<sup>25</sup>. Sistem pemerintahan Belanda di Indonesia tidak memungkinkan timbulnya kelas menengah. Menurut Jochen Roepke, hal itu disebabkan:

1. Orang Belanda telah memperkuat Orde Tradisional yang feodal atau membekukan struktur sosial yang berisifat hierarkhis dan otoriter, khususnya dengan sistem kontrol secara tidak langsung melalui kaum bangsawan mereka sendiri;
2. sebagian besar kegiatan inovatif, khususnya dari para pedagang dan wiraswasta pribumi dianggap tidak sah, dicurigai dan dihambat oleh orang-orang Belanda<sup>26</sup>. Furnivall mencatat kehadiran *Controleur (Onvoogdij)* yang mengawasi kegiatan dan tugas Bupati yang menjadikan Bupati "tenggelam di balik layar". Bupati hanya menjalankan komando *Controleur*<sup>27</sup>.

<sup>24</sup>Program ini tidak ada kaitannya dengan *Dewan Banteng* yang diketuai oleh Kolonel Ahmad Husein di tahun 1957 (W. F. Wertheim, Indonesian Society in Transition (Netherlan : W. van Hoeve Publishers Ltd. -The Hague, 1969), hlm. 350

<sup>25</sup>Syahrir, Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 73 - 75; juga pada Feith, op.cit., hlm.174

<sup>26</sup>Jochen Roepke, "Kewiraswastaan Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia", Prisma, No. 9 Thn. VII, Oktober 1978

<sup>27</sup>J. S. Furnivall, Colonial Policy and Practice (Washington Square, New York: New York University Press, 1956), hlm. 228

Baru pada dasawarsa-dasawarsa terakhir pemerintah kolonialnya, Belanda mulai meringankan banyak pembatasan, tetapi tradisi kewiraswastaan sudah lumpuh. Modal asing mengontrol perdagangan ekspor dan impor sementara perkebunan dan serikat-serikat industri asing<sup>28</sup> bersama pedagang Cina mengontrol perdagangan dalam negeri di Indonesia dan industri tingkat menengah<sup>29</sup>.

Usaha-usaha tsb. guna membangun perekonomian Indonesia yang dilukiskan Hatta sbb:

"Perusahaan-perusahaan besar ada di tangan orang kulit putih terutama orang Belanda. Perusahaan menengah rata rata ada ditangan orang Cina, Arab, India. Sesungguhnya kapitalisme kolonial menguasai seluruh perekonomian maka penghidupan rakyat makin lama makin sukar"<sup>30</sup>

Pembangunan perekonomian itu sendiri juga diamanatkan dalam KMB:

"Akan tetapi jangan dilupakan hendaknya bahwa politik perekonomian umum yang akan dipeluk RIS terutamalah akan ditujukan kepada pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia seluruhnya .."<sup>31</sup>

Pemerintah RI pada pada pertengahan tahun 1950-an

---

<sup>28</sup> Misalnya, *Indische Ondernemersbond* atau Federasi pengusaha perkebunan Hindia yang merupakan penggabungan dari para pengusaha gula, tembakau, kopi; juga Netherlands India Petroleum company yang merupakan penggabungan dari Djambi Oil Field, Batavian Petroleum Company (BPC), Furnivall, *op.cit.*, hlm. 253

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Mohammad Hatta, Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesia (Djakarta: Djambatan, 1967), hlm. 8

<sup>31</sup> Bdk. pasal 6 Rancangan Persetujuan Keuangan dan Perekonomian, Notosoetardjo, Dokumen-2 Konperensi Medja Bundar, K. M. B. (Djakarta: Penerbit endang, 1956), hlm. 85



masih menghadapi kekuatan ekonomis Belanda yang hadir dalam kelompok-kelompok perusahaan swasta yang dikenal sebagai *The Big Three* Bank Belanda: NHM: *Nederlandsche Handels Maatschappij* (cikal bakal BEII: Bank Ekspor Impor Indonesia), NHB: *Nederlandsche Handels Bank* (cikal bakal BBD: Bank Bumi Daya) dan *Escompto* (cikal bakal BDN: Bank Dagang Negara) dan *The Big Five Trading House* Belanda yang melanjutkan kembalinya struktur ekonomi Hindia Belanda secara leluasa<sup>32</sup>.

Dalam rangka Konperensi Meja Bundar (KMB) maka ada sejumlah perusahaan *public utilities* (yang menyangkut kepentingan umum) yang dinasionalisasi yaitu Jawatan kereta api dan pos/telekomunikasi yang sebelumnya dipegang swasta Belanda. Seperti tercantum dalam Rancangan Persetujuan Keuangan dan Perekonomian (RPKP) yang mengatakan:

"Kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan untuk kepentingan umum, misalnya kereta api dan tram partikelir dan perusahaan listrik dan gas, akan dinasionalisir oleh RIS -yang sekiranya terjadi akan berlangsung dengan jalan mencabut hak atau "naasting"- tidak akan mempengaruhi pemulihan yang berhak ke dalam pelaksanaan haknya dengan perbuatan".<sup>33</sup>

Dalam rangka itu pemerintah RIS mengangkat Drs. Oudt -mantan direktur *Departement van Financien Bijeenkamst Federall Overleg* (BFO) (Departemen Urusan Keuangan

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat 4, Notosoetardjo, op.cit., hlm. 84

Pemerintah Federal) sebagai penasehat utama. Dia dimintai nasehat tentang jumlah yang harus dibayar RIS untuk menasionalisasi KLM (*Koninklijk Luchtvaart Maatschappij* = Perusahaan Penerbangan Belanda) dan NIS (*Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij* = Perusahaan Kereta api Hindia-Belanda). Oudt dikenal sangat kepada RIS dan dalam Kabinet Sukiman<sup>34</sup>. Demikian pula nasionalisasi atas *Javasche Bank* yang diumumkan pemerintah pada 28 Mei 1951. Hanya Presiden Direktur Bank itu Dr. A. Houwink mengundurkan diri, tenaga tenaga ahli Belanda masih tetap bekerja. Mereka tentunya sadar meskipun Bank itu telah dinasionalisasi namun dengan tetap bekerja padanya berarti pula mereka masih dapat mengabdikan kepada pemerintah Belanda<sup>35</sup>.

Tetapi perusahaan-perusahaan perkebunan pemegang konsesi akan dikembalikan kepada pemiliknya, orang-orang Belanda. Selain pemegang konsesi atas tanah perkebunan juga perusahaan Belanda yang dikenal sebagai *The big five* yaitu *N.V. Borsumij*; *N. V. Internatio*, Perusahaan *Jacobson van den Berg*, *N. V. Lindetives*, Perusahaan *Mirandalle & Vaute*, *Geo Wehry*.<sup>36</sup> Selain perusahaan-perusahaan lainnya

---

<sup>34</sup> Soebagijo IN, Yusuf Wibisono, Karang Di Tengah Gelombang (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hlm. 106

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> "Sari Warta Ekonomi", Basis, VIII, September 1958 - Oktober 1959, hlm. 274; selanjutnya disingkat Basis VIII

yang lebih kecil.

*Borsumij* atau *Borneo -Sumatra Matschappij* bergerak dalam perdagangan hasil-hasil perkebunan seperti: karet, rotan, damar. *Lindetives* bergerak dalam penjualan alat-alat mekanik. *Jacobson van den Berg* melakukan usaha di bidang konveksi/pakaian jadi. *Geo Wehry* merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan mesin-mesin. Sedangkan *Internatio* dan *Mirandolle & Voute* bergerak dalam bidang jasa bangunan dan mesin-mesin (alat pertanian). Perusahaan-perusahaan lainnya seperti: *Unilever* yang memproduksi bahan makanan dan alat-alat kosmetik (Misalnya, sabun mandi "Colibri" dan mentega "Palmtree"); *Bijen Korf* yang menjual bahan makanan dan alat-alat rumah tangga (setelah dinasionalisasi menjadi P.T "Sarang Tawon"). *Philips* yang memproduksi alat-alat listrik diambil alih dan diubah menjadi PT. Ralin.

Nasionalisasi besar-besaran terhadap perusahaan perusahaan Belanda terjadi pada tanggal 3 Desember 1957. Tindakan pemerintah RI ini menjadi penting karena mengubah struktur perekonomian RI dikemudian hari, serta menjadikan hubungan diplomatik dengan Belanda mencapai titik terendah. Setelah berlangsung Rapat Umum Pembebasan Irian Barat di Jakarta, dimulailah aksi pengambilalihan perusahaan dan milik Belanda di Indonesia, dan pengusiran warga negara Belanda di Indonesia. Mochtar Lubis dalam catatan hariannya tanggal 6 Desember 1957 melukiskan bahwa

pada permulaan bulan ini ditandai dengan kejadian-kejadian yang hebat. Selain penggranatan Presiden juga meningkatnya tindakan menguasai kepentingan Belanda.<sup>37</sup> Setelah terjadi pemogokan selama 24 jam di seluruh tanah air, sebagai reaksi terhadap keputusan PBB dalam masalah Irian Barat. Pada keesokan harinya terjadilah pengambilalihan Perusahaan Palayaran Belanda (KPM= *Koninklijk Packetvaart Maatschappij*) Perusahaan Geo-Wehry. & Co. Melihat keadaan itu Menteri Kehakiman RI Maengkom mengumumkan supaya warganegara Belanda yang berjumlah 56.000 orang itu meninggalkan Indonesia secepat mungkin.<sup>38</sup> Kementerian Luar Negeri Belanda telah menginstruksikan kepada perusahaan perusahaan Belanda di Indonesia untuk menghentikan usaha mereka. KPM mengabarkan telah menahan enam buah kapalnya di Singapura dan tidak mengizinkan untuk meneruskan perjalanannya ke Indonesia. Semua kantor-kantor Belanda telah ditutup, juga *Hotel Des Indes* telah diambilalih<sup>39</sup>. Menteri Kehakiman RI juga memerintahkan agar buruh-buruh perusahaan tidak mengambilalih perusahaan itu. Badan-badan usaha itu diserahkan kepada pengawasan militer khususnya perwira-perwira Angkatan Darat (AD)<sup>40</sup>.

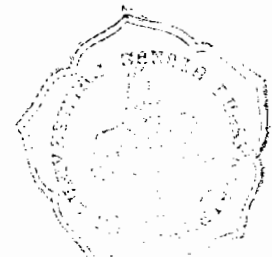
---

<sup>37</sup> Mochtar Lubis, Catatan Subversif (Jakarta: Obor, Gramedia, 1987), hlm. 86-87

<sup>38</sup> A. H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 4 (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 166

<sup>39</sup> Lubis, loc. cit.

<sup>40</sup> A. H. Nasution, op.cit., hlm. 168



## E. Dasar Hukum Nasionalisasi

Tindakan pengambilalihan itu dilakukan oleh negara karena alasan ekonomis tertentu, di samping alasan politis yang mendorong atau mengharuskan negara untuk campur tangan dalam bidang ekonomi. Pasal 27 UUD 1950 menjadi dasar tindakan itu: "Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas benda atau hak tidak dibolehkan kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan UU".

Campur tangan negara dalam bidang perekonomian bukan merupakan hal yang mengherankan. Di negara-negara sedang berkembang dan di negara sosialis-komunis, bahkan dinegara negara Liberal pun, hal itu juga terjadi. Dengan politik perpajakan dan UU anti-monopoli maka negara dapat memainkan peranan yang penting di bidang perekonomian. "Peranan pemerintah dan perlunya perencanaan ekonomi yang terkoordinasi dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang luas dan mendasar merupakan komponen penting dalam ekonomi pembangunan"<sup>41</sup> di negara-negara sedang berkembang.

Indonesia berupaya mengambil jalan tengah dalam sistem perekonomiannya. Seperti nampak dalam Pasal 37 UUD 1950 yang mengatakan:

"Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan UU, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut

---

<sup>41</sup>Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga (Jakarta: Ghalia, 1985), hlm. 35

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

27

sifat, bakat dan kecakapan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri (2);<sup>42</sup>

Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan UU (3)<sup>43</sup>

Selanjutnya pasal 38 UUD 1950 menyatakan:<sup>44</sup>

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan (1);

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (2);

Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (3)<sup>45</sup>

Atau dalam Pasal 33 UUD 1945 yang kini berlaku, mengatakan:

"Perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Cabang cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"

Tetapi UU Nasionalisasi baru disahkan setahun kemudian, pada 31 Desember 1958. Kolonel Dadang Suprajogi sebagai Menteri Stabilisasi Ekonomi memberi keterangan tatkala DPR membahas RUU Nasionalisasi :

"Pemerintah memilih tindakan nasionalisasi karena

---

<sup>42</sup> Notosoetardjo, *op.cit.*, hlm. 231

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

tindakan ini diakui oleh hukum Internasional<sup>46</sup>. Syarat yang terpenting adalah ganti kerugian (Kursif dari Gouw Giok Siong) dan ini akan dilakukan oleh Pemerintah. Maka jelaslah bahwa tuduhan seolah-olah Pemerintah telah menyita (perusahaan dan modal asing-pen) - bahkan dikatakan mencuri adalah tidak benar"<sup>47</sup>.

Undang-undang itu sesuai dengan ketentuan dalam RPKP yang mengatakan:

"Tindakan mencabut hak, menasionalisir, menghapus, menyuruh melepaskan atau memindahkan secara paksa benda atau hak, hanya akan dijalankan untuk keperluan umum menurut acara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan -jika tidak dapat persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan - dengan pengganti kerugian yang diterimakan atau dijamin lebih dahulu (Kursif dari penulis) dan yang ditetapkan hakim menurut harga yang sebenarnya benda dan hak yang diambil..."<sup>48</sup>

#### F. Perusahaan Yang Dinasionalisasi

Seturut Peraturan Pemerintah (PP) No.86 Tahun 1959, yang diciptakan hampir dua tahun setelah pengambilalihan itu terjadi, dikatakan:

"Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia (pasal 1)<sup>49</sup>

Sedangkan pasal 2 dikatakan:

"Kepada pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan tsb. dalam pasal 1 di atas diberi ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh sebuah Panitia yang

<sup>46</sup> Persesuaian tindakan nasionalisasi dengan hukum Internasional banyak disoroti oleh para ahli hukum (Bdk. Giok Siong, op.cit., Bab V. Tetapi para ahli sepakat bahwa hukum Internasional berkepentingan atas pembayaran ganti rugi atas perusahaan yang dinasionalisasi

<sup>47</sup> Gouw Giok Siong, op. cit., hlm. 6

<sup>48</sup> Notosoetardjo, op.cit., hlm. 84

<sup>49</sup> Gouw Giok Siong, op.cit., hlm. 170 -171

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

anggota-anggotanya ditunjuk oleh Pemerintah" (ayat 1)<sup>50</sup><sup>29</sup>

Selain perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, transportasi, perbankan juga termasuk perusahaan perkebunan yang menghasilkan komoditas ekspor. Perusahaan perkebunan yang dinasionalisasi itu: 17 perusahaan perkebunan tembakau milik *N. V. Vereenigde Deli Mij*; dan 5 perusahaan perkebunan tembakau milik *N. V. Senembah Mij*; dua perusahaan perkebunan tembakau milik *N. V. Vereenigde Klatenske Cult Mij*; 6 milik *N. V. Landb. Mij. "Oud Djember"*; 3 milik *N. V. Besoeki Tabak Mij*; 2 milik *N. V. Cult Mij. "Djelboek"*; dan 3 perusahaan milik *N.V. Cult. Mij. "Bogokidul"*. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku tanggal 23 Pebruari 1959 dan juga berlaku surut dari tanggal diundangkan hingga tanggal 3 Desember 1957<sup>51</sup>.

Nasionalisasi yang telah dijalankan pemerintah RI memiliki latar belakang sosial dan ekonomi tertentu. Bagaimana latar belakang itu? Bab III akan menjawabnya, dengan menguraikan situasi perekonomian Indonesia sesudah KMB.

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Jan Pluvier, Indonesie: Kolonialisme, Onafhankelijkheid, Neo-Kolonialisme (Nijmegen: Socialistische Uitgeverij, 1978), hlm. 188; Bdk. dalam PP No. 4 Thn. 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian /perkebunan Tembakau milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi, Gouw Giok Siong, op.cit., 186 - 188



BAB III

PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA-KMB

Keperluan untuk membina ekonomi nasional timbul setelah pengakuan kedaulatan. Sebab yang mendorong tindakan itu ialah perekonomian Indonesia sangat bergantung pada ekspor bahan-bahan yang sebagian besar usahanya di tangan pengusaha asing, terutama perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda. Seperti tercantum dalam Rancangan Peretujuan Keuangan dan Perekonomian yang mengatur hubungan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Belanda yang merupakan bagian dari KMB, menyebutkan:

"Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi dan ijin yang diberikan dengan sah menurut hukum Hindia Belanda dan yang pada waktu pengakuan kedaulatan masih berlaku, maka RIS berpangkal pada pendirian bahwa baik konsesi dan ijin itu diakui dan bahwa yang berhak akan dipulihkan ke dalam pelaksanaan haknya ..."<sup>52</sup>

A. Kembalinya Perusahaan-Perusahaan Belanda

Lima kelompok perusahaan Belanda: *Borsumij, Geo Wehry & Co., Internatio, Lindeteves* dan *Jacobson van den Berg*, menguasai sekitar 60 pCt. impor-ekspor Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu juga bergerak di bidang kerajinan dan industri. Pengusaha Belanda dan Cina mendominasi perusahaan besar yang terdiri dari karyawan

---

<sup>52</sup>Notosoetardjo, op.cit., hlm. 83

orang-orang Indonesia. Maka pembagian kerja dalam perusahaan-perusahaan itu didasarkan pada ras: orang-orang Belanda dan Eropa lainnya pada tingkat manajemen, orang-orang Indonesia pada lapisan bawah dan orang-orang Cina pada lapisan tengah. Pada tahun 1940 kira-kira 5 pCt. dari penduduk Indonesia berkecimpung dalam bidang perdagangan, menurut statistik Hindia Belanda. Tetapi umumnya terdiri dari pedagang-pedagang kecil. Dibandingkan dengan penduduk lain memang tidak berarti selain itu modal juga kecil. Hanya ada beberapa orang Sumatera dan dari pulau-pulau lain di Jawa atau Jakarta berhasil menjadi pedagang atau mengepalai perusahaan. Pedagang yang cukup besar seperti Dasaad dari *Malaya Import Mij*, Djohan Gelar Sutan Sulaiman dari *Firma Djohan Djohar* dan Raluan Tamin dari firma dengan nama yang sama.<sup>53</sup>

B. Dampak Dalam Bidang Perekonomian

Perusahaan-perusahaan asing, yang beroperasi di Indonesia meliputi perusahaan Inggris dan Amerika, Belanda dan juga Cina, di samping bank bank asing yang dimiliki oleh Belanda dan Inggris. Sektor perhubungan antar pulau juga ada di tangan perusahaan Belanda KPM

---

<sup>53</sup> John D. Sutter, Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, jilid 4 (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1959) hlm. 100

(*Koninklijk Paketvaart Maatschappij*) yang didirikan pada tahun 1888. Juga bank sirkulasi, *Javasche Bank*, belum berada di tangan Indonesia pada tahun 1950. Menurut Deliar Noer pada masa itu "masalah nasionalisasi dan umumnya pembinaan ekonomi nasional dianggap sebagai suatu Kemestian"<sup>54</sup>. Persetujuan-persetujuan KMB yang mengandung pengakuan kedaulatan itu menurut Ali Sastroamidjojo juga menjadi sebab pertentangan politik di antara orang Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang perekonomian dan masalah Irian Barat<sup>55</sup>.

Dengan persetujuan KMB yang mengembalikan fungsi perusahaan-perusahaan Belanda menjadikan kehidupan ekonomi Indonesia sebagian besar tergantung dari perusahaan itu. Misalnya, dari sektor perkebunan (75 pCt. milik Belanda) pemerintah RI menerima 40 pCt. dari seluruh penghasilannya, nilai ekspor (devisa) perkebunan merupakan 50 pCt. dari nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan. K.P.M. menyelenggarakan 70 pCt. perhubungan antar pulau Indonesia. Menurut taksiran jumlah penanam modal Belanda di Indonesia sekitar \$ US 1.500 juta dolar yang merupakan 70 pCt. dari seluruh investasi luar negeri Indonesia<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional (Jakarta: Grafitipers, 1987), hlm. 293

<sup>55</sup> Ali Sastroamidjojo, Tonggak-Tonggak di Perjalananku (Jakarta: Kinta, 1974), hlm. 301

<sup>56</sup> "Sari Warta Ekonomi" Basis Oktober 1957 - September 1958, VII (selanjutnya disebut Basis VII), hlm. 141

Tetapi menurut Geertz pada penggalan pertama tahun 1950-an, perkebunan-perkebunan yang ada di tangan orang asing sudah tidak berjalan lancar lagi. Penyerobotan tanah, tak terjaminnya keamanan, kesulitan perburuan, kemungkinan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah tak lagi diperbarui dan ancaman nasionalisasi yang terus menerus terbayang tidak merupakan lingkungan yang menarik lagi bagi penanam modal<sup>57</sup>.

Fakta-fakta di bawah ini menunjukkan kecenderungan tsb: Perkebunan tembakau telah terhalang terutama oleh para penyerobot tanah sehingga produksi tahun 1955 menurun menjadi sekitar 20 pCt. dari produksi tahun 1939<sup>58</sup> dan kemerosotan produksi itu masih terus berlangsung sesudahnya. Teh juga mengalami kemunduran, produksinya merosot sebanyak 70 pCt. dalam waktu yang sama. Dan dari semua tanaman perkebunan hanya karet sajalah yang menunjukkan kenaikan sekitar 35 pCt. Tetapi kenaikan hasil itu dapat memberikan gambaran optimis yang menyesatkan menurut taksiran perusahaan perkebunan itu untuk menjaga agar produktivitas itu dapat dipertahankan mereka sudah

---

<sup>57</sup> Clifford Geertz, Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia (terj. S. Supomo) (Jakarta: Bhratara, 1976), hlm.166

<sup>58</sup> Menurut Statistical Pocketbook of Indonesia (Jakarta: BPS, 1958), produksi tembakau pada tahun 1939 sebesar 35.018.000 kg; sedangkan pada tahun 1955 mengalami penurunan menjadi 7.005.000 kg. dan di tahun 1956 menurun lagi menjadi 6.972.000 kg. (hlm. 68)

harus meremajakan tanaman karet di daerah seluas 160.000 ha. tetapi yang diremajakan antara tahun 1945 - 1955 baru sekitar 35.000 ha<sup>59</sup>. Akibatnya bahwa Indonesia yang dalam tahun 1930-an telah melampaui negara-negara lain dalam kemajuan tekniknya, sekarang telah ketinggalan kalau dibandingkan dengan Malaysia dalam menggunakan metode yang lebih *up to date*. Bahayanya Indonesia tidak dapat bersaing bukan hanya dengan karet sintetis melainkan juga dengan karet alam yang dihasilkan di kawasan lain yang telah menanamkan modal baru<sup>60</sup>.

Walaupun ada kecenderungan penurunan produksi<sup>61</sup> tetapi perusahaan-perusahaan itu menduduki tempat yang terpenting dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan dunia luar. Karena sebagian besar ekspor yaitu sumber devisa tetap tergantung pada modal asing itu baik dalam bidang perkebunan, pertambangan. Bahkan, menurut Syahrir, perbankan dan perkapalan yang dikuasai oleh modal asing sebagai

---

<sup>59</sup> Ibid., hlm. 167

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Hal itu juga berarti penurunan ekspor Indonesia, seperti kopi pada tahun 1939 jumlah ekspor 65.800.000 kg, pada tahun 1957 menurun menjadi 51.200.000 kg dan tahun berikutnya menjadi 28.200.000 kg. Begitu pula dengan tembakau pada tahun 1938 48.000.000 kg., di tahun 1939 menurun menjadi 33.900.000 kg, pada tahun 1957 menurun tajam menjadi 14.000.000 kg; Hal sama berlaku untuk ekspor gula tahun 1939 1.357.700.000 kg. di tahun 1957 menjadi 142.900.000 kg dan kopra dari 309.800.000 kg. menurun menjadi 126.100.000kg. (BPS, Statistical Pocketbook of Indonesia, 1960, hlm. 128-129)

peralatan usaha dan ekonomi bangsa asing di Indonesia, serta "menggambarkan lebih jelas lagi betapa besar pengaruh serta kekuasaannya atas kehidupan negara kita. Untuk sebagian besar nasib negara kita sekarang seperti di Jaman Kolonial.."62

C. Berbagai Permasalahan yang Timbul

Sekurang-kurangnya ada tiga permasalahan yang muncul yaitu:

1. Masalah Pengelolaan Perusahaan
2. Masalah Penyelundupan
3. Masalah Korupsi
4. Masalah Tanah Perkebunan

Ketiga permasalahan itu akan diperinci dalam uraian berikut ini.

1. Masalah Pengelolaan Perusahaan

Seperti dikhawatirkan oleh penentang kebijakan pemerintah itu, Sjafruddin Prawiranegara, bekas Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang mengatakan bahwa kebijakan itu tidak dapat dilakukan. Menurut dia, sebelum memiliki pengalaman dan tenaga ahli yang cukup, nasionalisasi hanyalah berarti "pemindahan hak" saja. Malahan di tangan orang yang belum berpengalaman, ia meramalkan bahwa produksi akan merosot. Pemerintah akan banyak memberi subsidi dan proteksi bagi

---

<sup>62</sup>Sutan Sjahrir, Sosialisme Indonesia Pembangunan (kumpulan tulisan) (Jakarta: Leppenas, 1982), hlm. 202

perusahaan itu tetapi karena kurangnya tenaga ahli maka yang akan menjadi korban adalah konsumen.<sup>63</sup> Hatta dalam salah satu pidatonya menggarisbawahi pendapat itu:

"Memang dalam menentukan tujuan politik perekonomian, titik beratnya tidak terletak pada ekonomi. Ada primat politik, politik terletak di muka. Tetapi orang-orang politik yang tidak paham ekonomi tidak akan berhasil menentukan tujuan yang tepat bagi politik perekonomian. Hanya bencana yang akan diderita oleh negara dan rakyat apabila politik perekonomian ditentukan oleh orang-orang politik yang tidak paham ekonomi"<sup>64</sup>

Kekhawatiran itu terbukti dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan itu yang terutama, seperti diakui oleh Nasution sendiri karena kekurangahlian dan "salah urus" (*mismanagement*). Lebih lanjut Nasution mengatakan: "Tapi pergantian secara mendadak dari karyawan-karyawan Belanda tidaklah membantu, sehingga timbul berbagai kemacetan. Pula semakin terganggu arus barang dan dana"<sup>65</sup>.

## 2. Masalah Penyelundupan

Pada akhir tahun 1956 luar Jawa mulai bergolak yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap tindakan kabinet

---

<sup>63</sup> M. Dawam Rahardjo, "Wafatnya Seorang Sosialis Religius" (Obituari), Tempo, No. 25, Thn. XVIII, Februari 1989

<sup>64</sup> Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato, II (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), hlm. 180

<sup>65</sup> Nasution, op.cit., hlm. 168

dalam bidang ekonomi<sup>66</sup>. (Tentang ketidakpuasan luar Jawa akan dijelaskan lebih lanjut). Keadaan itu menjadi lebih buruk lagi ketika Wakil Presiden Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Dia selama itu dianggap sebagai orang yang dapat mengimbangi pandangan dan tindakan Soekarno dan mewakili kepentingan luar Jawa di Jakarta<sup>67</sup>. Para perwira-perwira militer yang memberontak terhadap pemerintah pusat dengan mengambilalih pemerintah sipil di daerah memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat di Jakarta<sup>68</sup>. Penyelundupan-penyelundupan dijalankan oleh para perwira itu sebagai senjata politik untuk menjatuhkan pemerintah Ali II.

Golongan-golongan anti pemerintah, tidak mau dengan tegas mengutuk penyelundupan besar-besaran yang terjadi. Tetapi menonjolkan bahwa meningkatnya penyelwengan itu disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutan supaya politik "menganaktirikan" daerah-daerah lekas dirubah. Daerah-daerah merasa bahwa politik perekonomian dan keuangan terlampau dipusatkan di Jakarta untuk "kepentingan Jawa" saja.

Dengan itu dimasukanlah unsur kedaerahan malahan kesukuan, di dalam bidang politik. Karena penyelundupan itu dikaitkan dengan rasa tidak puas daerah-daerah

<sup>66</sup> Douglas S. Paauw, "From Colonial to Guided Economy" dalam Ruth T McVey (ed.), Indonesia, Southeast Asia Studies (New Heaven: HRAF Press, 1967), hlm.170.

<sup>67</sup> Feith, op.cit., hlm. 525

<sup>68</sup> Sundhaussen, op.cit., hlm. 175



terhadap pemerintah pusat mencapai bentuk yang paling membahayakan persatuan dan kesatuan negara.

### 3. Masalah Korupsi

Masalah korupsi muncul di permukaan secara kuat setelah Presiden Soekarno mengumumkan keadaan bahaya perang (S.O.B.= *Staat van Orloog en Beleg*). Pengumuman itu hanya satu setengah jam setelah Kabinet Ali II menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957.

Dalam peraturan S.O.B. semua kekuasaan sipil untuk mengatur negara diserahkan kepada Penguasa Perang Pusat (Peperpu) yang diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayjen. A. H. Nasution.

Kaum militer tampaknya yakin bahwa lambatnya pembangunan negara disebabkan oleh ulah *para politisi sipil yang sering dicap sebagai korup*. Keadaan S.O.B. memungkinkan militer bertindak menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum sipil. Tidak lama sesudah pengumuman itu maka pada akhir Maret 1957 Peperpu menginstruksikan sejumlah pemeriksaan dan penangkapan beberapa bekas menteri dan pejabat-pejabat tinggi lainnya.

Mereka yang dicurigai dan dituduh melakukan serangkaian tindak korupsi adalah <sup>69</sup>:

a. *dari partai-partai:*

---

<sup>69</sup> Soebagijo IN, op.cit., hlm. 208 - 209

Mr. Iskaq Tjokroadisuryo, Dr. Ong Eng Die, Dr. Adnan Kapau Gani, Sardju Ismunandar (PNI); Mr. Yusuf Wibisono (Masyumi); Zainul Arifin, K. H. Maskur, K. H. Ahmad Dahlan, Abdul Manap (NU); Moh. Ali (Lie Kiat Teng) (PSII); Dr. Saroso (PSI);

b. *Dari Instansi-instansi:*

Mr. Mochtar Affandi (Kejaksaan Jakarta); Matondang (LAAPLN: Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri); juga seorang dari Bea Cukai, dan dari POLRI tiga orang (seorang Komisariss dan dua Ajun Inspektur); dari AD: Kol. Warsito, Letkol. Harjono, Letkol. Suwondo dan Mayor Singgih dan ada beberapa orang sipil lagi<sup>70</sup>.

Pada masa itu koran-koran terutama yang terbit di Ibukota, hampir semuanya memberitahukan adanya penangkapan- penangkapan terhadap sejumlah orang yang didakwa melakukan tindakan pidana korupsi. Menurut koran-koran tsb. di antara mereka yang ditangkap terdapat 5 orang bekas menteri, anggota Konstituante, anggota parlemen, kepala Jawatan, Komisariss Polisi, Jaksa, pengusaha. Adapun jumlah orang yang diperiksa diperkirakan sebanyak 60 orang<sup>71</sup>.

Hatta yang legalistik dan setia pada sistem Demokrasi

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Harian Suluh Indonesia, 20 April 1957, seperti dikutip Soebagijo I N, loc.cit.

Barat seakan-akan membiarkan "nasib" orang-orang partai itu. Partai-partai politik dikecamnya:

partai-partai telah dijadikan tujuan pada dirinya sendiri, dan negara sebagai alat mereka..Kedudukan pemerintah telah menjadi kedudukan seorang pesuruh partai"<sup>72</sup>

Demikian juga dengan Soekarno yang dalam pidatonya di depanKongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengatakan bahwa partai-partai telah menjadi sekedar sarana bagi kepentingan pribadi para pemimpin politik<sup>73</sup>.

#### 4. Masalah Tanah Perkebunan

Seturut ketentuan-ketentuan persetujuan KMB, pemerintah Indonesia di awal tahun 1950-an berusaha mengembalikan tanah tanah perkebunan kepada pemegang konsesi kepada perusahaan Belanda, Inggris dan Amerika. Kebijakan itu dilakukan dengan hati-hati karena selama masa pendudukan Jepang serta masa revolusi, penduduk setempat termasuk para pekerja perkebunan mengolah tanah-tanah itu untuk keperluan bahan makanan.

Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah RIS harus menghadapi banyak persoalan sehubungan dengan konflik kepentingan antara pemegang konsesi dan penduduk "liar" di tanah perkebunan itu, seperti peristiwa "Tanjung

---

<sup>72</sup> Sundhaussen, op.cit., hlm. 222

<sup>73</sup> Ibid.

Morawa"yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Wilopo<sup>74</sup>.

Beberapa perusahaan perkebunan memperlihatkan pengertiannya dengan menyerahkan sebagian sebagian tanah konsesi untuk dibagikan kepada penduduk<sup>75</sup>. Hal itu terjadi pada *Deli Planters Vereniging* (Perkumpulan Perkebunan Deli) yang terdiri atas lima perusahaan perkebunan yang meliputi luas tanah 250.000 ha. Perusahaan ini menyatakan kesediannya pada tahun 1950 untuk menyerahkan 130.000 ha. dengan syarat bahwa pemerintah menjamin penggunaan hak mereka atas sisa tanah seluas 120.000 ha. itu selama 39 tahun. Pemerintah juga diharapkan menindak petani yang melanggar. Sebuah perkumpulan perkebunan lain yang bergerak dalam penanaman karet, AVRDS, juga menawarkan penyerahan sejumlah tanah seluas 200.000 ha. tanah.

Tetapi pemerintah tampaknya tidak dapat bergerak cepat karena pemerintah terhambat oleh :

a. *Masalah Dana:*

Seperti dikeluhkan oleh Panitia Urusan Tanah Pertanian (PUTP) dibawah Munar S.Hamidjojo bagi pembayaran ganti ruqi dan kompensasi;

<sup>74</sup>Tanjung Morawa merupakan daerah kecamatan di Sumatera Timur. daerah ini dipakai sebagai lahan pertanian tembakau. Kerusakan di daerah ini terjadi ketika para petani memprotes pentraktoratan tanah mereka pada tanggal 16 Maret 1953. Polisi setempat menembak para pemrotes itu sehingga beberapa orang tewas. Bdk. G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20, II (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 89; juga pada Deliar Noer, op.cit., hlm. 273

<sup>75</sup>Ibid., hlm. 289

b. *Perlunya merombak badan administrasi:*

Dalam masalah tanah ada dua instansi yang terlibat dan yang sering menimbulkan tumpang tindih. Ketika PUTP dibubarkan, masalah penyelesaian tanah dilimpahkan kepada bagian agraria dari kantor gubernur semenjak tahun 1951. Tetapi Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah juga didirikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 1955<sup>141</sup>.

Masalah itu menjadi lebih pelik bila partai politik -khususnya PKI yang memiliki organisasi buruh - terlibat dalam persoalan tanah ini; di samping partai-partai oposisi yang berupaya menjatuhkan pemerintah yang sedang berkuasa.

D. Pemikiran Indonesianisasi Perekonomian

Ada dua pemikiran dari para pemimpin Indonesia pada permulaan tahun 1950-an tentang bagaimana membangun ekonomi nasional. Sungguhpun semuanya setuju dengan prioritas pembangunan ekonomi yang populer disebut sebagai Indonesianisasi perekonomian<sup>142</sup>, namun semua berbeda

---

<sup>141</sup> Ibid., hlm. 290

<sup>142</sup> Konsep *Indonesianisasi* bukanlah hal baru. Semua pemimpin politik yang membahas kebijakan ekonomi dalam masa revolusi berkeyakinan bahwa diperlukan suatu perubahan dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. *Indonesianisasi* itu memiliki tiga dimensi: 1. perluasan jenis (diversifikasi) produksi sehingga tidak tergantung pada hasil ekspor bahan mentah; 2. pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran dan 3. pengambilalihan kontrol dan manajemen dari perusahaan-perusahaan asing ke tangan perusahaan nasional (Feith, op.cit., hlm. 373 - 374)

pendapat sesamanya tentang masalah ini. Bagaimana peranan dan adanya modal asing di negeri ini? *Di satu pihak*, ada yang memperjuangkan nasionalisasi apa saja yang berbau asing: dalam pertanian adanya perkebunan asing, pabrik-pabrik dengan tambang-tambang minyak yang dikelola perusahaan asing. Hal itu lebih merupakan *Xenophobia* (ketakutan pada hal-hal yang berbau asing) dan usaha mencari "kambing hitam" di balik sikap kebijakan anti-Belanda pada tahun-tahun itu; keberadaan modal Belanda dirasakan oleh banyak orang Indonesia sebagai penghambat perkembangan ekonomi nasional<sup>78</sup>. *Di lain pihak*, pembangunan ekonomi nasional harus memprioritaskan pembentukan kelas menengah Indonesia yang mampu bersaing dengan pengusaha asing. Suatu iklim yang memungkinkan pembinaan itu harus diciptakan, antara lain dengan menyediakan fasilitas bagi para pengusaha yang dibina itu. Program Banteng yang telah disinggung di atas dijalankan untuk maksud itu. Kabinet Ali I menjalankan program Indonesianisasi yang lebih tegas dari pada pendahulunya. Usahanya adalah mulai bulan Agustus 1954, 85 pCt. dari semua lisensi impor diberikan kepada pengusaha pribumi. Setiap peserta haruslah importir pribumi baru yang menjalankan usaha legal dengan modal minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebuah kantor dan beberapa

---

<sup>78</sup> W. F. Wertheim, Indonesian Society in Transition (Netherland:W van Hoeve Publishers Ltd. -The Hague, 1969), hlm. 331 - 333

karyawan dengan pengalaman usaha sebelumnya. 70 pCt. dari modal harus ada di tangan orang Indonesia asli<sup>79</sup>. Partai Sosialis Indonesia (PSI) umumnya cenderung untuk menyetujui ide itu; begitu pula dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Nahdlatul Ulama (NU) ketika organisasi ini menjadi partai politik dalam masa kabinet Wilopo pada 1952<sup>80</sup>. Golongan kedua ini tidak menolak ide nasionalisasi tetapi sebaiknya tindakan itu dilakukan secara berencana dan terarah sehingga tidak merugikan ekonomi nasional itu sendiri<sup>81</sup>.

Perbedaan pendapat tentang masalah itu tercermin dalam soal tambang minyak Sumatera Utara pada tahun 1950 ketika itu juga meliputi Daerah Istimewa Aceh. Sejak tahun 1945 tambang minyak tsb. dikelola oleh *Bataafse Petroleum Maatschappij* (BPM), suatu perusahaan Belanda. Tambang itu kemudian diambil alih dan dijadikan perusahaan negara. Perusahaan Tambang Minyak Sumatera Utara telah didirikan untuk mengelolanya itu pada tahun 1949. Dengan adanya persetujuan KMB soal yang timbul adalah apakah tambang minyak itu dikelola oleh PTM atau dikembalikan ke BPM.

---

<sup>79</sup> Sampai tahun 1955 orang Cina diperlakukan sebagai orang asing dan tidak memenuhi syarat dalam program ini. (Robison, op.cit., hlm. 45); Anderson G. Bartlett et alii, Pertamina, Perusahaan Minyak Nasional (terj.) (Jakarta: Idayu, 1986), hlm. 93

<sup>80</sup> Feith, op.cit., hlm. 233

<sup>81</sup> Yang termasuk dalam kelompok ini seperti yang sudah disinggung di muka adalah Hatta, Sjafruddin Prawiranegara.

Pihak yang pro pengembalian tambang minyak itu (misal: Masyumi) mendasarkan argumentasinya pada pertimbangan hukum (kesesuaian dengan KMB); belum tersedianya tenaga-tenaga Indonesia yang terlatih dan kurangnya modal. Ketiga pertimbangan itu perlu dikemukakan mengingat instalasi tambang minyak itu banyak yang rusak akibat perang. Argumentasi mereka yang mendukung nasionalisasi (PNI, PKI, PSII, Perti) adalah prinsip politik yaitu prinsip kedaulatan. Kemampuan teknis pengelolaan tambang termasuk manajemen dapat dikuasai secara berangsur-angsur. Salah satu pertimbangan yang sering dikemukakan adalah kalau menunggu sampai tersedia tenaga tenaga yang terlatih maka Indonesia masih terus ada dalam penjajahan.

Kesadaran bagi Indonesianisasi perekonomian pada masa ini dapat dibagi dua: *pragmatis-konservatif*<sup>82</sup> yang tidak menyetujui nasionalisasi dan *politik sebagai panglima* (ekonomi sebagai akibat). Keyakinan pertama menampilkan diri dalam kepercayaan, analisa dan pemikiran ekonomi, sikap pada struktur ekonomi serta harapan dan angan-angan yang menguasai elite politik pada masa itu. Mereka percaya pada lembaga lembaga demokrasi seperti parlemen, konstituante serta konstitusionalisme, dan pada

---

<sup>82</sup>Farchan Bulkin menyebutnya sebagai *konservatisme borjuis* (Bdk. Farchan Bulkin, "Nasib Publik Dalam Sebuah Republik", *Prisma* No. 8 Thn. XIV, 1985) atau "*pragmatisme konservatif*" (bdk. dalam tulisannya "'Kapital-isme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian", *Prisma*, No. 2, Thn. XIII, 1984)



kemutlakan perlunya prasyarat stabilitas, keteraturan dan pembangunan ekonomi "menetes ke bawah" sebagai perangkat untuk menegakkan kehidupan masyarakat, ekonomi dan negara.

1. Pandangan Yang Menentang Nasionalisasi

Tokoh-tokoh pemikiran ini yang tidak menyetujui gagasan nasionalisasi adalah: Mohammad Hatta, Sjafruddin Prawiranegara dan Sumitro Djojohadikusumo.

a. *Mohammad Hatta*

Hatta tidak menolak kehadiran perusahaan swasta, bahkan swasta asing, "tetapi selama perusahaan-perusahaan *partikelir* itu melakukan fungsi produksi yang melengkapkan secara efektif, selama itu ia berjasa bagi masyarakat"<sup>83</sup>.

Kehadiran perusahaan asing diperlukan karena:

"Masyarakat Indonesia miskin akan kapital, miskin akan tenaga ahli dan belum banyak melahirkan pertindak (*pelafu - pen*) yang seukuran dengan tugasnya untuk pembangunan"<sup>84</sup>.

Bahkan menurut Hatta kehadiran modal dan perusahaan asing dapat dipergunakan untuk rakyat seperti dikatakan dalam pidatonya di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) di awal Republik:

"Kapital Internasional dapat kita pergunakan dan mesti kita pergunakan untuk membangun ekonomi kita, karena dengan tidak adanya kapital kita tak bisa membangun. Manakala kita dapat mengadakan *plan* ekonomi yang teratur, yang menyusun sebaik-baiknya cara pembangunan industri dan cabang produksi lainnya di kemudian hari, kita dapat pula *memperhitungkan* hingga mana kita dapat *mempergunakan* kapital internasional dengan tidak berakibat menindas ekonomi kita sendiri dan memberati

---

<sup>83</sup> Mohammad Hatta, Ekonomi ..., hlm. 49

<sup>84</sup> Ibid., hlm. 51

*beban rakyat kita ( kersif dari penulis)*<sup>85</sup>.

Hatta tidak mempermasalahkan apakah suatu perusahaan itu milik asing atau milik pribumi tetapi apakah keberadaannya berguna untuk "mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tenaga produktif yang ada dalam masyarakat"<sup>86</sup>. Pembangunan ekonomi yang dijalankan harus menaikkan pendapat riil masyarakat sebesar 15 pCt. dalam rencana lima tahun pertama. Kenaikan itu berarti menaikkan daya beli masyarakat sebesar 15 pCt. pula<sup>87</sup>. Dengan langkah-langkah itu indonesianisasi perekonomian dapat tercapai.

*b. Sjafruddin Prawiranegara*

Sjafruddin berkeyakinan bahwa negara membutuhkan dana baik berupa rupiah maupun devisa. Dana yang ada daripada digunakan untuk nasionalisasi (membayar ganti rugi) lebih baik untuk membiayai pembangunan pertanian guna mencapai swasembada pangan dan membangun daerah dengan transmigrasi. Perusahaan-perusahaan asing terutama milik Belanda perlu dipertahankan dan modal-modal asing lainnya diundang kehadirannya..

Apabila modal asing sudah masuk dan berperan dalam meningkatkan produksi, maka yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengontrol dan menentukan pembagian hasil produksinya<sup>88</sup>. Buruh harus mendapat upah dan jaminan

<sup>85</sup> Mohammad Hatta, Mendayung Antara Dua Karang (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 53-54

<sup>86</sup> Hatta, Ekonomi..., hlm.49

<sup>87</sup> Ibid., hlm. 55

<sup>88</sup> "Gunting Sjafruddin", Tempo, No. 1 Thn. XIX, Maret 1989

sosial yang layak, pemilik tanah perlu mendapatkan sewa tanah yang pantas, negara akan mendapat pajak yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Cadangan dana pembangunan harus cukup tersedia guna pemeliharaan modal dan pemilik modal perlu mendapatkan cukup keuntungan, sehingga masih menarik baginya untuk melanjutkan perusahaannya<sup>89</sup>.

Fungsi-fungsi modal seperti itu, menurut Sjafruddin, baru dapat dilaksanakan oleh modal asing. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengambil modal asing akan menanggung beban terlampau berat, malah menurutnya tidak dapat. Karena itu sebelum memiliki pengalaman tenaga ahli yang cukup, nasionalisasi perusahaan asing baru berarti "pemindahan hak". Ada bahaya bahwa di tangan yang belum berpengalaman, produksi perusahaan itu akan merosot. Pemerintah mungkin harus mengeluarkan banyak subsidi bagi BUMN-BUMN itu dan proteksi agar tetap bertahan tetapi yang menjadi korban pada akhirnya adalah konsumen<sup>90</sup>.

Atas dasar alasan itu, ia berpendapat untuk sementara industrialisasi lebih baik diserahkan kepada modal asing. Tetapi bangsa Indonesia perlu belajar memproduksi dan memimpin perusahaan. Strategi yang dipilihnya bukan nasionalisasi, melainkan *Indonesianisasi*. Itulah yang

---

<sup>89</sup> M. Dawam Rahardjo, "Wafatnya Seorang Sosialis Religius", (Obituari), Tempo, No. 25 Thn. XVIII, Februari 1989

<sup>90</sup> Ibid.

dilakukannya di Bank Indonesia (BI) <sup>91</sup> dengan gigih dipertahankannya staf-staf Belanda. Secara sadar Sjafruddin melakukan pemindahan keahlian untuk mendidik tenaga-tenaga ahli Indonesia.

Dalam kerangka Indonesianisasi ini, Sjafruddin mengusulkan agar prasarana -khususnya transportasi- diperbaiki, produktivitas pertanian dipertinggi. Produktivitas pertanian dikonsentrasikan pada produksi beras, karena pada saat itu *xenophobia* hanya akan membahayakan industri ekspor, yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan impor, bahkan membahayakan pembangunan ekonomi dan perluasan produksi <sup>92</sup>.

c. *Sumitro Djojohadikusumo*

Sumitro dapat digolongkan dalam kelompok *administrator* yang memiliki keprihatinan yang kuat terhadap kebijakan yang dapat memecahkan masalah - masalah dengan pendekatan yang wajar. Seperti kontrol terhadap inflasi yang terus membung di akhir Kabinet Ali I baginya merupakan masalah mendesak. Stabilisasi ekonomi dan peningkatan produksi harus dicapai dan lebih diutamakan daripada *pribumisasi* pemilikan modal dan dunia usaha. Untuk itu dibutuhkan modal asing dan pengetahuan

---

<sup>91</sup> Jabatan Sjafruddin sebagai Gubernur BI yang dipegangnya semenjak Bank itu (semula bernama *Javasche Bank*) dinasionalisasi pada 28 Mei 1951 berakhir pada 15 Juli 1956, digantikan oleh Mr. Lukman Hakim (PNI) yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur BI (Soebagijo IN, op.cit., hlm. 160)

<sup>92</sup> Farchan Bulkin, "Nasib Publik...", loc.cit.

anggaran belanja serta rasionalisasi birokrasi<sup>93</sup>.

Sumitro merumuskan kebijakan ekonominya berdasarkan pada tiga asumsi: *pertama*, kalau hubungan kekuasaan yang diwarisi dari jaman kolonial masih bertahan, maka mayoritas penduduk akan tetap miskin; *kedua*, industrialisasi harus menggantikan kontrol ekonomi yang dilakukan oleh "kepentingan luar" yang secara organis tidak berakar pada masyarakat Indonesia; *ketiga*, pertanian dan industri merupakan dua bidang yang saling melengkapi dalam upaya industrialisasi. Industrialisasi pada gilirannya akan mendinamiskan kedua bidang itu<sup>94</sup>.

Dalam kerangka itu Sumitro banyak memberikan perhatian pada industri kecil dan koperasi di daerah-daerah di samping program untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha pribumi<sup>95</sup>. Di samping usaha keras untuk menstabilkan harga pangan dan pakaian dengan mengimpor beras dan kain yang banyak menyita devisa<sup>96</sup>. Kesulitan untuk mempertahankan devisa yang tinggi sementara negara terus memerlukan biaya telah menyebabkan perekonomian terus menerus ada dalam ancaman inflasi. Ketergantungan keuangan negara pada ekspor-import -karena kegiatan ini mengalami penurunan - menyebabkan negara mendasarkan diri

<sup>93</sup> Feith, op.cit., hlm. 412

<sup>94</sup> Farchan Bulkin, loc. cit.

<sup>95</sup> Sumitro menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951) yang terkenal dengan *Sumitro Plan*, Feith, op.cit., hlm. 219

<sup>96</sup> Soebagijo IN, op.cit., hlm. 146

pada anggaran belanja yang defisit.

Pemikiran dan analisa ekonomi yang dikemukakan di atas menampilkan keyakinan akan kemungkinan diusahakannya industrialisasi dan pemindahan aset ekonomi ke tangan kekuatan nasional dalam struktur perekonomian yang ada pada waktu itu. Mereka yang menganut keyakinan itu pada umumnya *pro status quo* terhadap struktur perekonomian yang ada. Harapan mereka adalah lambat laun akan terciptanya kelas menengah pribumi yang kuat dan yang akan mampu menggantikan peranan yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan Belanda dan asing lainnya. Cita-cita ini dikejar melalui keputusan politik lembaga-lembaga negara.

## 2. Pandangan Yang Pro-Nasionalisasi

Pihak yang menyetujui kebijakan nasionalisasi hadir dalam diri *Presiden Soekarno* beserta pendukung pendukungnya. Kebijakan ini berlatar belakang pandangan "politik sebagai panglima" dan ekonomi merupakan akibat yang bertentangan dengan pandangan *pragmatis-konservatif*, dalam konteks keberadaan modal asing di Indonesia, yang dipelopori Hatta. Perbedaan pentingnya terletak pada sikap toleran kelompok Hatta terhadap kehadiran pemilik modal asing terutama Belanda.

Pemikiran Soekarno tentang perekonomian tidak dapat dilepaskan dari pandangan politiknya terhadap Belanda yang kehadirannya mendapat keabsahannya lewat ketentuan-ketentuan KMB. Ia juga menyadari berbagai kesulitan ekonomi yang melanda negara bermuara pada ketentuan-

ketentuan KMB yang menguntungkan pengusaha-pengusaha Belanda.

Oleh karena itu pembatalan KMB merupakan bagian dari usaha membangun perekonomian secara mandiri. Berkali-kali ia menyerukan agar dalam berdiplomasi "jangan minta-minta kepada kaum imperialis"<sup>97</sup>. Menurut Soekarno, pembebasan bangsa secara politis akan membawa kemerdekaan secara ekonomis yang hingga saat itu belum tercapai<sup>98</sup>. Soekarno lebih lanjut mengatakan:

"Pelaksanaan pembatalan KMB untuk satu bagian saja dari pada usaha untuk memupuk modal untuk pembangunan. Di samping pelaksanaan pembatalan itu kita harus memasuki usaha-usaha lain. Usaha-usaha lain itu antaranya ialah usaha untuk mempertinggi perhatian kepada produksi ekspor dan pemakaian barang buatan Indonesia sendiri dan keinginan untuk import dibatasi dan dikurangi. Usaha ini pun akan amat<sup>99</sup> menyumbang kepada tersusunnya modal untuk pembangunan".

Soekarno seperti tidak sabar menyaksikan sepak terjang partai-partai politik setelah pemilu 1955 belum berhasil menegakkan stabilitas politik dan perekonomian. Kabinet yang jatuh silih berganti memberikan kepadanya sikap anti-barat baik dalam sistem kepartaian, perwakilan maupun sistem ekonomi nasional. Ambruknya perekonomian lewat serangkaian inflasi yang membung, menurut Wertheim "merupakan faktor penting yang membuat pemerintah

---

<sup>97</sup> "Wawasan Salebeting Negari", Praba, No. 1 Thn. VIII, Januari 1956

<sup>98</sup> Pluvier, op.cif., hlm. 173

<sup>99</sup> Bdk. Pidato pada 17 Agustus 1957 dalam Dari Proklamasi sampai Resopim (Kumpulan Pidato) (Deppen, tt.), hlm. 327

Indonesia meluaskan semangat anti-Belanda di akhir tahun 1957"<sup>100</sup>. Pada saat yang sama tindakan itu dapat dipandang sebagai usaha yang nekad (*desperate attempt*) Presiden Soekarno guna menggalang kembali semangat kesatuan rakyat Indonesia melawan kecenderungan perpecahan dengan memunculkan aksi berskala nasional<sup>101</sup>.

Pemikiran Soekarno ini sangat didukung oleh PKI beserta organisasi-organisasi massa, PNI, Murba. "Komisi Tujuh" dibentuk bagi pembatalan KMB<sup>102</sup> yang dinilai sangat merugikan RI, di mata Soekarno. Dalam pembangunan ekonomi Soekarno ingin melihat satu buat semua, semua buat satu, artinya bangsa Indonesia harus kuat bersatu dalam negara kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke, dan masyarakat harus adil dan makmur yang memberikan kebahagiaan bagi semua warga negaranya<sup>103</sup>.

Di akhir tahun 1957 pandangan Soekarnolah yang mendapat angin sementara perundingan dengan Belanda soal Irian Barat mengalami kemacetan. Pandangan itu jelas di dalam penolakan-penolakan terhadap segala hal yang bersifat Barat khususnya demokrasi parlementer dan sistem kepartaian. Keadaan itu membuka peluang bagi Soekarno

---

<sup>100</sup> Wertheim, op.cit., hlm. 356

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Pluvier, op.cit., hlm. 182

<sup>103</sup> Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi, Vol. II (Jakarta: Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), hlm. 371



untuk merealisasikan konsepsinya tentang politik perekonomiannya.

Pemikiran Indonesianisasi perekonomian Soekarno sangat dominan pada tahun 1950-an. Pada bab berikut ini akan dibahas situasi politik dalam negeri periode 1950 - 1958.



BAB IV

SITUASI POLITIK DALAM NEGERI 1950 - 1958

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menganut sistem parlementer Eropa Barat. Pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955 telah berhasil memilih anggota-anggota parlemen dan Dewan Konstituante. Sedangkan partai-partai politik sudah banyak didirikan seturut Maklumat Nomor X (eks) pada tanggal 3 November 1945. Tetapi benih-benih konflik politik bermula dari ketentuan-ketentuan yang menyertai penyerahan kedaulatan.

Untuk mengakhiri KMB, delegasi Indonesia setuju membiarkan Belanda tetap mengontrol Irian Barat yang statusnya akan dibicarakan lagi setahun kemudian. Di samping itu juga disetujui pemulihan perusahaan-perusahaan ekonomi dan modal Belanda dan negara asing lainnya dan menerima beban hutang sebanyak 4.300 juta gulden (semula 1,130 juta dolar AS). Ketika KNIP bersidang meratifikasi persetujuan itu pada tanggal 14 Desember 1949, pembicaraan dipusatkan pada masalah hutang luar negeri yang harus ditanggung dan persoalan Irian Barat yang belum diselesaikan. Ketidaksetujuan terhadap istilah "penyerahan kedaulatan" tidak menghalangi persetujuan

perjanjian itu<sup>104</sup>. Republik Indonesia Serikat (RIS) yang ditentukan oleh KMB hanya bertahan selama 6 minggu dan pada 19 Mei 1950 RIS berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan-gerakan daerah yang ingin mempertahankan statusnya seperti Gerakan Andi Azis dari Negara Indonesia Timur (NIT), Dr. Soumokil dengan Republik Maluku Selatan (RMS) berhasil dipadamkan. Struktur federal yang diprakarsai Belanda telah berhasil dibongkar<sup>105</sup>.

Pemilihan Umum pertama pada 1955 berlangsung maka DPR terbentuk di samping Dewan Konstituante (Penyusun UUD). Dalam perkembangan ini tercatat adanya kebebasan-kebebasan atas dasar pengakuan hak-hak warga negara: kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat, kebebasan pers, berkumpul/berserikat yang terjamin pelaksanaannya. Guna memberikan gambaran tentang keadaan politik pada periode ini maka akan dijelaskan:

- A. Kehidupan Kepartaian
- B. Militer sebagai kekuatan politik
- C. Kabinet dan Instabilitas politik
- D. Berbagai permasalahan nasional

---

<sup>104</sup> Michael Leifer, Politik Luar Negeri Indonesia (terj.) (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 35 - 36

<sup>105</sup> Uraian lengkap dalam George McT. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1952) , Bab 14

A. Kehidupan kepartaian

Embrio partai-partai politik dalam periode Indonesia merdeka, muncul ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya tanggal 22 Agustus 1945, menetapkan pembentukan satu partai tunggal yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Hal itu dilakukan untuk menggalang seluruh unsur-unsur kekuatan masyarakat guna mendukung kemerdekaan RI secara lebih mantab<sup>106</sup>. Mereka menolak PNI sebagai partai tunggal dengan alasan partai itu akan menjadi saingan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh unsur kekuatan masyarakat. Adanya dua wadah yang mempunyai fungsi yang sama justru akan memecah persatuan<sup>107</sup>. Oleh karena itu gagasan pendirian partai-partai politik lebih mendapat angin.

Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, mengakibatkan munculannya partai-partai politik. Dengan harapan agar partai-partai itu hendaknya memperkuat perjuangan RI mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu

---

<sup>106</sup> Ibid, hlm. 148

<sup>107</sup> Ibid.

dengan mengatakan bahwa:

1. "Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang terartur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat;
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan januari 1946"<sup>108</sup>.

Dalam masa ini sikap pemimpin-pemimpin masyarakat amat dipengaruhi oleh pemikiran Barat beserta aliran-aliran dan teori-teorinya. Hal itu tampak dalam pembentukan partai-partai yang berlabel ideologi Barat<sup>109</sup>. Kecuali pengaruh Barat sikap itu kiranya juga didorong oleh semangat anti penjajahan dan usaha menyalurkan gagasan, pendapat dan cita-cita yang selama ini selalu dibungkam oleh penjajah. Di samping itu juga sebagai upaya untuk membuktikan kepada dunia luar bahwa pemerintah RI yang masih muda itu bukan peninggalan pemerintah fasis Jepang, tetapi atas kehendak rakyat.

Mobilisasi politik berdasarkan ideologi, agama dan golongan yang bermunculan menjadikan aneka pertentangan dan pergolakan sehingga kestabilan politik tidak menjadi suatu yang *taken for granted*. Partai-partai politik yang

---

<sup>108</sup> Y. Kristiadi, "Sejarah Perkembangan Organisasi Sosial dan Partai Politik di Indonesia", Analisa, No.8 Thn.8, 1984

<sup>109</sup> J. Tas, Indonesia: The Underdeveloped Freedom (Indianapolis, New York: Bob Merrill Co. Inc., 1974), hlm. 207

muncul di awal Republik berideologi *tripolar*: nasionalis, agama dan komunis. Dalam tahun 1952 ketika terjadi "Peristiwa 17 Oktober", perwira-perwira yang non-aktif mendirikan partai baru, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia)<sup>110</sup>. Demikian pula Masyumi terpecah setelah NU (Nahdlatul Ulama) keluar darinya dan berdiri sendiri sebagai partai politik<sup>111</sup>.

Hasil Pemilu 1955 tercatat 27 partai yang berhasil memperoleh kursi dan dengan demikian sanggup mempertahankan kelangsungan hidupnya, yaitu: PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII, Parkindo, PKRI (Partai Katolik), PSI, Perti, IPKI, GPPS (Gerakan Pembela Panca Sila), PRN (Partai Rakyat Nasional), P3RI (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia), Murba, PRI (Persatuan Rakyat Indonesia), AKUI (Aksi Kemenangan Umat Islam), ACOMA (Angkatan Komunis Muda), PPTI (Partai Tharikat Islam), PRD (Partai Rakyat Djelata), PIR (Partai Indonesia Raya) Wongsonegoro, PIR-Hazairin, Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), Baperki (Badan Permusyawaratan

---

<sup>110</sup>Sebetulnya para pendiri partai ini lebih menganggapnya sebagai "gerakan" daripada partai dalam artian yang biasanya dipakai. IPKI tidak memiliki anggota tetap. Para pendirinya adalah A.H. Nasution, Dr. Azis Saleh, Gatot Subroto, Soetoko. Orang-orang sipil dalam kelompok ini terdiri dari sejumlah intelektual. Para pendukung gerakan ini juga datang dari keluarga keraton Yogyakarta dan beberapa keluarga Bupati di Jawa Barat (Sundhaussen, *op.cit.*, hlm. 159-160)

<sup>111</sup>Feith, *op.cit.*, hlm. 236

Kewarganegaraan Indonesia), Grinda, Persatuan Daya<sup>112</sup>.

Konflik politik yang terjadi pada awal Republik hingga tahun 50-an juga mempunyai latar belakang ideologi<sup>113</sup>, seperti gerakan Kartosuwiryo, pemberontakan PKI Madiun, pergolakan di Aceh. Pertentangan antara kekuatan politik dengan latar belakang ideologi itu mempunyai pengaruh pula atas kelompok-kelompok bersenjata yang tumbuh dan berkembang dalam masa itu. Sebelum tahun 50-an menggejala di dalam gerakan aliran Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Amir Syarifuddin, Muso, Kartosuwiryo yang memiliki warna ideologi yang kuat.

UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dengan badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (*constitutional head of state*) beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggungjawab politik kepada parlemen. Karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar (PNI, Masyumi) dengan beberapa partai kecil<sup>114</sup>. Pada tahun 50-an pergolakan militer yang memilih warna kedaerahan, polarisasi yang makin tajam antara AD dan PKI yang

<sup>112</sup> Herbert Feith, The Indonesia Election of 1955 (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Interim Report Series, 1957) seperti dikutip dalam "Ikhtisar Sejarah Kepartaian" Monitor, No. 7, Thn. 1, November 1978

<sup>113</sup> Kahin, op.cit., hlm. 304 - 331

<sup>114</sup> Miriam Budiardjo, Dasar dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 70

berjuang guna *internal struggle for power* di samping Soekarno. Tiadanya konsensus antara berbagai aliran dan golongan dalam bidang ideologi dan dasar negara dalam Dewan Konstituante serta kabinet-kabinet yang tidak stabil semakin melemahkan kekuatan partai-partai politik.

Kemacetan dalam sidang-sidang Konstituante menyebabkan kekuatan-kekuatan ekstra-parlementer memainkan peranan yang lebih besar, khususnya AD dan Presiden Soekarno. Hal itu ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di mata Soekarno sistem demokrasi liberal tidak mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yaitu masyarakat adil dan makmur. Masing-masing golongan politik saling berebut keuntungan dengan mengorbankan yang lain. Soekarno ingin melihat "satu buat semua, semua buat satu", artinya bangsa Indonesia harus kuat bersatu dalam negara kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke, dan masyarakat harus adil dan makmur yang memberikan kebahagiaan bagi semua warganegaranya<sup>115</sup>. Selain itu Soekarno juga mengamati bahwa pada masa demokrasi liberal rakyat ditunggangi pemimpin partai, rakyat menjadi alat demokrasi. Pendek kata, menurut Soekarno, demokrasi liberal dengan UUD 1950 yang memayunginya dipandang sebagai penyimpangan dari

---

<sup>115</sup> Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi, Vol. II (Jakarta:Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), hlm. 371



cita-cita revolusi Indonesia<sup>116</sup>. Demikian pula AD sudah menampakkan ketidaksenangannya terhadap partai politik dalam peristiwa 17 Oktober.

#### B. Militer Sebagai Kekuatan Politik

Sesudah kemerdekaan hingga tahun 1957 militer masih setia pada konsep konvensional militerisme yang perannya hanya terbatas pada alat pertahanan dan penjaga keamanan belaka. Tentara tampaknya menerima begitu saja dominasi sipil dalam percaturan politik. Tetapi interaksi politik tidak berjalan dengan mulus sehingga menghabiskan stamina bagi pembangunan "masyarakat adil dan makmur" dengan kabinet yang jatuh bangun silih berganti. Dalam kaca mata keamanan situasi seperti itu merupakan "ketidakstabilan politik"<sup>117</sup>. Militer di negara-negara berkembang memang memiliki jiwa oposisi yang menurut Shills bersumber pada tiga sebab pokok, selain keterlibatannya dalam revolusi fisik:

1. Pendidikan mereka yang bersifat teknis<sup>118</sup> dan efisiensi adalah salah satu ukuran penting dalam tindakan;

2. Mereka biasanya curiga terhadap pidato yang

<sup>116</sup> Ibid.

<sup>117</sup> Fachry Ali, "Kita Perlu Satu Parpol Lagi", Kompas, 19 Januari 1982

<sup>118</sup> Dalam kategori ini termasuk para perwira TNI yang berasal dari PETA

bernyala-nyala dan terhadap politik tawar menawar, manipulasi dan kompromi;

3. Mereka merasa berkewajiban memegang moralitas yang lebih keras dan sederhana dan karenanya tidak menyetujui politisi dan menteri-menteri yang berdagang ijin impor, devisa, kontrak pemerintah dan pengangkatan pejabat yang tidak jujur<sup>119</sup>.

Situasi itu mendorong militer, khususnya TNI-AD untuk tidak tinggal diam sebagai penonton. Lebih-lebih munculnya pemberontakan-pemberontakan daerah PRRI/Permesta (1958 - 1960) yang sangat memojokkan posisi Masyumi dan PSI, disusul dengan pelarangan dan pembubaran kedua partai itu oleh Soekarno<sup>120</sup>.

Dalam situasi yang demikian itu AD di bawah Jendral A. H. Nasution terus mengkonsolidasikan kekuatan dan menuntut peranan yang lebih besar bukan hanya dalam bidang militer konvensional (alat pertahanan dan penjaga keamanan) melainkan juga dalam bidang sosial politik. Karena UUD'45 dalam pasal 2 terdapat *dictum* bahwa golongan fungsional termasuk dalam keanggotaan MPR maka AD mendesak agar kembali ke UUD'45 sementara terjadi

---

<sup>119</sup> Edward Shills, "Angkatan Bersenjata dalam Pembangunan Politik Negara Negara Baru", dalam Sartono Kartodirdjo, ed., Elite Dalam Perspektif Sejarah (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 201 - 202

<sup>120</sup> Donald Hindley, "Aliran and The Fall of The Old Order", Indonesia, No. 9, April 1970, selanjutnya disingkat Hindley, "Aliran... hlm. 29

kemacetan dalam sidang-sidang Konstituante. Reaksi partai-partai politik dalam keberatan terhadap gagasan Nasution tentang persoalan golongan fungsional. Mereka segan menerima tuntutan agar AD dan juga ABRI pada umumnya disetujui ikut serta dalam kegiatan non-militer. Tetapi menentang gagasan itu dikhawatirkan akan semakin buruk, seperti terjadi di negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan dan Tenggara dengan serangkaian *coup d'etat* militer. Nasution menyadari kekhawatiran itu karenanya beberapa kali ia mengadakan rapat komando daerah militer di tahun 1958. Konferensi itu dapat dipandang sebagai "gertakan" bagi partai-partai politik: menerima UUD'45 atau *coup*<sup>121</sup>. Partai-partai politik dan ormas ormasnya cenderung mempertahankan UUD 1950; sedangkan KSAL, KSAU, Kapolri tidak bersikap dalam persoalan persoalan politik, tetapi KSAD menghendaki UUD'45 kembali sementara Presiden Soekarno berdiri di antara kedua pihak itu<sup>122</sup>. Walaupun demikian, AD belum merumuskan cara-cara pelaksanaan tuntutan itu. Nasution telah mengemukakan apa yang dapat dianggap sebagai konsepnya sendiri, ketika berbicara di hadapan taruna-taruna tentara pada kesempatan ulang tahun pertama Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang, Jawa

---

<sup>121</sup>G. Moedjanto, *op.cit.*, hlm. 113-134

<sup>122</sup>A. H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 301

Tengah. Pada tanggal 11 November 1958 Nasution memperingatkan para taruna bahwa para prajurit masih harus memperoleh dukungan dari rakyat dalam perjuangan TNI untuk menyelesaikan revolusi dan untuk membangun masyarakat adil makmur. Dan TNI merupakan satu-satunya organisasi yang mampu merealisasikan tujuan itu. Keesokan harinya dengan lebih tegas dikemukakan gagasan tentang peranan TNI di masa mendatang:

"Kita tidak menginginkan dan kita tidak akan menjiplak situasi seperti yang terdapat di beberapa negara Amerika Latin, di mana tentara bertindak sebagai satu kekuatan politik yang langsung, demikian pula kita tidak akan meniru model Eropa Barat di mana tentara merupakan alat<sup>123</sup> mati (dari pemerintah) atau contoh Eropa Timur.."

Kejadian-kejadian antara tahun 1956 hingga 1958 telah memberikan pengaruh yang besar baik terhadap sistem politik Indonesia secara keseluruhan maupun AD di dalamnya. Keadaan darurat perang telah membuka jalan bagi perluasan peranan TNI bukan saja di bidang politik tetapi juga di bidang-bidang administrasi umum dan pengelolaan ekonomi. Selain itu para perwira militer juga memainkan peranan besar dalam pembentukan badan baru yaitu Front Nasional dalam perkembangan selanjutnya. Front Nasional itu didirikan pada tahun 1960 untuk memobilisasi seluruh partai politik dan organisasi massa lainnya termasuk militer di belakang politik pemerintah. Badan itu

---

<sup>123</sup> Sundhaussen, op.cit., hlm. 218 -219

menggantikan front nasional yang disponsori tentara untuk membebaskan Irian Barat, yang berdasarkan atas Badan Kerjasama Sipil Militer yang dipimpin oleh AD segera sesudah pengumuman keadaan darurat perang<sup>124</sup>.

### C. Kabinet dan Instabilitas Politik

Kabinet-kabinet pada periode Desember 1949 hingga Juni 1953 dari Hatta, Natsir, Sukiman dan Wilopo berupaya keras memecahkan persoalan administrasi negara yang akan memperkuat hukum dan tertib sosial, menaikkan produksi dan merencanakan pembangunan ekonomi. Dalam program-program itu mereka mencapai beberapa keberhasilan tetapi gagal untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil<sup>125</sup>. Meskipun kabinet-kabinet itu berusaha menggunakan fungsi sistem demokrasi konstitusional namun mereka tidak dapat bertahan menghadapi "serangan" dari partai-partai oposisi dalam parlemen. Tiga kabinet berikutnya Ali I, Burhanuddin Harahap dan Ali II bercorak lain dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Ketiga kabinet yang terakhir itu lebih menitik beratkan pada program restrukturisasi ekonomi Indonesia. Deklarasi untuk mengundang masuknya modal asing pun diumumkan yang diharapkan akan memberikan

---

<sup>124</sup> Daniel S Lev, op.cit., hlm. 65 - 67

<sup>125</sup> Feith, op.cit., hlm. 556

peranan positif bagi Rencana Lima Tahun (1956 - 1960)<sup>126</sup>.

Kesulitan kabinet, lebih-lebih sesudah pemilu 1955, adalah tak satu pun di antara aliran-aliran pokok dalam masyarakat Indonesia yang tampil sebagai pemenang. Yang muncul adalah suatu perimbangan kekuatan, yang mengharuskan adanya kompromi dalam bidang politik, baik dalam parlemen maupun dalam konstituante. Perimbangan politik itu sangat labil sehingga menyebabkan kabinet itu tidak stabil<sup>127</sup>.

#### D. Berbagai Permasalahan Politik

Permasalahan politik yang dihadapi dalam periode 1950 - 1958 adalah sbb:

1. Permasalahan Undang Undang Dasar
2. Pergolakan daerah
3. Campur tangan Presiden Soekarno
4. Munculnya Kembali PKI

#### 1. Permasalahan Undang Undang Dasar (UUD)

UUD 1950 yang berlaku (1950 -1958) bersifat sementara maka lebih dikenal sebagai UUDS. Pemilihan umum berlangsung pada tahun 1955 menghasilkan parlemen baru dan Dewan Konstituante<sup>128</sup> yang bertugas untuk menyusun UUD baru.

Perdebatan dalam sidang-sidang Dewan itu mengalami

<sup>126</sup> Ibid.

<sup>127</sup> B, J. Boland, Perkumpulan Islam di Indonesia (Jakarta: Grafitipers, 1985), hlm. 89

<sup>128</sup> Konstituante (10 November 1956 - 5 Juli 1959) beranggotakan 520 orang ditambah dengan 14 anggota yang diangkat sehingga jumlah keseluruhannya 534 orang

polarisasi tajam antara pihak pendukung Pancasila dan pendukung Islam sebagai dasar negara. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah perdebatan antara Arnold Mononutu (PNI-Kristen) dengan Kasman Singodimedjo (Masyumi). Kasman mengatakan "Islam adalah serba sila, termasuk *dus* Pancasila". Pancasila, katanya, adalah bikinan manusia, Islam adalah ciptaan Allah. Mononutu menjawab:

"Dari ideologi Pancasila ke negara Indonesia berdasarkan Islam, bagi umat Kristen adalah ibarat melompat dari bumi yang tenang dan sentosa untuk menjalankan agamanya sebagai manusia yang *volwaardig* (penuh makna - *pett.*) ke ruang kosong *vacuum*, tak berhawa"<sup>129</sup>.

Perdebatan antara dua kubu itu berkepanjangan sehingga Konstituante yang bersidang dari tanggal 10 November 1956 hingga akhir tahun 1958 belum menghasilkan konsensus nasional tentang UUD yang akan berlaku. Pemungutan suara yang diadakan tidak dapat mencapai mayoritas suara (2/3).

Presiden Soekarno sebelum melakukan perjalanan panjang ke luar negeri pada tanggal 22 April 1959 telah mengusulkan kepada Dewan untuk kembali ke UUD 1945. Menurut peraturan UUD 1950 yang menjadi dasar Konstituante, suatu usul dalam dewan hanya dapat diterima dengan 2/3 suara terbanyak. Sesudah tiga kali mengadakan pemungutan suara tidak dapat mencapai jumlah tsb.

---

<sup>129</sup> Bdk. Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta:LP3ES, 1985), hlm. 146 - 175

(pendukung Pancasila 52 pCt. ; Islam 48 pCt.). Akibatnya banyak anggota yang tidak mau lagi menghadiri sidang, seperti anggota-anggota dari PNI, PKI serta golongan atau orang yang sepaham dengan mereka. Jadi tidak mungkin lagi diadakan sidang Konstituante berikutnya. Dengan itu kuorum yang diperlukan tidak dapat tercapai dan Konstituante tidak dapat melanjutkan tugasnya<sup>130</sup>.

Hatta melukiskan situasi itu sambil mengkritik:

"Alangkah baiknya apabila mereka menunjukkan sikap toleransi. Setelah mereka (yang pro dasar negara Islam -pen.) berjuang sungguh-sungguh dan kalah suara, mereka tidak meneruskan perjuangan itu dan secara demokrasi menerima kekalahan itu dan mufakat dengan Pancasila, sebagai bermula menjadi dasar negara.."131

Dukungan untuk kembali ke UUD 1945 yang paling besar datang dari TNI-AD di bawah Jendral Nasution. Langkah-langkah yang diambil selain mendekati Presiden Soekarno juga mendekati pimpinan empat partai besar: PNI, Masyumi, NU dan PKI. Memang di tahun 1958 suara TNI (khususnya AD) sudah lebih berbobot ketika berhasil menyelamatkan negara dari pemberontakan -pemberontakan daerah yang dibarengi oleh intervensi Amerika Serikat sejak awal tahun 1958 di Sumatera<sup>132</sup>.

Keadaan yang genting seperti itu mendorong Presiden Soekarno dan lebih-lebih AD untuk menipiskan watak

---

<sup>130</sup>Boland, *op.cit.*, hlm. 104

<sup>131</sup>Mohammad Hatta, Menuju Negara Hukum (Jakarta: Idayu Press, 1977), hlm. 15 - 16

<sup>132</sup>Lev, *op.cit.*, hlm. 35



ideologis partai-partai politik dan mendesakkan diberlakukannya UUD 1945 kembali dengan sebuah dekrit.

2. Pergolakan Daerah

Di antara daerah-daerah di Indonesia, daerah luar Jawa umumnya, termasuk daerah penghasil devisa yang penting. Data berikut memperlihatkan hal itu. Pada tahun 1955- 1956 hampir 71 pCt. devisa Indonesia dihasilkan oleh ekspor dari pulau Sumatera dan 17 pCt. dari daerah -daerah lain di luar Jawa. Sementara lebih dari 80 pCt. dari jumlah devisa itu dipergunakan untuk membeli barang-bahan dasar bagi daerah daerah di pulau Jawa<sup>133</sup>. Data perdagangan luar negeri pada 1958 memperlihatkan gambaran yang serupa:

Tabel 1  
NILAI RUPIAH PERDAGANGAN LUAR NEGERI  
JAWA, LUAR JAWA DAN INDONESIA  
TAHUN 1958<sup>134</sup>  
(dalam jutaan rupiah)

	<i>Resmi</i>	<i>Penyesuaian</i>
<b>Ekspor:</b>		
Jawa dan Madura	1.179	3.124
Luar Jawa	7.835	20.763
Indonesia	9.014	23.887
<b>Impor:</b>		
Jawa dan Madura	3.945	4.616
Luar Jawa	2.258	2.642
Indonesia	6.203	7.258

<sup>133</sup> Ch. A. Fischer, South East Asia (London: Methuen, 1955), hlm. 477

<sup>134</sup> Paauw, op.cit., hlm. 170

Tabel 2  
NILAI RUPIAH PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
DAN ANTAR DAERAH JAWA, DAN LUAR JAWA  
TAHUN 1958<sup>135</sup>

<b>Luar Jawa</b>		
Ekspor ke luar negeri	20.763,00	
Ekspor ke Jawa	<u>5.685,00</u>	
	26.448,00	
Impor dari luar negeri		2.642,00
Impor dari Jawa		<u>12.802,00</u>
		15.444,00
<b>Jawa</b>		
Ekspor ke luar negeri	2.642,00	
Ekspor ke luar Jawa	<u>12.802,00</u>	
	15.926,00	
Impor dari luar negeri		4.616,00
Impor dari luar Jawa		<u>5.685,00</u>
		10.301,00

Guna memperjelas data-data di atas, data-data nilai impor berikut ini akan memperinci alokasi penggunaan devisa untuk pembelian barang-barang impor:

<sup>135</sup> Ibid., hlm. 171

Tabel 3  
NILAI IMPOR BARANG BARANG\*  
JAWA; SUMATERA; KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, NUSA TENGGARA  
(dalam jutaan rupiah)<sup>136</sup>

Thn.	Jawa-Madur	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi dll
1953	6.253,20	1.774,60	476,30	244,20
1954	5.131,00	1.414,80	419,30	209,40
1955	5.140,90	1.484,90	395,20	174,20
1956	6.980,70	2.098,60	525,20	202,20
1957	6.073,00	2.325,50	533,50	154,20

- \* : tidak termasuk paket pos/kapal, barang yang dibawa penumpang, emas dan perak;
- \*\* : Data yang telah direvisi;
- \*\*\*: Data awal.

Angka-angka tsb. memberi kesan akan ketergantungan Jawa kepada luar Jawa di dalam bidang ekonomi, sekalipun bila diperhitungkan angka-angka perdagangan dalam negeri maka ketergantungan tsb. sebenarnya bersifat timbal balik (seperti terlihat dalam Tabel 2). Kontras antara daerah Jawa dan luar Jawa tsb. masih ditambah dengan perbedaan perbedaan di bidang sosial budaya yang memang berlainan. Daerah-daerah ini lama kelamaan merasa bahwa pemerintah pusat mengabaikan mereka dari kurangnya usaha pembangunan di tempat lain di luar Jawa.

Menurut Sundhausen perasaan anti-Jawa sudah ada

<sup>136</sup> BPS, Statistical Pocket Book of Indonesia 1958, hlm.109

sejak tahun 1950. Ketika dalam parlemen dilancarkan tuduhan bahwa Jawa sedang "menjajah" dan memeras pulau-pulau di luar Jawa. Tuduhan itu semakin santer pada masa Kabinet Ali I, dengan banyaknya penyalahgunaan kurs devisa yang sangat merugikan pulau-pulau penghasil komoditas ekspor, sementara prosedur untuk mengkonsumsi barang-barang impor dipermudah. Selain itu berbelit-belitnya prosedur yang ditempuh pemerintah terutama yang berkaitan dengan lisensi devisa<sup>137</sup>. Akibatnya, pengusaha-pengusaha dari luar Jawa harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk memperoleh perijinan yang jumlahnya tidak sedikit<sup>138</sup>.

Kabinet Ali, di mata mereka, bersifat sangat sentralistis, bahkan dituding menerapkan program "Jawanisasi". Hasil Pemilu 1955 yang menempatkan PKI dalam kelompok empat besar sangat mengoncangkan para perwira di luar Jawa, lebih-lebih semenjak pengunduran diri Wakil Presiden Hatta. Ahmad Husein, yang mengambil alih kekuasaan sipil di Sumatera Barat pada 2 Maret 1957, mengatakan kepada Hasjim Ning, seorang pengusaha:

---

<sup>137</sup> Masalah tsb. menjadi ramai setelah jatuhnya Kabinet Ali II dan diberlakukannya keadaan darurat perang, dengan penangkapan-penangkapan sejumlah tokoh partai dan pejabat oleh militer dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan jabatan (Bdk. Soebagijo IN, Yusuf Wibisono..., hlm. 209

<sup>138</sup> Sundhaussen, op.cit., hlm. 184

"..tidak ada pikiranku, apalagi mengangankan untuk memisahkan Sumatera Tengah dari RI. Kami hanya menuntut keadilan dan hak-hak kami kepada pemerintah Ali. Bukan kepada Bung Karno.." <sup>139</sup>

Oleh karena itu bagi banyak eksportir, pemecahannya adalah penyelundupan. Dalam bulan September 1954, Panglima *Indonesia bagian Timur* <sup>140</sup>, Kolonel Warouw, dan Komandan Resimen Sulawesi Utara, Mayor Worang, seorang putra Minahasa, mengizinkan penyelundupan kopra secara besar-besaran dengan dua kapal Burma "untuk dapat membiayai operasi-operasi militer dan program pemukiman kembali" <sup>141</sup>. Dalam bulan Pebruari 1955 di Minahasa yang merupakan daerah penghasil utama kopra di Indonesia, terjadi penutupan terhadap Yayasan Kopra yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang memegang monopoli atas komoditas ini. dengan dukungan garnisun tentara setempat, petani kelapa dan tokoh-tokoh setempat mendirikan Yayasan Kopra Minahasa dengan menyita kekayaan Yayasan Kopra. Dalam tahun berikutnya tindakan terhadap Yayasan Kopra meluas ke Makasar yang juga mendapat dukungan dari Komandan Garnisun se tempat Let. Kol. Andi Mattalata.

---

<sup>139</sup> Otobioggrafi Hasjim Ning, Pasang Surut Pengusaha Pejuang (Jakarta: Grafitipers, 1986), hlm. 144

<sup>140</sup> Indonesia pada masa itu dibagi dalam 6kelompok T&T (Tentara dan Teritorium)yaitu: T&T I:Sumatera Utara, II: Sumatera Selatan, III: Jawa Barat (termasuk Jakarta), IV: Jawa Tengah, V: Jawa Timur, VI: Kalimantan dan VII: Indonesia Timur (Sundhaussen, op.cit.,hlm. 100)

<sup>141</sup> Pedoman, 29 September dan 6 Oktober 1954 seperti dikutip oleh Feith,op.cit., hlm. 379

Perdagangan barter di Sulawesi Utara dari bulan Pebruari hingga Maret 1956 mencapai jumlah yang mencemaskan pemerintah pusat.

Penyelundupan juga berlangsung di Sumatera dalam bulan Mei/Juni 1956. Simbolon, Panglima *Sumatera Utara*, mengirimkan sejumlah besar karet dan kopi ke luar negeri. Dia berbuat demikian dengan memberitahukan lebih dahulu kepada pejabat-pejabat tinggi dan pimpinan AD. Panglima itu menghentikan kegiatan itu ketika diperintahkan. Hasil yang diperoleh dari keterlibatannya dalam kegiatan barter itu digunakan untuk menyediakan perumahan bagi pasukannya dan untuk membayar gaji. Divisinya mendapatkan hukuman<sup>142</sup> atas kecaman-kecamannya terhadap pemerintah pusat yang dianggapkan mempersulit dana dan memperlambat pembayaran gaji pasukan<sup>143</sup>. "Tetapi pemerintah tidak pernah menerima pertanggungjawaban terperinci tentang penggunaan uang tsb. dari Kolonel Simbolon"<sup>144</sup>.

Pemberontakan daerah ini, dengan tokoh para perwira militer, menurut Ali Sastroamidjojo dipacu semenjak Kolonel A.H. Nasution diangkat kembali menjadi KSAD dengan pangkat Mayor Jendral oleh Kabinet Burhanuddin Harahap

---

<sup>142</sup> Hukuman itu dijatuhkan pada masa Kabinet Ali I, ibid.

<sup>143</sup> Feith, op.cit., hlm. 498

<sup>144</sup> Ali Sastroamidjojo, op.cit., hlm. 353

pada bulan Oktober 1955. Di kalangan tentara terjadi perpecahan antara golongan yang pro dan anti pengangkatan itu. Perpecahan itu ditunjang oleh kebijakan KSAD baru dalam menerapkan mekanisme *tour of duty*, pada segenap jajaran perwira<sup>145</sup>. Tetapi sejumlah perwira yang semula paling menentang Nasution dalam "peristiwa 17 Oktober"<sup>146</sup> bersatu mendukung Nasution seperti kolonel Sudirman, Zulkifli Lubis<sup>147</sup>. Aksi pergolakan daerah itu, seperti dikatakan Zulkifli Lubis, "ingin mengoreksi pemerintah pusat". Tetapi sebenarnya alasan pro dan kontra, terhadap kebijakan pemerintah di Jakarta, hanyalah dijadikan dalih belaka untuk menentang pemerintah pusat<sup>148</sup>.

### 3. Campurtangan Presiden Soekarno

Presiden Soekarno sebagai kepala negara sering melakukan campur tangan dalam pemerintahan tanpa memberitahukan lebih dulu kepada Kabinet. Campur tangan itu menyebabkan kedudukan kabinet diperlemah dan tindakan

<sup>145</sup> Ibid., hlm. 354

<sup>146</sup> Dalam peristiwa itu Kolonel A.H. Nasution bersama beberapa perwira pimpinan AD, baik di pusat maupun di daerah, menghadap Presiden di Istana Merdeka. Presiden Soekarno didesak untuk membubarkan parlemen serta memimpin pemerintahan. Tuntutan itu ditolak dan yang terlibat dalam peristiwa itu dibebastugaskan.

<sup>147</sup> Sundhaussen, op.cit., hlm.166; Bdk. juga "Zulkifli Lubis, Komandan Intelijen Pertama Indonesia", (Memoar), Tempo, 29 Juli 1989

<sup>148</sup> "Zulkifli Lubis ... loc.cit.

Soekarno pada di tahun-tahun akhir 50-an mencapai klimaksnya.

Beberapa contoh yang dapat disebut adalah: *Pertama*, pada jaman Kabinet Natsir, ketika delegasi Mohammad Roem gagal dalam konferensi masalah Irian Barat pada bulan Desember 1950. Soekarno mengumumkan secara terang-terangan bahwa dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk menentang kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia dan juga untuk menghilangkan Uni Indonesia-Belanda yang merupakan simbol kemerdekaan yang terbatas. Natsir berpijak pada prinsip bahwa kabinetlah yang menentukan apakah Presiden yang mengemukakan secara umum masalah itu atau tidak<sup>149</sup>. Soekarno mengancam untuk mengundurkan diri dan menyerahkan pengaruhnya kepada kekuatan oposisi di parlemen yang bermaksud menjatuhkan Natsir<sup>150</sup>. *Kedua*, dalam krisis Oktober 1956 ketika pemerintah menghadapi "Gerakan Zulkifli Lubis", di samping gerakan anti-partai yang memuncak. Justru saat itu tiba-tiba Soekarno di dalam pidatonya melontarkan gagasan tentang penguburan partai-partai. Sebabnya, partailah yang menimbulkan keruwetan politik<sup>151</sup>. *Ketiga*, ketika Kabinet Ali II mengalami krisis yang

---

<sup>149</sup> Liefer, op.cit., hlm. 46

<sup>150</sup> Ibid.

<sup>151</sup> Ali Sastroamidjojo, op.cit., hlm. 372



diakibatkan oleh keluarnya Masyumi dari kabinet, Soekarno tanpa berkonsultasi dengan kabinet melontarkan "konsepsi"nya. Gagasan itu sangat menguncangkan kabinet<sup>152</sup>.

Tindakan campurtangan yang terjadi pada akhir periode 1950 - 1958 adalah ketika Presiden Sukarno, sebagai kepala negara, menunjuk warga negara Dr.Ir. Soekarno sebagai formatur dalam pembentukan Kabinet Karya. Sebab Presiden dalam kabinet parlementer tidak memimpin pemerintahan secara langsung tetapi tugas itu dijalankan oleh seorang Perdana Menteri.

Tindakan itu sekaligus mengabaikan partai-partai besar yang berkoalisi dalam parlemen, mengingat dalam pemilu 1955 tidak ada partai/golongan yang menang mutlak. Keadaan Darurat diberlakukan, karena ancaman pemberontakan daerah. Tindakan itu makin memperkecil peranan partai-partai politik baik dalam kabinet, maupun parlemen.

Karena kemacetan dalam sidang Konstituante dan ancaman disintegrasi bangsa, maka gagasan untuk kembali ke UUD '45 semakin gencar. Gagasan itu mendapat dukungan paling besar dari TNI-AD. Tindakan itu dapat dipahami dalam rangka memperoleh pengabsahan bagi fungsi

---

<sup>152</sup> Ibid.

sosial-politik ("dwifungsi")<sup>153</sup> selain fungsi pertahanan dan keamanan. Cara yang ditempuh TNI-AD selain mendekati Presiden Soekarno dan pimpinan empat partai besar: PNI, Masyumi, Nu dan PKI. Memang suara TNI (khususnya AD) sudah lebih berbobot setelah berhasil menyelamatkan negara dari pemberontakan- pemberontakan daerah.

#### 4. Munculnya kembali PKI

Sesudah pemberontakan Madiun tahun 1948 maka PKI menjadi partai sangat dicurigai. Pada tahun 1950 terjadi pergantian pimpinan ke tangan golongan muda, setelah Politbiro baru dipilih pada tanggal 7 Januari 1951 dengan anggota D.N. Aidit, Njoto, Lukman, Sudisman dan Alimin. Pimpinan baru itu mulai menghidupkan kembali PKI. Empat strategi yang ditempuh PKI dirumuskan oleh D.N. Aidit sbb:

- a. "membentuk front nasional;
- b. penetrasi ke desa-desa dengan membangun aliansi dengan pekerja/buruh dan petani;
- c. memperkuat kepemimpinan partai di masyarakat yang lebih luas dengan menghalalkan segala cara perjuangan;
- d. kerjasama dengan partai komunis di negara-negara lain"<sup>154</sup>.

Cap "pengkhianat" yang melekat pada PKI, semenjak

<sup>153</sup> Dalam UUD'45 a.l. ditetapkan bahwa keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan wakil-wakil daerah serta golongan-golongan dalam masyarakat atau golongan fungsional (pasal 2). Oleh karena itu ABRI berjuang agar dimasukkan dalam kategori golongan fungsional (G. Moedjanto, op.cit., hlm. 113).

<sup>154</sup> D.N. Aidit, "The Struggle of the People of Asia-Africa and Latin America" dalam H. Feith, L. Castles, Indonesian Political Thinking (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1977), hlm. 266

pemberontakan Madiun tahun 1948, diatasi dengan melontarkan tuduhan kepada Hatta. Dalam tuduhannya dikatakan, bahwa Hatta berprovokasi di tahun 1948 sehingga PKI terpaksa mengangkat senjata. Hal itu terjadi melulu sebagai akibat dari serangan kelompok yang dinamakan "Teror Putih". Teror itu merupakan permainan kotor kaum militer dan Islam fanatik. PKI tidak pernah memberontak dan tidak menggunakan kekerasan<sup>155</sup>. Propaganda-propaganda dijalankan untuk memberi kesan bahwa PKI adalah partai nasional yang menghargai keyakinan agama dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat kecil. Hal itu misalnya ditunjukkan dalam kasus "Tanjung Morawa", PKI mengancam habis-habisan para pendukung kebijakan pemerintah untuk mengembalikan tanah-tanah konsesi sebagai "Klik komprador borjuis" yang mempertahankan kepentingan imperialisme<sup>156</sup>.

Untuk merealisasikan garis politik baru PKI itu maka PKI memperkuat organisasi-organisasi massa PKI. Sesudah kongresnya pada 17 September 1954, partai itu tampil dengan wajah baru. Hal itu nampak dalam sikap mendukung Soekarno, anti-Belanda, menarik sebanyak mungkin organisasi massa. Barisan Tani Indonesia (BTI) telah berhasil ditarik dalam orbit politiknya. Keberhasilan itu

---

<sup>155</sup> Hindley, The Communist Party..., hlm.234

<sup>156</sup> John D. Sutter, Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, Jilid III, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1959), hlm. 748

terjadi, ketika BTI<sup>157</sup> berfusi dengan Rukun Tani Indonesia (RTI), organisasi petani PKI. Kedua organisasi itu, meskipun sudah berfusi, tetap mempertahankan nama mereka masing-masing. PKI menyadari pentingnya organisasi yang menghimpun petani dalam BTI yang kurang diorganisir secara tepat guna<sup>158</sup>. BTI mengikuti strategi Stalin dan Mao Ze Dong menekankan tuntutan petani bagi pembagian tanah yang kosong, penghapusan hutang, kemudahan kredit, penurunan pajak. Sesudah tahun 1954 BTI dan PKI menyebarluaskan slogan *Nasionalisasi semua tanah dan hak negara atas pemilikan tanah*. Slogan itu sangat menakutkan bagi petani-petani pemilik tanah. PKI bergerak lebih jauh lagi dengan menyatakan bahwa semua tanah yang dimiliki oleh pemodal-pemodal asing dan para tuan tanah Indonesia tanpa kecuali, harus dibagikan secara bebas kepada petani yang tak mempunya<sup>159</sup>. Slogan-slogan yang menyertai tuntutan itu adalah *Tanah bagi petani* atau *tanah milik pribadi petani*.

Program dan slogan semacam itu sangat menarik banyak pengikut bagi BTI dan RTI (Rukun Tani Indonesia) dalam satu dekade keanggotaannya bertambah dari 400. 000 orang

---

<sup>157</sup> Brackman, Indonesian Communism... hlm. 208

<sup>158</sup> Sartono Kartodirdjo, Modern Indonesia Tradition & Transformation (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984), hlm. 36 - 37

<sup>159</sup> Ibid.

menjadi 7.000.000 orang<sup>160</sup>. Hindley mencatat bahwa pertengahan tahun 50-an pertumbuhan keanggotaan PKI dari 130.000 orang menjadi hampir satu juta orang; SOBSI dari 400.000 menjadi 3,5 juta orang; Pemuda Rakyat mengklaim pertumbuhan anggotanya dari 70.000 menjadi 500.000 orang dan Gerwani dari 45.000 anggota menjadi 400.000<sup>161</sup>. Sementara itu media massa PKI juga diperkembangkan seperti *Harian Rakyat* di tahun 1951 beroplak 2.000 eksemplar, di bulan Oktober 1953 12.500 dan pada bulan Februari 1954 berjumlah 15.000 eksemplar<sup>162</sup>. Sementara *Bintang Merah* dalam pertengahan pertama tahun 1951 beroplak 10.000 mengalami penurunan menjadi 7.500 hingga 8.000 di bulan Mei 1953<sup>163</sup>.

Di samping perbaikan-perbaikan secara organisatoris PKI, juga berusaha mendapatkan kawan ( PNI dan kemudian Soekarno) dan lawan (Masyumi, TNI-AD). Dengan memanfaatkan kekeruhan politik pada penggalan pertama tahun 50-an, akhirnya PKI dapat merehabilitir diri secara resmi pada kongresnya yang ke-5 pada bulan Maret 1954. Presiden Soekarno merestui berdirinya kembali PKI dengan mengirimkan sambutan tertulis.

Dalam pemilu tahun 1955 PKI termasuk dalam kelompok

---

<sup>160</sup> Ibid.

<sup>161</sup> Hindley, The Communist Party... hlm.251

<sup>162</sup> Ibid., hlm. 77

<sup>163</sup> Ibid.

empat besar dengan perolehan suara 6.176.914 atau 16,4 pCt.dengan 39 kursi di parlemen sesudah PNI, Masyumi dan NU<sup>164</sup>. PKI belum dapat memasuki kabinet selama kabinet-kabinet parlementer masih berjalan. Tetapi persekutuannya dengan Soekarno dimulai di awal tahun 1957, tepatnya pada 21 Februari 1957, tatkala Soekarno mengemukakan gagasan untuk mengadakan sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah "konsepsi Presiden". Dua alasan pokoknya adalah perjuangannya mempertahankan kedudukan politiknya yang dominan dan harapannya "menyelesaikan revolusi"<sup>165</sup>. Dalam konsepsinya itu Soekarno ingin memasukkan PKI dalam kabinet "berkaki empat" karena ditopang oleh empat partai besar hasil pemilu 1955.

Tindakan Soekarno untuk memasukkan PKI itu dikenal sebagai *domestifikasi PKI* atau menurut istilah Roeslan Abdulgani *menasionalisasikan komunis*. Ada tiga alasan mengapa taktik itu dapat dilaksanakan, seperti dijelaskan Soekarno. *Pertama*, "tentang teori Marxisme-Leninisme, saya lebih tahu dari Aidit dan itu anak-anak" (Mereka dianggap "anak-anak" karena Alimin, Muso sudah tiada). *Kedua*, "Massa mendengarkan saya. Massa saya masih lebih besar daripada massa PKI". *Ketiga*, "orang luar negeri, kalau mau datang

---

<sup>164</sup> Feith, *op.cit.*, .hlm. 434

<sup>165</sup> Hindley, *The Communist Party*.hlm. 256

ke sini tidak bisa langsung menemui Aidit, mesti lewat saya"<sup>166</sup>. Di samping itu PKI sebagai partai besar dalam pemilu 1955 harus ikut bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan<sup>167</sup>.

Dengan dukungan Soekarno, PKI berhasil memasuki Kabinet. Akibatnya, memiliki akses pengaruh yang besar dalam diri Presiden dan di kalangan massa rakyat.

Secara singkat keadaan politik dalam negeri ditandai dengan mundurnya peranan partai politik baik dalam kabinet maupun dalam dewan perwakilan. Kemunduran terjadi sesudah jatuhnya Kabinet Ali II. Hanya ada satu partai, yang terus dapat memperkuat diri yaitu PKI. Sementara kekuatan-kekuatan ekstra-parlementer, Soekarno dan TNI-AD semakin kokoh dalam percaturan politik nasional.

Keadaan politik dalam negeri itu juga dikondisikan oleh suatu "faktor variabel" yaitu masalah Irian Barat. Persoalan itu menjadi fokus perhatian politik luar negeri, yang juga menentukan pergolakan politik dalam negeri RI. Hal itu nampak dalam tindakan nasionalisasi pada tahun 1957. Dalam bab VI akan diuraikan masalah tsb.

---

<sup>166</sup> Roeslan Abdulgani, "Dunia Tidak Hitam Putih" (Memoar), Tempo, 24 Juni 1989

<sup>167</sup> Ibid.

BAB V  
MASALAH IRIAN BARAT DAN TINDAKAN NASIONALISASI

Ada dua masalah besar yang menjadi fokus perhatian politik luar negeri RI dalam periode 1950 - 1958:

A. Masalah Irian Barat

B. Hubungan Dengan Negara Adi Daya (*Super Power*)

Perjuangan mengembalikan Irian Barat tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan negara-negara adi-daya (Amerika dan Uni Soviet), lebih-lebih di forum PBB. Oleh karena itu keduanya saling berkaitan satu sama lain.

A. Masalah Irian Barat

Seluruh perhatian RI di awal tahun 1950 adalah bagaimana menghadapi Belanda dengan ketentuan-ketentuan KMB. Ketentuan KMB memberi kelonggaran kepada Belanda dalam masalah ekonomi dengan dipulihkannya ijin berusaha perusahaan-perusahaan Belanda. Hal itu dijalankan guna memperoleh keuntungan politik. Anak Agung Gde Agung salah satu peserta konferensi (Perdana Menteri NIT/Wakil Ketua BFO) mengatakan:

"KMB berjalan dengan sangat alot. Delegasi Belanda berusaha secara gigih mempertahankan kepentingannya terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan di Indonesia"<sup>168</sup>.

---

<sup>168</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, "Konferensi Meja Bundar Empat Puluh Tahun Lalu" (II), selanjutnya disingkat "KMB..(II)", Kompas, 3 November 1989



Nyatanya sesudah pengakuan kedaulatan<sup>169</sup>, RIS mendapat pengakuan dari dunia internasional. Pertukaran duta atau duta besar dilakukan dengan negara-negara lain. Bahkan pada bulan September 1950, setelah RIS kembali ke negara kesatuan, Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke-60.

Ada ganjalan dalam KMB yaitu masalah Irian Barat,<sup>170</sup> yang muncul pada pagi-pagibuta tanggal 1 November 1949. Ada satu kompromi politik yang dapat dicapai tentang status wilayah Irian Barat:

*Status quo* wilayah New Guinea harus dipertahankan dengan pengertian bahwa dalam masa setahun setelah pengakuan kedaulatan kepada RIS, soal kedudukan politik New Guinea akan ditentukan melalui perundingan antara RIS dan kerajaan Nederland"<sup>171</sup>.

Anak Agung dalam masalah ini menjelaskan:

"Menjelang tengah malam, nampaklah dengan jelas bahwa pihak Belanda tidak ingin mundur dan bersedia menciptakan *deadlock*, sekalipun dengan ini KMB akan gagal. Pembicaraan saya dengan Drees (Perdana Menteri Belanda dan Ketua KMB -pen) siang harinya saya laporkan

<sup>169</sup> Dalam teks Piagam berbahasa Belanda, kata yang digunakan adalah *overdracht* yang berarti penyerahan. Dari sudut pihak Indonesia kata itu berarti "pengakuan" karena suatu bangsa pada dirinya sendiri berdaulat, bukan atas pemberian bangsa/negara lain. Dalam ratifikasi perjanjian KMB penyerahan dari pihak Belanda dan pengakuan dari pihak RI terjadi bersama-sama.

<sup>170</sup> Meskipun secara eksplisit tidak dicantumkan dalam UUD 1945 tetapi wilayah yang dikehendaki oleh para perancang UUD itu adalah bekas Hindia Belanda, Malaya, Kalimantan Utara, dan Timor Portugis. (P.J. Suwarno, Sejarah Birokrasi (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1989), hlm. 45). Jadi Irian Barat bagi RI merupakan wilayah yang masih harus diperjuangkan sesudah KMB.

<sup>171</sup> Notosoetardjo, *op.cit.*, hlm.152. D.M.G. Koch, JWF Riemers (red.), Het Geschilpunt West Nieuw Guinea Eist een Oplossing, (Kliping pembicaraan masalah Irian Barat di negeri Belanda), selanjutnya disingkat Het Geschilpunt... (t.t), hlm. 32; Leifer, *op.cit.*, hlm. 43

kepada Bung Hatta. Kami menarik kesimpulan, sikap keras delegasi Belanda memprovosir suatu *deadlock* memang berdasarkan keputusan seluruh kabinet"<sup>172</sup>.

Pihak Belanda menyadari adanya dilema dalam masalah ini sesuai yang dikatakan oleh Prof. Romme, Ketua Fraksi

Partai Katolik di parlemen :

"Jika orang (Belanda -pen.) bersedia terlibat dengan masalah New Guinea berdasarkan realitas konkrit yang ada lalu orang harus mengakui bahwa masalahnya sampai pada suatu dilema menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia atau mempertahankan *status quo*"<sup>173</sup>.

Tetapi, menurut Anak Agung, Prof Romme dengan partai Katoliknya ,didukung oleh partai-partai Kristen lainnya, menginginkan agar Kerajaan Belanda, setelah terwujudnya RIS yang merdeka dan berdaulat , masih tetap diakui sebagai penguasa kolonial di kawasan Pasifik. Hal itu, kata Anak Agung, demi mempertahankan gengsinya di mata dunia internasional. Untuk mencapai tujuan itu, menurut mereka, suatu keharusan wilayah Irian Barat tetap berada di bawah kekuasaan Belanda <sup>174</sup>. Menurut Abu Hanifah pembicaraan tentang masalah Irian Barat bagi Belanda mempunyai hambatan psikologis yang di mata orang Indonesia menjadi hambatan yang bermakna lain <sup>175</sup>. Hambatan itu

---

<sup>172</sup>Anak Agung, "KMB..(II)

<sup>173</sup>Pidato Romme di Majelis Rendah pada 23 Januari 1951, Het Geschilpunt..hlm.30

<sup>174</sup>Anak Agung, "KMB..(II)

<sup>175</sup>Abu Hanifah, Tales of A Revolution (Australia: John Sands Pty. Ltd., 1972), hlm. 354

dirinci oleh Louis de Jong <sup>176</sup>, penulis sejarah resmi Belanda, dalam lima faktor. *Pertama*, ambisi menggunakan ikatan politik dengan Hindia Belanda untuk menunjang kebangkitan Belanda menjadi kekuatan besar (*imperium*) pasca perang Eropa. *Kedua*, ketakutan menjadi miskin kalau kehilangan sama sekali tanah jajahan. *Ketiga*, keinginan sebagian kalangan orang Belanda menyelesaikan peralihan untuk mengurangi ikatan *paternalistis* antara negara pusat dan jajahan secara bertahap. *Keempat*, keinginan kalangan Gereja untuk memajukan proses peng-Kristen-an. *Kelima*, karena Belanda tidak pernah memikirkan dan mempersiapkan tuntutan dekolonisasi atau kemerdekaan sehingga proklamasi kemerdekaan RI 1945 menjadi kejutan total, suatu *fait accompli*<sup>177</sup>.

Selain alasan yang bersifat psikologis juga ada alasan obyektif yaitu letak Irian Barat yang strategis dengan luas sekitar 413.000 km persegi, penduduknya yang terbelakang dalam jumlah yang kecil. Diperkirakan bahwa kawasan itu mengandung barang-barang tambang: nikel, timah hitam, tembaga dan lebih-lebih minyak bumi<sup>178</sup>. Tetapi, pada

<sup>176</sup>Pembicaraan yang menyangkut kemerdekaan Indonesia terdapat dalam jilid ke-12, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld Oorlog (Amsterdam: Rijkinstituut voor Oorlog documentatie (RIOD); s'Gravenhage : SDU Drukkerij, 1988), Bab 7 *De Horsteling met de Republiek Indonesie* (Pergulatan dengan RI)

<sup>177</sup>Seperti dikutip oleh Aboeprijadi S, "Jejak Jejak Para Opsir Negara Kolonial", Tanah Air, No.3, September 1988

<sup>178</sup>Jean Bruhart, Histoire de L'Indonesie (Paris: Presses Universitaires de France, 1968), hlm. 112 - 113

masa itu, belum ada bukti keberhasilan budi daya barang-barang tambang itu<sup>179</sup>. Sebagai contoh, usaha penambangan minyak bumi oleh *Netherlands New Guinea Petroleum Company* yang mengalami kerugian pada pertengahan tahun 1950-an.<sup>180</sup>

Ternyata setelah lewat setahun, Belanda tetap mempertahankan kedudukannya di Irian Barat dan perundingan yang dijalankan —seperti delegasi Mohammad Roem di Den Haag pada bulan desember 1950— tidak membawa hasil<sup>181</sup>.

#### 1. Kendala-Kendala Perjuangan Irian Barat

Ada beberapa faktor yang tidak menguntungkan Indonesia dalam perjuangan ini: peranan Australia dan Amerika Serikat serta cara perjuangan yang ditempuh RI.

##### *Peranan Australia dan Amerika Serikat:*

Dalam pemilu tahun 1949, Partai Buruh Australia dikalahkan oleh Partai Liberal dan Country yang memihak Belanda, khususnya dalam masalah Irian Barat. Pemerintah baru Australia memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah Belanda. Pemerintah Amerika Serikat, meskipun mengambil sikap yang tidak memihak dalam masalah Irian

---

<sup>179</sup> Robert C. Bone, The Dynamics of The Western New Guinea (Irian Barat) Problem (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, 1962), hlm. 7

<sup>180</sup> Ibid.

<sup>181</sup> M. Sabir, Politik Bebas Aktif (Jakarta: C. V. Haji Masagung, 1987), hlm. 119

Barat, namun sikap itu lebih menguntungkan pihak Belanda. Sikap itu berarti mempertahankan *status quo*. Dalam masalah ini, Amerika sebenarnya tidak ingin mendesak Belanda yang menjadi sekutunya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO; dan tidak ingin juga mendesak Australia yang telah menjadi sekutunya dalam ANZUS (Australia, New Zealand, United States) <sup>182</sup>.

## 2. Cara Perjuangan Yang ditempuh RI

Masalah Irian Barat membangkitkan keprihatinan bagi Indonesia. Penyebabnya adalah penyimpangan dari landasan utama bagi penentuan wilayah Republik yaitu "harus memasukkan semua wilayah Hindia Belanda" <sup>183</sup>. Walaupun terdapat kesamaan pandangan mengenai sikap mendua Belanda, Irian Barat menjadi bahan pertentangan dalam negeri karena adanya perbedaan dalam pendekatan untuk menyelesaikan persengketaan yang menyerupai perbedaan pendekatan dalam mencapai kemerdekaan. Pendekatan itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar:

- a. Kelompok Hatta
- b. Kelompok Soekarno

### a. Kelompok Hatta:

Menurut kelompok ini, bagipemerintah pasca-kolonial Indonesia untuk mendapatkan kembali bagian wilayah

---

<sup>182</sup> Ibid., hlm. 120

<sup>183</sup> Leifer, op.cit., hlm. 144

Nusantara yang "paling tidak makmur", tidak sebanding dengan biaya politik dan ekonomi<sup>184</sup>. Bahkan keinginan untuk menunjukkan sikap moderat dan tanggungjawab serta perlunya menarik dan mendapatkan ketrampilan-ketrampilan teknis dan sumber-sumber ekonomi asing telah mendorong Hatta untuk mencegah kebuntuan (*deadlock*) atas masalah Irian Barat dalam KMB. Bagi Hatta resiko gagalnya konferensi ini sangat besar. "Selain itu, terwujudnya RIS yang sekarang sudah diambang pintu akan menjadi suatu pertanyaan .Belum tentu kesempatan yang sangat menguntungkan Indonesia ini akan timbul kembali"<sup>185</sup> Hatta dan pengganti-penggantinya yang memimpin Kabinet merasa wajib mencapai tuntutan wilayah tetapi melakukan usaha itu dalam semangat konsiliasi berdasarkan kerangka formula KMB<sup>186</sup>. Seperti dikatakan Abu Hanifah kepada van Maarseveen, Menteri Tanah Jajahan:

"Saya percaya bahwa suatu hubungan yang lebih baik (antara Indonesia-Belanda) akan membuahkan hasil dalam bidang ekonomi maupun politik. Hal itu tentunya setelah

---

<sup>184</sup> Leifer, *op.cit.*, hlm. 44

<sup>185</sup> Anak Agung, "KMB..(II)

<sup>186</sup> Bagi Hatta sesudah pengakuan kedaulatan, revolusi Indonesia sudah selesai dan sekarang perhatian harus dipusatkan pada persoalan bagaimana membangun kembali. Jawaban itu berlawanan dengan Soekarno bahwa revolusi belum selesai karena secara teritorial belum seluruh wilayah Indonesia dikembalikan Belanda di samping alasan-alasan lain (Onghokham, "Revolusi Indonesia: Mitos dan Realitas", *Prisma*, No.8 Thn. XIV, 1985

penyerahan Irian Barat menjadi nyata"<sup>187</sup>.  
Maarseveen, menurut Abu Hanifah, tampak lega dan  
tersenyum, sambil mengatakan: "Anda tidak seburuk seperti  
yang dilaporkan kepada kami. Marilah kita berharap untuk  
yang terbaik<sup>188</sup>.

b. Kelompok Soekarno

Soekarno mewakili pandangan militan yang memasukkan  
tuntutan atas Irian Barat. Dalam pidato bulan Agustus  
untuk memperingati HUT ke-5 Proklamasi kemerdekaan,  
Soekarno menandakan:

"Jika suatu penyelesaian dengan perundingan tak  
tercapai dalam setahun ini, suatu konflik besar akan  
terjadi mengenai siapa yang akan berkuasa di pulau tsb.  
sejak itu"<sup>189</sup>.

Lebih lanjut Soekarno memperingatkan bahwa Indonesia akan  
berjuang sampai kapan pun "selama satu bagian dari negara  
kami tidak beres"<sup>190</sup>. Manifestasi perasaan nasionalis yang  
menantang ini mempunyai dampak politik di dalam negeri.  
Hal seperti itu menurut Leifer, merupakan usaha  
menggunakan masalah Irian Barat sebagai satu cara  
mengatasi keterbatasan konstitusional yang membatasi  
jabatan Presiden dalam tugas-tugas seremonial. Presiden  
Soekarno menunjukkan sikap tegas: "Jangan minta-minta

---

<sup>187</sup> Abu Hanifah, op.cit., hlm. 354

<sup>188</sup> Ibid.

<sup>189</sup> Ibid., hlm. 44

<sup>190</sup> Ibid., hlm. 45

kepada kaum imperialis"<sup>191</sup>.

Kedua kubu ini berebutan pengaruh dalam partai-partai politik yang duduk dalam kabinet. Setiap perkembangan perundingan menghasilkan pro dan kontra yang dapat mempengaruhi jatuh dan banggunya kabinet. Satu contoh yang dapat dikemukakan adalah dalam masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Strategi kabinet dalam diplomasi adalah lewat serangkaian perundingan meminta konsesi politik. Kabinet yakin bahwa dengan *an offensive of reasonableness* dapat membujuk Belanda untuk mengadakan perubahan-perubahan penting yang menyangkut ketentuan-ketentuan KMB<sup>192</sup>. NU dan PSII menentang strategi itu dengan mengirimkan nota agar delegasi RI dipanggil pulang. Kalau nota itu tidak diikuti maka kedua partai itu akan menarik menteri-menterinya dari kabinet. Alasan yang dikemukakan oleh pihak yang kontra perundingan Jenewa adalah perundingan itu akan mempersulit pembentukan kabinet karena banyak partai yang tidak setuju dengan diplomasi itu. Dan hubungan dengan Belanda merupakan masalah gawat yang tidak dapat diselesaikan secara serampangan<sup>193</sup>. NU dan PSII berkeyakinan bahwa setiap perundingan antara delegasi RI dan Belanda harus diawasi PBB atau paling tidak diperintahkan oleh lembaga

---

<sup>191</sup> "Wawasan Salebeting Negari, Peraba, No. 1, Thn. VIII, Januari 1956

<sup>192</sup> Feith, op.cit.., hlm. 450

<sup>193</sup> Ibid.



itu. Soal kedaulatan Irian Barat harus didahulukan dan masalah ekonomi akibat persetujuan KMB dapat diselesaikan kemudian. Demikianlah pendirian kedua partai itu<sup>194</sup>. Sementara itu PNI dan NU berupaya keras agar perjanjian dengan Belanda itu tidak jadi diratifikasi. Belanda nampaknya mengetahui keadaan dalam negeri Indonesia dengan sengaja mengulur-ulur waktu. Sementara itu Presiden Soekarno mendesak kabinet untuk segera mengadakan pemilu: "siapa yang menunda-nunda pemilihan umum adalah pengkhianat negara"<sup>195</sup>. Perhatian kabinet pun terpecah menjadi dua: penyelenggaraan pemilu dan masalah Irian Barat.

Jadi masalah politik Irian Barat menjadi salah satu unsur sengketa antar partai-partai politik dan antara partai dengan Soekarno. Sengketa itu juga menjadi salah satu sebab jatuhnya suatu kabinet.

### 3. Perjuangan di Forum PBB

Sidang Dewan Keamanan (DK) yang harus menyetujui setiap masalah yang akan dijadikan agenda MU, dalam masalah Irian Barat, tidak mengalami kesulitan. Begitu pula dalam Panitia Umum PBB tidak diperlukan mayoritas

---

<sup>194</sup> "Wawasan Salebeting Negari" Peraba, No. 4 Thn. VIII, Pebruari 1956

<sup>195</sup> Ibid.

mutlak, masalah Irian Barat dapat diterima dengan suara 30 pro, 11 kontra dan 10 *abstain*. Waktu masalah itu muncul, PBB baru beranggotakan 60 negara yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok negara-negara Asia-afrika masih merupakan minoritas kecil, sedangkan negara-negara Amerika Latin merupakan kelompok besar. Harapan akan dukungan Amerika Latin meleset sama sekali<sup>196</sup>.

Indonesia secara berturut-turut mengajukan sengketa Irian Barat dalam sidang-sidang MU V, tahun 1955, MU XI tahun 1956, dan MU XII tahun 1957. Tetapi hasil pemungutan suara kurang lebih tidak berbeda dari hasil yang diperoleh MU IX tahun 1954 ketika Wakil tetap RI di PBB, Sudjarwo Tjondronegoro, atas instruksi pemerintah Ali Sastriamidjojo, mengajukan permintaan kepada Sekjend. PBB, U Thant, agar masalah Irian Barat dicantumkan dalam agenda Majelis Umum PBB IX. Tetapi pemungutan suara yang diadakan, tidak memperoleh 2/3 suara yang diperlukan<sup>197</sup>.

Hambatan yang dihadapi RI, seperti yang telah disinggung di muka, adalah peranan negara besar dalam DK mendukung Belanda. AS bersikap tidak memihak (*abstain*), sedangkan negara-negara Eropa Barat lainnya (selain Yunani) dengan terbentuknya NATO, mendukung Belanda. Uni Soviet beserta negara sekutunya mendukung RI.

---

<sup>196</sup> M. Sabir, *op.cit.*, hlm. 121

<sup>197</sup> Ibid.

#### 4. Dukungan Negara-Negara Berkembang

Negara-negara berkembang yang terlibat dalam Konferensi Asia Afrika, pada bulan April 1955, sepakat mendukung Indonesia dalam masalah Irian Barat. Dukungan itu merupakan pencerminan sikap anti kolonialisme<sup>198</sup>.

Lima Perdana Menteri, pemrakarsa Konferensi<sup>199</sup>, mengeluarkan komunike bersama. Isinya, mengharapkan agar Belanda mau membuka kembali perundingan, seperti dijanjikan kepada Indonesia dalam KMB<sup>200</sup>.

#### B. Hubungan Dengan Negara Adi-Daya

Negara Adi-Daya (*superpower*) yang berperan dalam mempercepat pengakuan kedaulatan adalah AS. Baik lewat forum PBB maupun perannya untuk menekan Belanda. Amerika pun lebih dulu membuka hubungan diplomatik dengan RI bila dibandingkan dengan Uni-Soviet yang muncul lebih kemudian. Keterlambatan negara besar itu disebabkan oleh sikap RI yang agak anti-komunis, semenjak pemerontakan Madiun pada 1948. AS berhasil menekan Belanda agar duduk dalam meja perundingan, dengan mengancam akan menanggukhan bantuan yang dijanjikan dalam Program Marshall. Karena AS

---

<sup>198</sup>George McT Kahin, The Asian-African Conference, Bandung Indonesia, April 1955 (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1956), hlm. 83

<sup>199</sup>Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (Indonesia), U Nu (Burma), Mohammad Ali (Pakistan), John Kotelawala (Srilanka), Jawaharal Nehru (India)

<sup>200</sup>Robert C. Bone, op.cit., hlm. 133

melihat bahwa sekitar 400 juta dolar AS dari paket bantuan yang diberikan dipergunakan untuk membiayai operasi-operasi militer Belanda di Indonesia. Dengan demikian AS merasa bahwa secara tidak langsung menghalangi aspirasi kemerdekaan Indonesia<sup>201</sup>. Di samping itu kerjasama dengan AS terwujud dengan bantuan keuangan dan proyek-proyek kilang minyak di Sumatera dan tambang-tambang lain.

Uni Soviet memiliki peranan yang berlainan, karena keterlibatannya secara tidak langsung dengan Pemberontakan PKI di Madiun. Sehingga setelah pengakuan kedaulatan, meskipun Rusia mengakui kedaulatannya, tetapi mengecam pemerintahan Soekarno - Hatta seperti ditulis Harian *Izvestia* pada 15 Januari 1950:

"Langkah -langkah awal yang diambil oleh pemerintah yang disebut "pemerintahan" Soekarno -Hatta sesudah Perjanjian The Hague membuktikan bahwa klik ini telah siap melayani majikannya yang sesungguhnya - Imperialis Amerika - dengan setia dan menyakinkan...Merupakan suatu fakta bahwa mereka memperdayakan rakyat Indonesia dengan "penentuan nasib" sendiri yang salah yang diterima di The Hague dan rakyat (Indonesia) sekarang ini sedang berjuang untuk kemerdekaan yang sejati..."<sup>202</sup>

Hubungan diplomatik dengan Uni Soviet menjadi fokus perhatian RI pada Jaman Kabinet Wilopo. Pada bulan

<sup>201</sup> Howard Palferey Jones, Indonesia: The Possible Dream (Singapore: Mas Ayu PTE. Ltd., 1973), hlm. 112, bdk. Kahin, op.cit., hlm. 403

<sup>202</sup> Ruth T. McVey, The Soviet View of The Indonesian Revolution, (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, 1957), hlm. 83

Februari 1953 soal penetapan misi diplomatik diajukan lagi di parlemen (setahun sebelumnya pernah diajukan tetapi ditolak). Secara umum penetapan itu mendapat tanggapan yang simpatik, karena pertukaran duta besar dengan negara komunis dapat menciptakan keseimbangan dalam kebijakan luar negeri yang independen<sup>203</sup>. Tetapi prakarsa itu digagalkan oleh partai oposisi. Pembukaan diplomatik itu baru dapat dilaksanakan pada jaman Kabinet Ali pada bulan Desember 1953<sup>204</sup>.

Hubungan dengan kedua negara adi-daya itu mengalami pergeseran, ketika masalah Irian Barat menghangat kembali di paruh kedua tahun 50-an. Soekarno selalu menegaskan kepada John Allison (yang kemudian digantikan oleh Howard P. Jones):

"Jika pemerintah AS mau merubah sikapnya terhadap masalah Irian Barat, saya akan mau bersikap cukup netral antara dua blok dan juga bersikap sejalan di samping Amerika -seperti itu!"<sup>205</sup>.

Tetapi sikap Amerika, seperti diungkapkan Jones, tetap netral. Ia menyejajarkannya dengan sikap Indonesia terhadap persoalan Kashmir, persengketaan antara India dan Pakistan<sup>206</sup>. Hubungan dengan AS menjadi sangat "dingin",

---

<sup>203</sup> Leifer, *op.cit.*, hlm. 52

<sup>204</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>205</sup> Jones, *op.cit.*, hlm. 179

<sup>206</sup> *Ibid.*

ketika terdapat bukti-bukti keterlibatan Amerika dengan para perwira pemberontak dalam PRRI/Permesta<sup>207</sup>. Sementara itu di tahun 1956 Soekarno berkunjung ke Moskow untuk melakukan pendekatan baru. Kunjungan itu di mata AS merupakan pergeseran arah politik RI. Perubahan-perubahan itu baru nampak dengan jelas di tahun 60-an ketika misi Nasution untuk membeli senjata ke AS gagal; dan sebulan kemudian PM Khrushchev mengadakan lawatan ke Indonesia. Pada akhir kunjungan itu diumumkan bahwa pemerintah Uni Soviet bersedia memberikan bantuan ekonomi sejumlah 250 juta dolar AS sebagai langkah pertama dalam mengimbangi bantuan ekonomi Barat<sup>208</sup>.

Sebagai rangkuman bab ini dapat dikatakan bahwa Indonesia sesudah pengakuan kedaulatan masih menghadapi masalah Irian Barat. Perjuangan di forum PBB tidak menampakkan hasil yang berarti karena sikap "netral" AS yang menguntungkan *status quo* Belanda. Untuk itulah diadakan pendekatan terhadap Uni Soviet sebagai pengimbang peranan AS. Dukungan terhadap perjuangan ini diperoleh dari dua puluh sembilan negara berkembang, yang berhimpun dalam Konferensi Asia-Afrika.

---

<sup>207</sup> Bdk. Lev, op.cit., hlm. 35 dan Nasution, op.cit., hlm. 259, juga dalam Jones, op.cit., hlm. 129 - 131

<sup>208</sup> Sabir, op.cit., hlm. 122 - 123

C. Nasionalisasi Sebagai Perjuangan Merebut Irian Barat

1. Sebab-Sebab Nasionalisasi

Dalam bagian sebelumnya telah dipaparkan tentang keadaan politik dalam negeri RI pada periode 1950 - 1958 dan politik luar negeri. Ada satu masalah yang menyebabkan kedua bidang itu saling mempengaruhi secara timbal balik yaitu masalah Irian Barat. Politik kabinet dalam penyelesaian masalah itu menjadi bahan perdebatan panjang antara partai pemerintah dan partai oposisi. Ali Sastroamidjojo menjelaskan :

"..persetujuan - persetujuan yang dicapai di konperensi itu tidak lama kemudian menjadi sebab dari pada pertentangan -pertentangan politik antara kita sama kita"<sup>209</sup>

Pertentangan-pertentangan politik yang mewarnai pergolakan kabinet itu menunjukkan betapa rapuhnya koalisi antar partai dalam kabinet. Selain masalah ideologi yang belum tuntas yang dicerminkan dalam sidang - sidang Konstituante, seperti telah diuraikan dalam bab terdahulu, juga masalah "budaya politik" yang belum memadai bagi demokrasi. Geertz menunjuk kecenderungan sebagian besar rakyat Indonesia akan "panutan " (*patron-client*) atau

---

<sup>209</sup> Ali Sastroamidjojo, *op.cit.*, hlm. 301

sering disebutnya sebagai "loyalitas primordial"<sup>210</sup> yang menghalangi penerapan demokrasi ala Barat. Akibatnya, kabinet yang dibentuk berumur pendek, rata-rata tidak sampai dua tahun.

Keadaan seperti itu membuat Soekarno tidak sabar dan menilai bahwa sistem politik, khususnya sistem kepartaian yang dicapnya "liberal", adalah salah. Ia mengatakan pada H. U. T Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1956:

"Ya, terus terang saja, saudara-saudara: penyakit kepartaian! Di dalam bulan November tahun 1945 - terang-terangan saja - kita membuat satu kesalahan yang amat besar<sup>211</sup> yaitu kita menganjurkan dibangun partai-partai. Itu salah satu kesalahan: Nopember 1945! Sekarang boleh lihat keadaan, saudara-saudara! Kecuali kita terkena penyakit kepartaian yang - aduh, aduh saudara-saudara, kita menjadi berhadap-hadapan satu sama lain!..Marilah kita sekarang ini bersama-sama kita menguburkan semua partai"<sup>212</sup>.

Di kemudian hari dalam suatu wawancara tertulis pada tanggal 17 Januari 1957, Soekarno menjelaskan istilah "penguburan partai" itu sebagai peringatan kepada pemimpin-pemimpin partai "untuk melayani kepentingan rakyat banyak, dan bukan hanya memperagakan kebebasan politik dari pemimpin-pemimpin partai"<sup>213</sup>.Kecamannya kemudian beralih pada sistem kepartaian.

<sup>210</sup> Bdk. dalam kumpulan karangannya, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973)

<sup>211</sup> Kritik ini jelas ditujukan kepada Hatta yang sebagai Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Tanggal 3 November berdirinya partai-partai politik.

<sup>212</sup> Pipitseputra, Beberapa Aspek Dari Sejarah Indonesia (Ende: Arnoldus, 1973), hlm. 376

<sup>213</sup> Ganis Harsono, Cakrawala Politik Era Sukarno (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm. 86 - 87



Dengan berani Soekarno terus mengancam sistem demokrasi parlementer. Pada tanggal 28 Mei 1958 hal itu diulangi lagi dalam suatu pidatonya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Kecaman Soekarno yang semakin vokal itu berakibat melemahkan kedudukan partai-partai dan memunculkan dirinya melampaui batas-batas konstitusional UUD 1950. Soekarno dengan Konsepsinya menjadi tandingan program-program partai politik. Dengan itu pula pemikiran pemikiran pragmatis Soekarno dalam perjuangan Irian Barat dan Indonesianisasi perekonomian semakin mendapatkan angin.

Perekonomian Indonesia yang runyam pada pertengahan tahun 1950 -an memacu pemikiran pragmatis Soekarno dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Pendekatan itu jelas menciptakan antagonisme antara Soekarno dan partai politik, lebih-lebih Masyumi, PSI, dan partai-partai Kristen. Kedua partai yang pertama itu- dengan tokoh tokohnya seperti Natsir, Burhanuddin, Sumitro Djojohadikusumo<sup>214</sup>- sejak mula selalu menentang gagasan Soekarno baik dalam masalah Irian Barat maupun dalam masalah pembangunan ekonomi.

PKI berhasil menyesuaikan diri dengan politik

---

<sup>214</sup> Sumitro Djojohadikusumo melarikan dirikarena akan ditangkap AD, sedangkan Dahlan Djambek berangkat pula ke Padang setelah rumahnya dilempari granat

Soekarno. Hal itu juga dilakukan oleh PNI. Pendekatan itu semakin nampak ketika Soekarno mempromosikan "gerakan hidup baru" di bulan Agustus 1957. Dewan Pimpinan Pusat PKI menginstruksikan seluruh kader partai untuk mendukung gerakan itu<sup>215</sup>. Aidit juga memaklumkan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. PKI menyerukan bahwa Soekarno- lah pencipta Pancasila dan memperjuangkan pengakuannya di Dewan Konstituante<sup>216</sup>. Bahkan menyatakan bahwa dasar negara itu tidak dapat dirubah, kecuali sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. "Langkah langkah itu merupakan isyarat persahabatan yang semakin erat dengan Presiden"<sup>217</sup>.

Di samping dukungannya secara pribadi kepada Soekarno, PKI juga berdiri di belakang pemerintah dalam menghadapi "musuh-musuh" negara seperti Dewan-Dewan Militer yang merebut kekuasaan dari pemerintah sipil ( misalnya, Ahmad Husein dengan Dewan Banteng) di Sumatera yang dicap sebagai "Fascis"<sup>218</sup> Masyumi dan PSI (pemimpin pemimpinnya menyeberang ke Sumatera dan bergabung dengan para perwira pemberontak). Dewan Banteng dan PSI

---

<sup>215</sup> Hindley, The Communist Party... hlm. 265

<sup>216</sup> Ibid.

<sup>217</sup> Ibid.

<sup>218</sup> Arnold Brackman, Indonesian Communism, A History (New York: Frederick A Praeger, 1963), hlm. 231

disebutnya sebagai "pemerintahan *warlord*" yang melindungi modal-modal Belanda dan berusaha menjatuhkan Soekarno dan Kabinet<sup>219</sup>.

Dukungan PKI itu sangat berarti karena dari hasil pemilihan di daerah pemilihan Jawa (yang berlangsung dalam bulan Juni-Agustus 1957) ternyata partai itu telah menjadi partai besar di Jawa, dengan dukungan 27, 4 pCt. dari seluruh suara. Oleh karena itu Soekarno dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1957 mengajak untuk menghimpun modal bagi pembangunan di samping melakukan pembatalan KMB<sup>220</sup>. Usaha-usaha lain itu adalah mempertinggi nilai ekspor dan memakai hasil-hasil produksi dalam negeri yang akan membatasi import barang-barang konsumsi<sup>221</sup>.

Ajakan Presiden itu sesuai dengan program Kabinet Karya untuk mengadakan langkah menstabilkan keadaan perekonomian. Peraturan ekspor dan impor diberlakukan dengan disertai langkah mendevaluasikan nilai rupiah agar mendorong ekspor hasil produksi bahan-bahan makanan

---

<sup>219</sup> Ibid.

<sup>220</sup> Kabinet Ali II membatalkan seluruh Perjanjian KMB sejak 3 Mei 1956. Dengan demikian berbagai utang RI sebagai akibat perjanjian itu dibatalkan (Moedjanto, op.cit., hlm. 96).

<sup>221</sup> Dari Proklamsi sampai Resopim . . . ., hlm. 327

(beras, jagung, ketela, kentang dan kacang)<sup>222</sup> dan memperketat impor barang-barang dari luar negeri. Hal itu dilakukan untuk mencapai tingkat harga barang dalam pasaran dalam negeri<sup>223</sup>. Tetapi hasilnya sangat berlawanan dengan yang diharapkan pemerintah, karena struktur perekonomian *subsisten* (menggantungkan diri pada kekuatan ekspor) sangat tidak menguntungkan RI. Karena nilai rupiah didevaluasi maka harga-harga di pasaran menjadi tidak terkontrol di bulan Oktober 1957 bahkan harga barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula mulai melonjak<sup>224</sup>. Penyebab kegagalan itu adalah kurangnya persediaan devisa yang hebat akibat ekonomi barter yang dilakukan oleh para perwira daerah yang tidak diuntungkan dalam hubungan keuangan dengan pemerintah pusat<sup>225</sup>.

Ancaman kekacauan perekonomian, menurut Wertheim, merupakan faktor penting yang membuat pemerintah Indonesia meluaskan semangat anti-Belanda di akhir tahun 1957. Tindakan itu juga dapat dipandang sebagai usaha yang "nekad" Presiden Soekarno guna menggalang kembali semangat kesatuan rakyat Indonesia melawan bahaya perpecahan dengan

<sup>222</sup>Roger A Freeman, Socialism and Private Enterprise in Equatorial Asia(Stanford, California:Stanford University, 1968), hlm. 67

<sup>223</sup>Wertheim, op.cit, hlm. 356

<sup>224</sup>Ibid.

<sup>225</sup>Ibid.

memunculkan aksi politik berskala nasional<sup>226</sup>.

Kemacetan pembicaraan masalah Irian Barat di bulan November di forum PBB ditopang dengan keadaan ekonomi yang memburuk, merupakan penyebab utama tindakan nasionalisasi. Pada minggu kedua bulan November tahun itu Soekarno memperingatkan bila PBB tidak dapat memenuhi tuntutan Indonesia maka Indonesia akan mengambil langkah yang mengejutkan Dunia<sup>227</sup>.

Dalam Dewan Nasional dibahas soal itu dan tindakan yang dapat diambil guna mendukung tuntutan itu. BKS (Badan Kerjasama) Pemuda-Militer mempersiapkan aksi-aksi tertentu, antara lain membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat yang akan diketuai oleh KSAD Nasution. Sedangkan Ketua BKS, Kolonel Magenda, juga mempersiapkan pelatihan putra-putra asal Irian Barat serta satu bagian pasukan RPKAD untuk infiltrasi<sup>228</sup>. Di forum PBB setelah rencana resolusi yang mendesak Belanda supaya mau merundingkan persoalan itu ditolak oleh Majelis Umum PBB, pemerintah RI lewat Menteri Luar Negeri Subandrio mengumumkan akan menempuh "jalan lain" untuk membebaskannya.

---

<sup>226</sup> Ibid., hlm. 357

<sup>227</sup> Hindley, The Communist Party. .hlm. 266

<sup>228</sup> Nasution, op.cit., hlm. 166

Semangat anti-Belanda mencapai puncaknya ketika Soekarno dan para pemimpin partai politik mengadakan Rapat Pembebasan Irian Barat di Jakarta, pada 18 November 1957. Dalam rapat itu Soekarno menyatakan bahwa bila PBB tidak dapat menghasilkan resolusi yang mendesak Belanda untuk berunding dalam persoalan Irian Barat, maka pemerintah Indonesia akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan penting milik Belanda. Dan seluruh rakyat Indonesia diajak untuk turut serta dalam usaha mengambilalih pengelolaan perusahaan perusahaan itu<sup>229</sup>. Rencana mengadakan "pukulan" terhadap Belanda itu akan dilakukan pada tanggal 2 Desember 1957, setelah resolusi yang diharapkan RI itu ditolak Majelis Umum. Pemboikotan terhadap perusahaan Belanda itu dilakukan dengan mengadakan aksi mogok selama 24 jam pada tanggal 2 Desember. Keesokan harinya aksi pengambil alihan perusahaan Belanda berawal di Jakarta pada perusahaan<sup>230</sup> penerbangan Belanda (KLM), KPM, Perusahaan Geo Wehry, Jacobson van den Berg.

---

<sup>229</sup>Hindley, The Communist Party..hlm. 266

<sup>230</sup>Bernard Dahm, History of Indonesia in The Twentieth Century (London: Pall Mall Press, 1971), hlm. 184

Pengambilalihan perusahaan- perusahaan yang lain<sup>231</sup> dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. Tindakan itu didukung oleh Serikat Buruh PNI (KBKI) dan SOBSI yang langsung ikut ambil bagian dengan antusias<sup>232</sup>. Mochtar Lubis mencatat:

"Permulaan bulan ini (Desember - pen) sungguh sungguh ditandai dengan kejadian-kejadian hebat di negeri kita, terutama di Jakarta. Selain penggranatan terhadap Presiden Soekarno juga tindakan-tindakan untuk menguasai kepentingan Belanda mulai ditingkatkan. Di kantor KPM di Merdeka Timur Jakarta telah diambil alih oleh buruhnya. *Tindakan buruh ini sebenarnya di luar hukum dan telah dibiarkan begitu saja ( Rursif dari penulis)*<sup>233</sup>.

Tindakan -tindakan terhadap perusahaan dan orang-orang Belanda masih terus diperhebat Kementerian Luar Negeri Belanda telah menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia untuk menghentikan usaha mereka. KPM mengabarkan telah menahan enam buah kapalnya di Singapura dan tidak mengizinkan untuk meneruskan perjalanan ke Indonesia. Semua kantor Belanda telah ditutup juga Hotel *Des Indes* (Sekarang kompleks pertokoan Duta Merlin), telah diambil alih. Menteri Kehakiman RI

<sup>231</sup>A.1: Pabrik Semen Indarung, Pabrik Senjata dan Mesiu di Bandung, Pabrik Kina Bandung, Pabrik- Pabrik Kertas di Leces dan Padalarang, Pabrik Zat Asam *Hoek 's* di Jakarta dan Pabrik Asam Arang di Surabaya (sekarang menjadi P.T. Aneka Industri), Pabrik Mesin Braadt (Barata) dan Vulkan (Bisma) di Surabaya.

<sup>232</sup> Ibid., hlm. 267

<sup>233</sup> Mochtar Lubis, Catatan Subversif (Jakarta: Obor-Gramedia, 1987), hlm. 86

ditutup juga Hotel *Des Indes* (Sekarang kompleks pertokoan Duta Merlin), telah diambil alih. Menteri Kehakiman RI Maengkom telah memerintahkan agar orang-orang Belanda (sebanyak 50.000 orang <sup>234</sup>) untuk berangkat pulang ke negerinya mulai tanggal 5 Desember 1957<sup>235</sup>.

## 2. Soekarno Sebagai Penggerak Nasionalisasi

Masalah yang muncul adalah siapakah sebenarnya yang berinisiatif menggerakkan massa buruh sehingga pengambilalihan perusahaan itu terjadi? Kemungkinan bahwa TNI AD yang bertanggungjawab tidak berdasar kuat, karena dalam tubuh AD baru menghadapi perpecahan karena pergolakan daerah. Kerusuhan akibat "Peristiwa Cikini"<sup>236</sup> yang dituduhkan melibatkan Kolonel Zulkifli Lubis masih santer pada bulan itu<sup>237</sup>. Maka sangat janggal bila AD merancang aksi seperti itu yang menuntut tindak lanjut yang berakibat jauh ke depan. Sementara ancaman gerakan daerah dari para perwira AD di luar Jawa masih menuntut

<sup>234</sup> Jendral Nasution menyebut 56.000 orang ( Nasution, op.cit., hlm. 166)

<sup>235</sup> "Sari Warta Ekonomi", Basis, VI (Oktober 1956 - September 1957), hlm. 133 selanjutnya disingkat Basis VI

<sup>236</sup> Yang disebut "Peristiwa Cikini" adalah penggranatan terhadap Soekarno yang hadir pada suatu Bazaar di S.D. Cikini (tempat putranya Guntur bersekolah) (Lev, op.cit., hlm. 33)

<sup>237</sup> Zulkifli Lubis, Memoar..



perhatian dan kewaspadaan yang besar.

Apakah hanya PKI ,penggerak utama kerusuhan yang ditimbulkan oleh para buruh perusahaan itu? Pertanyaan itu muncul karena langkah semacam itu dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh PKI atau setidaknya kecurigaan besar ditimpakan kepada partai itu, seperti dikatakan oleh A.H. Nasution:

"Saya tak bisa lepas dari kesan, bahwa PKI sedang mengail dalam air keruh dengan menggunakan agitasi Presiden terhadap Belanda tentang modalnya di Indonesia dalam soal pembebasan Irian Barat. Masalah itu pula digunakannya menambah perpecahan pusat dengan berbagai daerah di Sumatera dan sulawesi sehingga PKI semakin muncul sebagai pihak ketiga di gelanggang pergolakan politik itu"<sup>238</sup>

Soalnya, menurut Hindley, amat diragukan kalau hanya PKI saja yang berinisiatif memulai aksi pengambilalihan itu.

Memang, PKI akan banyak mendapat keuntungan dengan aksi itu dan organisasi buruhnya sudah memboikot perusahaan itu ketika pemerintah RI merencanakan akan menempuh "jalan lain" untuk membebaskan Irian Barat. Tetapi itu belum membuktikan bahwa PKI lah satu-satunya yang menggerakkan massa buruh. Serikat buruh dalam perusahaan yang diambil alih itu terdiri dari banyak kelompok yang menjadi *onderbouw* partai atau golongan politik. Buruh-buruh perusahaan-perusahaan Belanda yang melakukan aksi mengaku

---

<sup>238</sup>Nasution, op.cit., hlm. 162

bahwa mereka mendapat instruksi dari serikat buruhnya masing-masing dan dari Badan Kerjasama Buruh-Pemuda - Militer serta dari organisasi-organisasi pemuda<sup>239</sup>. Tetapi ada beberapa pegawai perusahaan-perusahaan Belanda yang mengambil tindakan atas namanya sendiri, untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan itu. Tajuk *Harian Rakyat* pada 21 Oktober menyetujui bahwa langkah-langkah konkret harus dijalankan untuk menghadapi modal Belanda karena Indonesia tidak berhak untuk menyita seluruh modal Belanda<sup>240</sup>. Memang pada tanggal 4 November tahun itu Komite Pusat mengeluarkan pernyataan untuk mengambil tindakan secukupnya terhadap sikap keras kepala dan tamak Belanda, tetapi komite itu tidak menyebutkan langkah-langkah konkret dan tindakan-tindakan lebih lanjut<sup>241</sup>. Oleh karena itu Soekarno lah yang menjadi penggerak utama<sup>242</sup> dalam kampanye dan tindakan pengambilalihan perusahaan Belanda itu seperti dikatakannya sendiri dalam wawancara dengan Louis Fischer<sup>243</sup>. Soekarno dengan tegas menolak bahwa dia

---

<sup>239</sup> Basis VII, hlm. 133, juga Louis Fischer, The Story of Indonesia, (New York: Harper & Brothers Publishers, 1959), hlm. 300

<sup>240</sup> Hindley, The communist Party... hlm. 267

<sup>241</sup> Hindley, loc.cit.

<sup>242</sup> Pluvier, op.cit., hlm. 188; Lev, op.cit., hlm. 34

<sup>243</sup> Fischer, loc.cit.

menonjolkan diri agar tidak menanggung konsekwensi dan akibat-akibat lebih lanjut<sup>245</sup>. Sutter mencatat bahwa kelompok buruh yang beraliran Marxist (SOBSI) dan golongan Nasionalis Ultra Kanan (a.l. Organisasi buruh dari PNI) yang melaksanakan tindakan politik itu, sehingga pengambil-alihan dapat berlangsung<sup>246</sup>. Soekarno juga mengizinkan bekas tentara pelajar mengambil alih kantor pusat perusahaan pelayaran Belanda (KPM) di Jalan Merdeka Timur<sup>247</sup>. Inisiatif Soekarno itu, menurut Ganis Harsono, Jurubicara Departemen Luar Negri pada masa itu, menyebabkan Aidit dan Nyoto terpancing, "karena tidak mau ketinggalan mereka memerintahkan kepada serikat buruhnya untuk mengambilah perusahaan Belanda lainnya juga<sup>248</sup>.

Argumentasi itu didukung oleh kenyataan bahwa: pertama, PKI tidak akan berbuat gegabah, meskipun dalam pemilu termasuk empat besar tetapi, banyak perwira militer yang bersikap anti-komunis (seperti Nasution, Husein,

---

<sup>245</sup> Ibid.

<sup>246</sup> John D. Sutter, Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy, (Ithaca, New York: Cornell Univeraity Press, 1959), Jilid I, "Introduction"

<sup>247</sup> Sebelum ikut mengambilah mereka mengadakan rapat di gedung pertemuan mereka di Jl. Mangunsarkoro, Jakarta, Bdk. Ganis Harsono, op.cit., hlm. 99

<sup>248</sup> Ibid.

pemilu termasuk empat besar tetapi, banyak perwira militer yang bersikap anti-komunis (seperti Nasution, Husein, Simbolon, Lubis<sup>249</sup>), di samping kecurigaan-kecurigaan terhadapnya yang datang dari parpol; *kedua*, Soekarno sendiri dalam suatu wawancaranya mengatakan hal itu yang digaris-bawahi oleh Ganis Harsono itu telah memberikan perintah untuk mengambil alih perusahaan itu di akhir tahun 1957. Bahkan Soekarno sudah mendesak pemerintah Natsir untuk menyita seluruh harta milik Belanda<sup>250</sup> tatkala misi Roem dalam Konferensi Den Haag di awal tahun 1950-an mengalami kegagalan<sup>251</sup>. Natsir menolak desakan Soekarno itu yang menyebabkan Kabinet yang dipimpinnya jatuh<sup>252</sup>; *ketiga*, PKI dalam kongresnya yang ke-5 pada bulan Maret 1954 untuk mencari jalan damai dan "parlementer" harus mengadakan persekutuan dengan salah satu partai terbesar. Dengan taktik itu PKI dapat meperoleh dukungan dari

---

<sup>249</sup>Hindley, "Alirans.. hlm. 30

<sup>250</sup>Natsir menolak desakan Soekarno karena buruh-buruh di perusahaan-perusahaan itu sebagian buta huruf, dan tidak menyadari tindakan politik seperti itu sehingga mudah digerakkan oleh kekuatan lain. Usulan itu juga didukung oleh militer( Brackman, Indonesian Communism...hlm. 151)

<sup>251</sup>Soekarno mengatakan: "Pada tahun 1950, saya sudah mendesak agar harta benda Belanda (berupa perusahaan dan perkebunan - pen) disita tetapi Perdana Menteri Natsir dan Kabinetnya menolak" (Louis Fischer, op.cit., hlm. 300)

<sup>252</sup>Brackman, op.cit., hlm. 231

"bawah" secara besar-besaran. Dengan kata lain PKI tidak hanya mencoba membentuk "barisan dari bawah" (buruh), tetapi juga membentuk "barisan atas". Artinya bekerjasama dengan golongan yang disebutnya sebagai "borjuis nasional": PNI, NU dan lebih-lebih Soekarno<sup>253</sup>. Dalam kerangka itu PKI tidak akan berbuat sendirian. Dan lebih menguntungkan baginya untuk bernaung di bawah Soekarno yang menjadi sangat populer semenjak jatuhnya Kabinet Ali II dan untuk menghindarkan diri dari ancaman TNI-AD.

Kiranya patut dikemukakan pendapat Kahin, dalam masalah ini. Menurut Kahin, masalah Irian Barat menjadi suatu prestise bagi Soekarno pribadi. Soekarno sebagai pemimpin "nasionalis - revolusioner" akan menggunakan segala cara untuk menyelesaikannya, termasuk "senjata ekonomi"<sup>254</sup>. Dengan ungkapan agak berbeda Hatta menggarisbawahi bahwa masalah itu merupakan masalah "kehormatan" bangsa, bukan masalah juridis semata<sup>255</sup>. Dan Soekarno memecahkannya dengan cara-cara yang revolusioner, dengan merebut kekuatan ekonomi Belanda.

<sup>253</sup>"Jalan PKI ke Kehancuran", Tempo, No. 31, Thn. XVIII, Oktober 1988 (Laporan Utama)

<sup>254</sup>D.G.E. Hall, History of South East Asia (London: Macmillan & Co. Ltd., 1964), hlm. 844

<sup>255</sup>Robert C. Bone, JR., The Dynamics of The Western New Guinea (Irian Barat) Problem (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, 1962), hlm. 152

### 3. Langkah-Langkah Pemerintah RI

Tindakan-tindakan buruh yang dilakukan di luar pengetahuan Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat dapat menjalar ke perusahaan-perusahaan lain. Akibatnya, dapat mengganggu kelancaran produksi dan distribusi. Pemerintah juga menyadari bila pengambilalihan itu dibiarkan tidak terartur dan terorganisir akan menimbulkan kekuacauan yang besar. Dan yang lebih penting lagi akan merusak citra Indonesia di mata internasional sebagai negara hukum.

#### 3..1. Di Bawah Pengawasan Militer

Gerakan buruh itu, menurut A. H. Nasution, adalah wajar, jika mengikuti pematangan situasi sejak Delegasi RI berangkat mengikuti sidang PBB, lebih-lebih oleh pidato-pidato Presiden Soekarno<sup>256</sup>. Sebenarnya P. M. Djuanda tidak dapat membenarkan cara-cara tsb. Sebagai teknokrat, dia sadar betapa cara-cara itu akan mengacaukan ekonomi yang sudah parah, apalagi setelah daerah-daerah luar Jawa bertindak sendiri dengan melakukan barter barang-barang komoditasi ekspor<sup>257</sup>. Oleh karena itu Menteri Kehakiman memerintahkan bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak dapat

---

<sup>256</sup> A. H. Nasution, op.cit., hlm. 167

<sup>257</sup> Ibid.

diambil alih oleh buruhnya lagi. Pemerintah sendirilah yang berhak mengambil alih perusahaan perusahaan itu. Persoalan pengambilalihan perusahaan itu diserahkan kepada militer<sup>258</sup>, khususnya kepada KSAD selaku Penguasa Perang Darurat<sup>259</sup>. KSAD sebelumnya telah mengambilalih tambang minyak Sumatera Utara dengan alasan keamanan. Demikian pula dengan pengambilalihan perusahaan Belanda pada 1957, militer menurut Nasution tidak mengambil alih tetapi berdasarkan kondisi keamanan maka KSAD untuk sementara menguasai semua perusahaan perusahaan Belanda, seperti perkapalan (KPM), perkebunan dan "lima besar" yang menguasai perdagangan dsb.<sup>260</sup> Demikianlah maka pada tanggal 13 Desember 1957 KSAD mengeluarkan keputusan selaku Penguasa Perang (S.O.B.) bahwa semua perusahaan Belanda diletakkan di bawah pengawasan dan penguasaan KSAD. Team-team perwira disiapkan untuk berbagai perusahaan dan

---

<sup>258</sup> Pluvier, *op.cit.*, hlm. 189

<sup>259</sup> *Ibid.*, hlm. 168; penyerahan itu juga disetujui oleh Presiden Soekarno. Menurut Ganis Harsono, pada saat itu sebetulnya Soekarno dapat saja melimpahkan pengelolaan usaha-usaha itu kepada pejabat-pejabat sipil atau kepada partai politik tertentu yang disukainya. Ternyata hal itu tidak ia lakukan, ia lebih memilih angkatan bersenjata untuk menjalankan perusahaan-perusahaan itu. Suatu tindakan yang dapat dimengerti dalam kerangka politik "keimbangan" antara TNI-AD dan partai politik (lebih-lebih PKI), Ganis Harsono, *loc.cit.*

<sup>260</sup> *Ibid.*

banyak digunakan alumni dan siswa siswa Akademi Hukum Militer (AHM)<sup>261</sup>. Para panglima militer dipanggil ke Jakarta untuk mendapatkan instruksi tentang keputusan itu dan tindakan militer yang cepat itu berhasil mencegah aksi-aksi sepihak.

Djuanda menyetujui tindakan-tindakan KSAD. Nasution merencanakan untuk menyerahterimakan semua perusahaan kepada Kabinet, dalam tempo beberapa bulan setelah keamanan terjamin keamanan dan ketertiban. Menteri-menteri yang bersangkutan diharapkan bersiap-siap untuk menerima penyerahan itu<sup>262</sup>. Dan pemerintah nantinya akan menyerahkannya pada suatu badan pengurus. Mereka yang bertindak menurut kehendaknya sendiri akan berurusan dengan pihak berwajib<sup>263</sup>.

Secara bertahap perusahaan Belanda yang dinasionalisasi itu ditempatkan di bawah pengawasan militer. Dengan langkah itu, pengaruh Nasution semakin dapat mengendalikan mayoritas perwira. Pertama-tama, menurut Sundhaussen dapat dijelaskan oleh kemampuannya untuk memperhatikan

---

<sup>261</sup> Sayang sekali tidak dapat diperoleh dari Mantan KSAD A.H. Nasution rincian perwira yang mendapat tugas-tugas itu.

<sup>262</sup> Ibid.

<sup>263</sup> "Sari Warta Ekonomi" Basis VII (Oktober 1957 - September 1958), hlm. 134



kepentingan-kepentingan materiil AD<sup>264</sup>, untuk memberikan pengarahannya ideologis bagi rekan-rekannya sesama perwira. Di samping itu penguasaan perusahaan Belanda telah membuka sejumlah kedudukan bagi para perwira tinggi dan menengah, yang tanpa itu tidak mendapat tugas yang berarti. Kedudukan kedudukan itu pada umumnya lebih "basah" daripada jabatan-jabatan dalam AD. Akibatnya, para perwira yang mendapat kedudukan itu menyadari bahwa dalam hal itu mereka berhutang budi pada Nasution. Dan mereka hanya akan dapat mempertahankan status mereka selama AD tetap kuat dalam menghadapi kekuatan para pemberontak. Untuk itu maka pertengkaran dalam AD dan usaha-usaha untuk memperlemah pimpinan tentara harus dihentikan<sup>265</sup>.

Tetapi Nasution mengakui bahwa pergantian secara mendadak dari karyawan karyawan Belanda "tidaklah membantu"<sup>266</sup> dan menimbulkan berbagai kemacetan dan gangguan

---

<sup>264</sup>Keadaan perekonomian yang memburuk di pertengahan tahun 1950-an, menjadikan panglima-panglima divisi menjalankan suatu "bisnis" guna meningkatkan kesejahteraan para prajurit dan masyarakat yang ada dalam wilayahnya. Seperti diceritakan oleh Panglima Divisi Diponegoro, Kol. Soeharto (Kini Presiden RI), yang mendirikan Kooperasi AD dan Yayasan *Terrampat* yang berusaha a.l: mengumpulkan dana guna dibelikan alat bagi keperluan para petani (Bdk. O. G. Roeder, Anak Desa, Biografi Presiden Soeharto (Jakarta: Gunung Agung, 1976), hlm. 217 - 218

<sup>265</sup>Sundhausen, op.cit., hlm. 215 - 216

<sup>266</sup>Nasution, op.cit., hlm. 168

atas arus barang dan dana<sup>267</sup>. Di samping itu Kabinet Djuanda juga semakin memberi peluang bagi militer untuk lebih berperan dalam politik menghadapi Belanda dalam masalah Irian Barat.

Pada tanggal 21 Desember 1957 P.M. Djuanda mengumumkan bahwa Dewan Keamanan Nasional yang dipimpinnya sendiri, akan langsung menangani kampanye pembebasan Irian Barat. . Sedikit demi sedikit tindakan itu disalurkan lewat Front Nasional Pembebasan Irian Barat yang berkembang di bawah pimpinan Nasution sebagai organisasi massa<sup>268</sup>.

### 3.2. Terbentuknya Badan Nasionalisasi (BANAS)

Para Menteri dalam Kabinet Djuanda sebetulnya tidak menyetujui istilah "nasionalisasi" seperti diungkapkan oleh Menteri Pertanian, Mr. Sadjarwo dan Menteri Luar Negeri, Soebandrio. Kedua menteri itu mengatakan bahwa lebih baik menggunakan kata "mengambilalih" atau "menguasai" perusahaan-perusahaan Belanda itu daripada menasionalisasi. Karena dalam tindakan nasionalisasi secara implisit terkandung unsur penggantian kerugian

---

<sup>267</sup> Ibid.

<sup>268</sup> Wertheim, op.cit., hlm. 358

kepada pemilik perusahaan perusahaan itu<sup>269</sup>.

Pada tahun 1958 di antara pemuka masyarakat terjadi perdebatan dalam menentukan tindak lanjut pengambilalihan perusahaan Belanda. Apakah RI mengambil alih / menyita atau menasionalisasi karena konsekwensi-konsekwensi hukumnya berbeda. Dari pembicaraan RUU Nasionalisasi dalam Parlemen nyatalah perbedaan pandangan itu. Beberapa ucapan anggota DPR dapat dijadikan contoh:

Pendapat H. A. Chamid Widjaja pada Sidang 17 November 1958 yang mengatakan:

"Di dalam masyarakat ramai, Saudara Ketua, selain pertanyaan-pertanyaan seperti saya nyatakan tadi, ada pula saran-saran diajukan agar perusahaan perusahaan itu *disita* saja, dalam artian *diambilalih tanpa diberikan ganti kerugian*"<sup>270</sup>;

Pendapat Nungtjik A. R:

"Yang sebaik-baiknya bukan tindakan nasionalisasi yang harus dilakukan tetapi *mensita* tanpa bayaran apapun juga"<sup>271</sup>.

Tetapi R. G. Doeriat menyetujui tindakan nasionalisasi, dengan adanya RUU Nasionalisasi itu "akan lenyaplah tuduhan dari dunia luar bahwa RI adalah suatu negara yang pandai *mensita-sita* atau *mencuri* milik negara lain"<sup>272</sup>.

Tetapi pemerintah Djuanda tetap berpegang pada

<sup>269</sup> Keng Po, tanggal 10 dan 12 Desember 1957, seperti dikutip Giok Siong, *op.cit.*, hlm. 6

<sup>270</sup> Risalah Sementara (R.S) 17 -11- 1958, Giok Siong, *op. cit.*, hlm. 7

<sup>271</sup> *Ibid.*

<sup>272</sup> *Ibid.*

tindakan menurut hukum. Hal itu jelas dalam keterangan Menteri Stabilisasi Ekonomi, Kolonel Suprajogi, kepada DPR pada tanggal 7 November 1958, ketika RUU Nasionalisasi dibahas:

"Pemerintah memilih tindakan nasionalisasi karena tindakan itu diakui oleh hukum internasional. Syarat yang terpenting adalah ganti kerugian dan ini akan dilakukan oleh Pemerintah. Maka jelaslah bahwa tuduhan seolah-olah Pemerintah telah *mensita* -bahkan dikatakan mencuri adalah tidak benar"<sup>273</sup>.

Ganti kerugian itu, menurut Suprajogi, dijamin dalam Pasal 2 RUU Nasionalisasi:

"Pasal 2 mengatur soal ganti kerugian yang tidak dapat dilepaskan dari tindakan nasionalisasi dalam bidang hukum internasional dan sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara kita"<sup>274</sup>.

Tentang alasan pemerintah RI mengambil jalur hukum atau memilih tindakan nasionalisasi, Suprajogi lebih lanjut menjelaskan:

"..dalam keadaan sekarang ini -dimana tidak terdapat suatu negara hukum melakukan tindakan pensitaan (*confiscatie*) semata-mata. Perlu Pemerintah menegaskan bahwa antara nasionalisasi dan pensitaan atau *confiscatie* memang ada unsur kesamaan yaitu dalam hal mencabut hak milik tetapi banyak lagi perbedaan antara kedua hal itu. *Confiscatie* biasanya dilakukan dalam permusuhan perang tanpa mempertimbangan unsur penggantian kerugian. Tidaklah demikian dengan nasionalisasi"<sup>275</sup>

---

<sup>273</sup> Ibid.

<sup>274</sup> Ibid.

<sup>275</sup> Ibid., hlm. 8

Dengan latar belakang itulah UU No. 86 tahun 1958 diundangkan dan mulai berlaku mulai tanggal 27 Desember 1958 serta berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957. UU itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 yang mengatur pokok-pokok pelaksanaan UU Nasionalisasi<sup>276</sup>. Dalam PP itu juga diatur penetapan ganti rugi, masalah perburuhan dalam perusahaan dinasionalisasi dan susunan kepengurusan Banas. Banaslah yang akan melanjutkan pengelolaan perusahaan itu. Dewan Menteri adalah yang memegang kekuasaan tertinggi mengangkat Pimpinan Harian yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Urusan Stabilisasi Ekonomi dan Wakil dari Kementerian Pertahanan (Susunan Kepengurusan Banas pada Lampiran 2).

Dengan terbentuknya Banas maka penguasaan TNI-AD atas perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi berakhir, meskipun dalam kerangka *dwifungsi*<sup>277</sup> banyak jabatan-jabatan di perusahaan itu yang masih dipegang militer<sup>278</sup>.

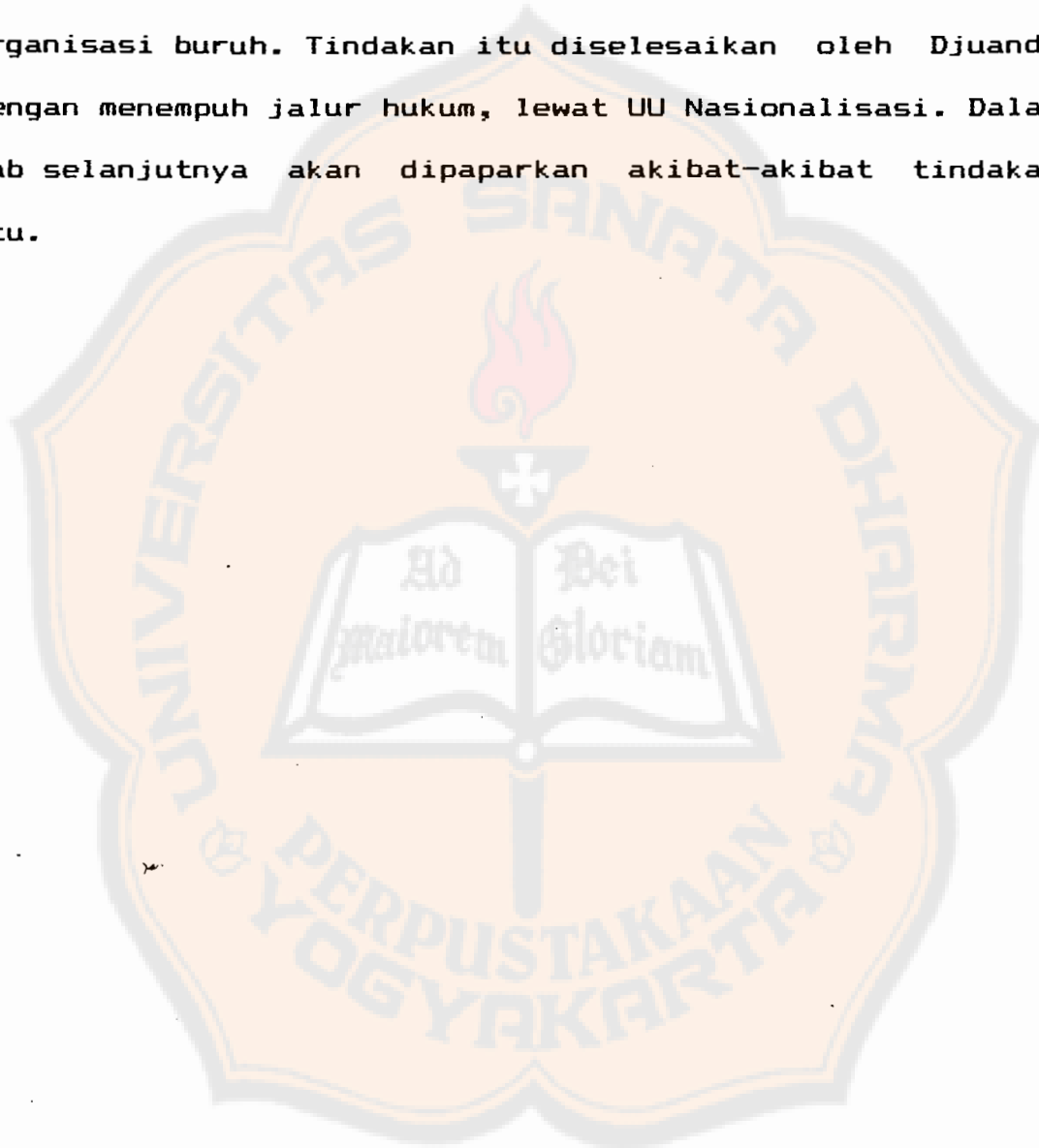
---

<sup>276</sup> Rumusan UU No. 86 Tahun 1958 terdapat dalam Lampiran 1

<sup>277</sup> Istilah *dwifungsi* merupakan perkembangan konsep yang oleh Prof. Jokosutono disebut *the army's middle way* (Jalan tengah TNI. Konsep itu kemudian terkenal sebagai "jalan tengah" yang diajukan Nasution dalam Dies KSAD pada tanggal 11 November 1958 di Akademi Militer Magelang (Dialog dengan A.H. Nasution, "Dwifungsi ABRI: pada mulanya dan kini", *Prisma*, Desember 1980

<sup>278</sup> Bdk. P.N. Perkebunan, Perkembangan 5 Tahun P.N. Perkebunan 1968 - 1972 (Departemen Pertanian, t.t.), lebih-lebih Bab II. Organisasi & Kegiatan P.N. Perkebunan, hlm. 13 dst.; Pluvier, op.cit., hlm. 189

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang diprakarsai oleh Soekarno didukung oleh organisasi-organisasi buruh. Tindakan itu diselesaikan oleh Djuanda dengan menempuh jalur hukum, lewat UU Nasionalisasi. Dalam Bab selanjutnya akan dipaparkan akibat-akibat tindakan itu.



BAB VI  
AKIBAT NASIONALISASI

Akibat nasionalisasi yang dijalankan di tahun 1957 tidak seperti yang diharapkan. Argumentasi pendukung kebijakan ini adalah bahwa struktur politik yang dibangun akan memberi kesempatan besar bagi perkembangan ekonomi. Dengan pengambilalihan perusahaan Belanda, akan memberi kemungkinan bagi terbentuknya struktur perekonomian nasional yang dapat diandalkan. Struktur perekonomian nasional tidak lagi dikuasai oleh kekuatan ekonomi asing (Belanda) (*konsiderans* UU No. 86 Thn. 1958

c). Soekarno lebih lanjut mengatakan:

Perjuangan pembebasan Irian Barat telah menaikkan martabat kita sebagai bangsa yang cinta kemerdekaan. Aksi-aksi kita yang memuncak pada pengambilalihan perusahaan Belanda dan pemulangan orang-orang Belanda yang tak diperlukan. Aksi-aksi kita itu seolah-olah petir dan halilintar telah menyadarkan sebagian dunia yang selama ini belum mau sadar, bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa katak atau bangsa "Hamlet" yang tak berkeputusan. Dalam aksi yang mau tak mau menggugah ketakjuban siapapun juga itu, tentara dan rakyat kita memainkan *rol* yang amat besar. Dan pemuda pun berjasa sesuai dengan harapan yang bangsa cantumkan kepadanya. Salut kehormatan kuberikan kepada tentara dan rakyat dan pemuda itu"<sup>279</sup>.

Tindakan nasionalisasi itu berakibat jauh dalam bidang ekonomi Indonesia. Pasti, menurut Wertheim, karena

---

<sup>279</sup> Dari Proklamasi... hlm. 367

tindakan itu tidak pernah direncanakan dan dipersiapkan kelanjutannya dengan seksama<sup>280</sup>. Akibat yang dikhawatirkan terjadi produksi dan ekspor perusahaan-perusahaan yang diambilalih telah mengalami penurunan yang berdampak pada penerimaan devisa negara. Devisa negara terus merosot karena perhatian pemerintah RI pada peningkatan produksi pertanian pangan dan komoditas ekspor sejak bulan Desember 1957. Akibatnya perhatian pada peningkatan industri seperti dicanangkan dalam Rencana Lima tahun (1956 - 1960) tidak dapat dijalankan<sup>281</sup>. Rupanya kemunduran-kemunduran itu terutama disebabkan oleh kurangnya pimpinan perusahaan yang cakap, meskipun Menteri Perdagangan sudah berusaha mencari tenaga tenaga ahli di bidang ekonomi. Di samping itu juga belum jelasnya prosedur-prosedur pengelolaan perusahaan yang baru itu<sup>282</sup>. Hal-hal itu mengakibatkan kurangnya koordinasi yang terlihat jelas dalam sektor industri.<sup>283</sup> Bahan-bahan industri diimpor tidak sesuai dengan kebutuhan, jatuhnya bahan-bahan industri ke tukang catut yang menyebabkan

---

<sup>280</sup> Wertheim, op.cit., hlm. 358

<sup>281</sup> Sie Kwat Soen, Prospects for Agricultural Development in Indonesia (Wegeningen: Center For Agricultural Publishing and Documentation, 1968), hlm. 66

<sup>282</sup> Alec Gordon, "Munduranya Produksi Gula", Prisma, No. 7, Juli 1982

<sup>283</sup> "Tajuk", Pedoman, 26 Juni 1959



berbagai kesulitan <sup>284</sup> Tetapi perkebunan segera dapat membenahi diri dan menstabilkan produksinya seperti terlihat dalam data data statistik tahun 1958 - 1960 <sup>285</sup>. Hanya saja proses jual beli menjadi lebih lama karena alat transportasi ,baik laut maupun udara, mengalami kemacetan. Kemacetan itu merupakan akibat langsung nasionalisasi KLM dan KPM. Mata rantai administrasi bertambah, seperti diperlukannya jasa Bank Indonesia dan Perusahaan Perkebunan Negara Baru <sup>286</sup>.

Beberapa akibat nasionalisasi ini akan dirinci sbb:

- A. Inflasi
- B. Hubungan antar pulau
- C. Ekonomi Barter
- D. Pendekatan terhadap Jepang
- E. Gerakan anti-Kabinet
- F. Pemberontakan Daerah
- G. Hubungan Dengan Belanda

A. Inflasi

Sumber inflasi yang penting adalah defisit anggaran Belanja pemerintah. Defisit selama 6 bulan pertama tahun 1957 berjumlah Rp. 3, 6 milyar. Dengan kata lain defisit total anggaran tahun 1958 ditaksir sebesar Rp. 4,7 milyar (suatu angka rekor pertama selama Indonesia merdeka). Setelah diadakan penghematan maka defisit itu mengendor

<sup>284</sup> Ibid.

<sup>285</sup> Bdk. BPS, (1960) op.cit., hlm. 120

<sup>286</sup> "Sari Warta Ekonomi", Basis, VII, hlm. 143

menjadi Rp. 2,4 milyar<sup>287</sup>.

Nilai rupiah sejak Desember 1957 mengalami penurunan seperti terlihat dalam catatan harga emas dan valuta asing di pasar gelap:

Emas: Rp. 70/gram; dolar AS Rp. 51,50 (kurs resmi Rp. 11,40; dolar Malaya = Rp. 15,- (resmi Rp. 3,72,-); Poundsterling Rp. 30,- (resmi 31, 92); dolar Australia Rp. 95,- (resmi Rp. 25, 49); Gulden Rp. 15 (resmi Rp. 3)<sup>288</sup>.

#### B. Hubungan Antar Pulau

Sebelum dinasionalisasi KPM hampir memiliki monopoli dalam hubungan antar pulau. Pimpinan KPM di Negeri Belanda khawatir akan tindakan penyitaan maka kapal kapalnya diperintahkan untuk berlabuh di luar Indonesia. Pemerintah RI dengan tegas menanggapi tindakan itu dengan melakukan penyitaan kapal-kapal KPM yang ada di wilayah Indonesia. Tetapi pada tanggal 26 Maret 1958 terpaksa harus dilepaskan karena protes keras dari berbagai perusahaan asuransi kepada pemerintah RI. Bila hal itu dilakukan maka perusahaan asuransi harus membayar ganti rugi untuk kapal yang disita. Akibatnya hubungan pulau dan perdagangan mengalami banyak hambatan<sup>289</sup>.

Usaha untuk mengatasi kemacetan itu adalah melakukan

<sup>287</sup> "Sari Warta Ekonomi", Basis, VII, hlm. 144

<sup>288</sup> "Sari Warta Ekonomi", Basis, VII, hlm. 178

<sup>289</sup> Wertheim, op.cit., hlm. 359, Wertheim tidak menyebutkan nama-nama perusahaan asuransi yang melakukan protes.

pencarteran kapal-kapal Jepang yang memiliki bobot 75 ribu ton. Usaha itu semula memberi harapan tetapi ternyata juga mengalami kegagalan karena Jepang menuntut sewa sebesar 70 poundsterling/ton sedangkan RI hanya bersedia membayar 35 poundsterling<sup>290</sup>.

Persoalan perkapalan belum reda ketika hubungan antar pulau lewat udara mengalami pukulan lagi. Frekwensi penerbangan Garuda Indonesia Airways (GIA) harus diturunkan sampai 40 - 50 pCt. Hal itu disebabkan kekurangan penerbang. Hal itu merupakan akibat diputuskannya kontrakkerja GIA - KLM. Dengan terpaksa pemerintah mengurangi jumlah angkutan barang ke luar Jawa.

#### C. Ekonomi Barter

Karena sulitnya pengangkutan laut maupun udara maka daerah-daerah luar Jawa melakukan barter barang barang yang sangat merugikan pemerintah pusat. Kegiatan barter meluas dari Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. Di samping itu kapal-kapal yang mengunjungi daerah-daerah barter bukan hanya kapal-kapal dari Singapura atau Filipina melainkan kapal-kapal dari Eropa dan AS<sup>291</sup>.

Ekonomi barter sangat merugikan penerimaan devisa

---

<sup>290</sup> Ibid.

<sup>291</sup> Ibid.

negara. Maka dari itu dapat dimengerti, PM yang merangkap menjadi Menteri Pertahanan a.i. Djuanda menyatakan bahwa barter tidak sah. Menteri Keuangan Mr. Sutikno Slamet mengancam akan mengundurkan diri bila ekonomi barter tidak segera dihentikan. Pemerintah telah menginstruksikan seluruh jajaran Angkatan Perang untuk menghentikan itu. Sangsi yang diumumkan pemerintah berupa penghentian pemberian subsidi kedaerah-daerah yang melanggarnya. Tetapi tindakan itu disangsikan karena kurangnya sarana pengawasan dan pelaksanaannya<sup>292</sup>.

#### D. Pendekatan Terhadap Jepang

Menghadapi kesulitan-kesulitan keuangan, RI mau tidak mau berpaling kepada Jepang, sebagai alternatif negara-negara komunis. Jepang sejak tahun 1954 telah mulai melakukan politik "ambil hati" kepada para pemimpin negara kawasan Asia Tenggara<sup>293</sup>. Perjanjian perdamaian dan pampasan perang telah ditandatangani pada 20 Januari 1958. Perjanjian itu membuka peluang yang luas bagi kerjasama perekonomian berupa penanaman modal Jepang di Indonesia<sup>294</sup>.

---

<sup>292</sup> Ibid., hlm. 179

<sup>293</sup> Wawancara Manuel Kaisepo dengan Adam Malik dalam Manuel Kaisepo, "Setengah Abad di Panggung Politik: Perjuangan Bung Adam", Prisma, No. 11 Thn. XIII, 1984

<sup>294</sup> Uraian lengkap tentang hubungan itu terdapat dalam Masashi Nishihara, The Japanese and Soekarno's Indonesia: Tokyo - Jakarta Relations 1951 - 1966, Bab 6, hlm. 35 - 76

E. Gerakan Anti-Kabinet dan Pergolakan Daerah

Kritik atas tindakan pemerintah dalam rangka aksi Irian Barat semakin gencar. Kabinet Djuanda didesak untuk mundur. Subadio, wakil PSI di parlemen, pada tanggal 29 Januari 1958, dapat dikatakan mewakili kelompok yang tidak dapat menyetujui tindakan kabinet itu. Muncul usulan agar Hatta dan Hamengku Buwono IX memimpin kabinet dan pulihnya "Dwi Tunggal"<sup>295</sup>. Usul itu juga dimunculkan oleh para perwira pemberontak di Sumatera. Pemerintah tidak dapat mengatasi ekonomi barter<sup>296</sup> yang merugikan itu. Tetapi kemampuannya menindak pemberontakan daerah meningkatkan kewibawaannya.

Meskipun desakan dari pihak oposisi agar Djuanda mundur tetapi dukungan rakyat masih tetap kuat. Perdana menteri itu tetap berkeyakinan bahwa "dalam keadaan sekarang ini dia tidak melihat suatu alasan untuk menyerahkan mandatnya"<sup>297</sup>. Djuanda berketetapan hati untuk menjalankan rencana-rencana yang telah digariskan pada tanggal 3 Pebruari 1958 di muka parlemen.

---

<sup>295</sup> Wertheim, op.cit., hlm. 359

<sup>296</sup> "Sari Warta Ekonomi", Basis., VII, hlm. 203

<sup>297</sup> "Sari Warta Ekonomi", Basis, VII, hlm. 204

F. Pemberontakan Daerah

Memanasnya pergolakan daerah itu terasakan ketika Soekarno melakukan kunjungan ke Jepang. Presiden tiba pada tanggal 29 Januari 1958, tetapi sehari sebelumnya Letkol. Ventje Sumual telah mendahuluinya untuk mengepalai sebuah misi rahasia.

Parlemen RI mengadakan pertemuan dengan Djuanda pada 3 Pebruari 1958. Pada sidang penting itu Perdana Menteri membuka kejadian penting pada tanggal 9 Januari 1958 di Sungai Dareh. Di kota kecil yang terletak diperbatasan Sumatera Barat dan Jambi itu, hadir Zulkifli Lubis, Simbolon, A. Husein, Dahlan Djambek, Sumual, Natsir, Sjafruddin, Sumitro Djojohadikusumo untuk menghadiri rapat istimewa. Pembicaraan rapat itu di sekitar situasi politik dan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ PRRI). Tuntutan kelompok ini agar dalam waktu 5 X 24 jam Kabinet mengundurkan diri dan menunjuk Hatta-H. B IX untuk membentuk kabinet baru. Presiden diminta supaya kembali kepada kedudukannya secara konstitusional<sup>298</sup>. Tuntutan yang ditolak oleh Kabinet Karya itu menandai pemberotakan yang dikenal dengan PRRI/Permesta.

---

<sup>298</sup> Ibid.

G. Hubungan Dengan Belanda

Tindakan nasionalisasi memang menyebabkan Belanda mengalami kerugian besar tetapi tidak sampai melumpukannya. Sebagai perbandingan dapat disebutkan bahwa penerimaan pendapatan nasional Belanda dari Hindia Belanda pada tahun 1925 - 1932 sejumlah 8,9 pCt. pada tahun 1938 turun berkisar 8,4pCt. Tetapi menurut Biro Pusat Statistik Belanda di The Hague pada tahun 1955 - 1957 prosentase itu turun menjadi sekitar 1,5 - 2,0 pCt. dari keseluruhan pendapatan nasionalnya<sup>299</sup>. Dan Belanda pada masa itu bersama negara-negara Eropa lainnya sedang menikmati bantuan bantuan AS lewat Program Marshall. Sikap Belanda tetap tak berubah dalam masalah Irian Barat.

Politik konfrontasi ekonomi yang dijalankan RI pada akhirnya tidak membawa hasil. Hubungan diplomatik pun diputuskan pada tanggal 17 Agustus 1960 secara sepihak oleh RI sebagai tanda dimulainya konfrontasi dalam bidang politik. Pada 19 Desember 1961 Soekarno mengumumkan Trikora (Tri komando Rakyat) yang menandai perjuangan secara militer<sup>300</sup>. Hal itu dilakukan Soekarno setelah pemerintah selesai memindahkan cadangan emas milik

---

<sup>299</sup> Fischer, op.cit., hlm. 132

<sup>300</sup> Tim Wartawan Kompas et al., I.J. Kasimo, Hidup dan Perjuangannya (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 91

Indonesia dari negeri Belanda ke Inggris. Kerugian Indonesia dengan kekayaannya yang tertinggal di negeri Belanda hanyalah berjumlah 25,5 gulden<sup>301</sup>. Pada awal tahun 1962, Soekarno mengirimkan pasukan gerilya ke Irian Barat. Perseketaan wilayah itu akhirnya diselesaikan dengan kekuatan senjata<sup>302</sup>.

Dari uraian ini dapatlah disimpulkan bahwa akibat tindakan nasionalisasi secara ekonomis sebenarnya sangat merugikan RI. Hal itu terlihat dari merosotnya nilai rupiah, kekacauan dalam hubungan antar pulau baik laut maupun udara, perdagangan gelap yang dilakukan daerah - daerah, di samping kesulitan dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan yang diambil alih<sup>303</sup>.

Sementara akibat politiknya bagi tuntutan atas Irian Barat masih jauh dari jangkauan. Sementara itu terjadi pergolakan- pergolakan dalam negeri akibat ketidaksetujuannya terhadap pemerintah pusat. Tetapi hubungan dengan Jepang dipulihkan kembali sebagai negara pemberi bantuan ekonomi. Suatu hal yang tetap berlangsung hingga kini.

---

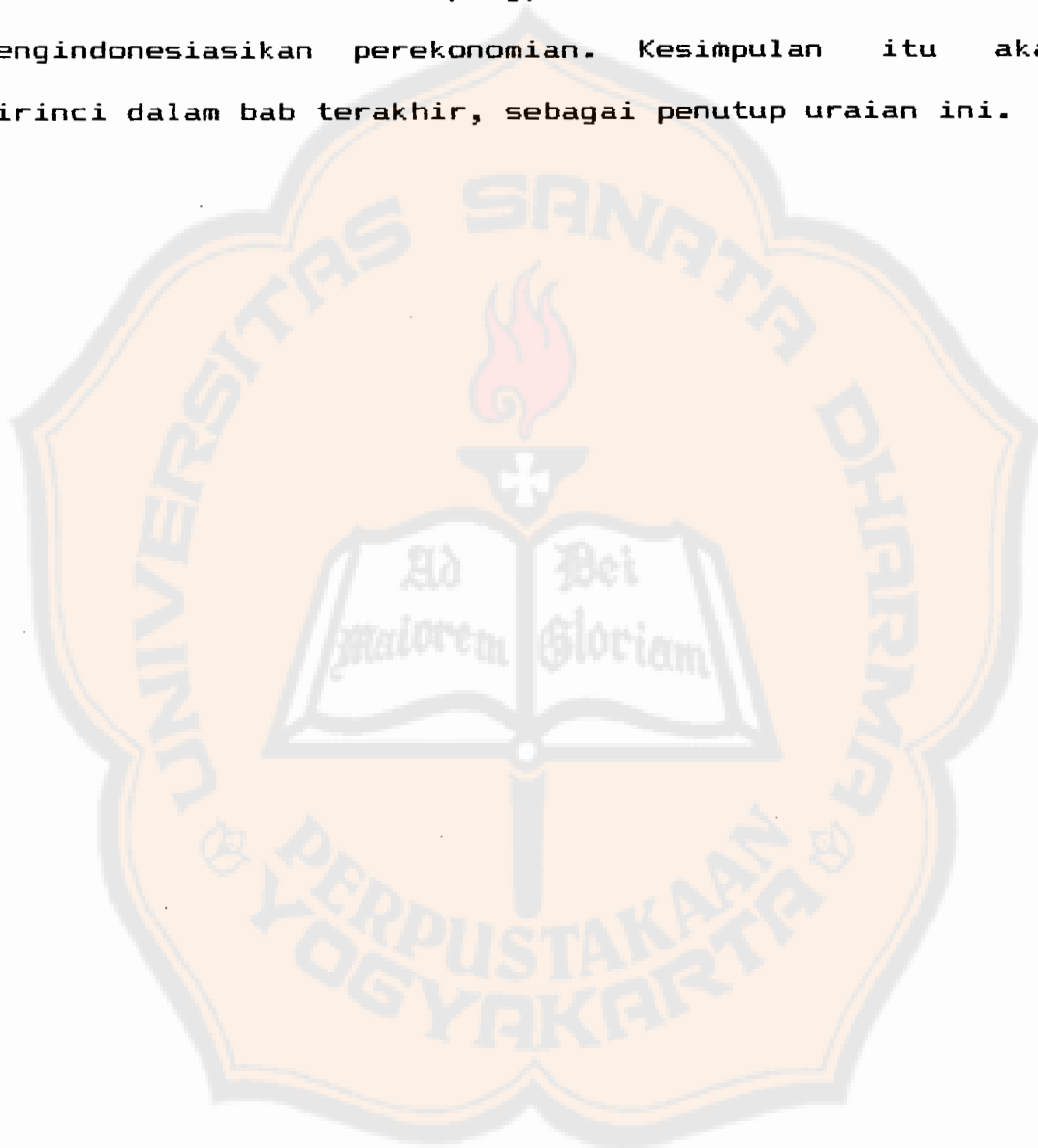
<sup>301</sup> Ganis Harsono, op.cit., hlm. 118

<sup>302</sup> Arnold Brackman, The Communist Collapse in Indonesia (Singapore: Donald Moore for Asia Pacific Press (Pte), 1970), blm. 18 - 19

<sup>303</sup> Akibat Nasionalisasi dalam bidang industri diuraikan oleh Anwar Ibrahim, "Pertumbuhan Industri Indonesia: Tinjauan Sektoral", Prisma, No. 12, Thn. V, Desember 1976



Akibat-akibat nasionalisasi itu dapat dipandang sebagai "ongkos" politik, bagi tujuan perjuangan merebut Irian Barat. Di samping, tujuan ekonomis untuk mengindonesiasikan perekonomian. Kesimpulan itu akan dirinci dalam bab terakhir, sebagai penutup uraian ini.



BAB VII  
KESIMPULAN

Nasionalisasi merupakan politik perekonomian suatu negara untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan swasta baik asing maupun nasional. Pengambilalihan itu ditetapkan dengan UU yang menjamin pelaksanaan ganti rugi yang layak. Di Indonesia, nasionalisasi secara besar-besaran terjadi pada tanggal 3 Desember 1957 terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Sedangkan UU Nasionalisasi baru diratifikasi setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1958. (bab II).

Latar belakang tindakan ini adalah keadaan ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh pengusaha dan pemilik modal asing, khususnya Belanda. Sekitar 60 persen nilai ekspor-impor Indonesia berada di tangan perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia membuka usaha di banyak sektor kehidupan seperti dalam dunia perbankan, sektor pelayaran antar pulau (KPM), hubungan udara (KLM), sektor perdagangan (Borsumij, Geo Wehry), sektor perkebunan. Dominasi itu ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan KMB. Pentingnya kemerdekaan secara ekonomis sudah disadari oleh para pemimpin Indonesia semenjak pengakuan kedaulatan terjadi. Tetapi usaha ke arah itu, lewat serangkaian pembentukan kabinet belum

menunjukkan hasil yang berarti. Karena kabinet silih berganti hingga tidak mampu menyelesaikan programnya (bab III).

Sering terjadinya pergantian kabinet sangat menghambat perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Belanda berupaya mempertahankan status quonya di wilayah itu. Sementara sikap netral Amerika Serikat dan juga negara-negara Barat sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia dalam perjuangan di forum PBB. Sedangkan Australia yang dikuasai oleh Partai Buruh sangat memihak Belanda dan anti-Indonesia. Tuntutan Indonesia di mata Australia merupakan indikasi sikap ekspansif Indonesia. Dukungan kepada Indonesia datang dari negara-negara berkembang yang terhimpun dalam konferensi Asia-Afrika. Dukungan itu tidak memiliki kekuatan politik yang kuat, sementara dukungan dari kelompok negara-negara Amerika Latin tidak dapat diharapkan. Negara-negara itu disibukkan oleh upaya kemerdekaan dan pergolakan dalam negerinya sendiri sehingga memilih abstain. Oleh karena itu Soekarno mengambil prakarsa mengadakan konfrontasi di bidang ekonomi dengan melakukan nasionalisasi seluruh perusahaan Belanda di Indonesia. Usaha itu dijalankan dengan memerintahkan bekas-bekas tentara pelajar ke perusahaan-perusahaan Belanda. Mereka menggerakkan para buruh untuk melakukan "aksi spontan" (bab IV).

Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda itu

ternyata membawa sejumlah masalah. Masalah yang paling mendesak adalah bagaimana mengelolanya. *Mismanagement* pun banyak terjadi di perusahaan-perusahaan itu. Akibatnya penurunan produksi terjadi di perusahaan-perusahaan itu. Penurunan itu pada gilirannya membuat nilai mata uang RI merosot (inflasi). Di samping itu nasionalisasi perusahaan pelayaran Belanda (KPM) dan perusahaan penerbangan (KLM) membuat perdagangan dan transportasi antar pulau di Indonesia mengalami kemacetan. Ekonomi barter banyak dilakukan oleh para tokoh daerah dengan pedagang-pedagang asing tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. Gerakan anti-kabinet dan pergolakan daerah muncul di Sumatera Utara maupun Sulawesi Selatan. Situasi perekonomian itu mendorong Indonesia untuk membina kembali hubungannya dengan Jepang. Sementara itu Belanda tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan wilayah Irian Barat. Langkah pemerintah Indonesia itu tidak berhasil melumpuhkan Belanda yang mendapat dana bantuan dalam Program Marshall (bab V).

Pada akhirnya langkah politik yang ditempuh ini terlalu banyak memakan ongkos secara ekonomis, seperti sudah dikemukakan oleh tokoh-tokoh penentang kebijakan ini, seperti Hatta, Sjafruddin, Sumitro. Suatu langkah di bidang politik harus memperhitungkan kekuatan ekonomis yang ada, bila tidak mau menemui kegagalan (bab VI).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Bell, Daniel  
1960                    The End of Ideology  
Glencoe, III: The Free Press
- Bone, Robert C.  
1962                    The Dynamics of The Western New  
Guinea (Irian Barat) Problem  
Ithaca, New York: Modern Indonesia  
Project
- Biro Pusat Statistik (BPS)  
1959                    Statistical Pocket Book of Indonesia  
1958  
Djakarta: BPS
- 
- 1961                    Statistical Pocket Book of Indonesia  
1960  
Djakarta: BPS
- Brackman, Arnold C.  
1963                    Indonesian Communism A History  
New York: Frederick A Praeger
- 
- 1970                    The Communist Collapse in Indonesia  
Singapore: Donald Moore for Asia  
Pacific Press (Pte)
- Bruhart, Jean  
1968                    Histoire de L'Indonesie  
Paris: Presses Universitaires de  
France
- Budiardjo, Meriam  
1988                    Pengantar Ilmu Politik  
Jakarta: Gramedia
- Budiardjo, Meriam (ed.)  
1984                    Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan  
Wibawa  
Jakarta: Sinar Harapan

- Cordoso, F. H., Faletto, Enzo  
 1979 Dependency and Development in Latin America  
 Berkeley: University of California Press
- Dahm, Bernard  
 1971 History of Indonesia in The Twentieth Century  
 London: Pall Mall Press
- Feith, Herbert  
 1962 The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia  
 Ithaca, New York: Cornell University Press
- Fischer, Ch. A.  
 1955 South East Asia  
 London: Methuen
- Fischer, Louis  
 1956 The Story of Indonesia  
 New York: Harper & Brothers Publishers
- Freeman, Roger A.  
 1968 Socialism and Private Enterprises in Equatorial Asia  
 California: Stanford University
- Furnivall, J. S.  
 1956 Colonial Policy in Practice  
 Washington Square, New York: New York University Press
- Grant, Bruce  
 1964 Indonesia  
 Australia: Melbourne University Press
- Geertz, Clifford  
 1973 The Interpretation of Culture  
 New York: Basic Books
- Hall, D.G. E.  
 1964 A History of South-East Asia  
 London: Macmillan & Co. Ltd.
- Hanifah, Abu  
 1972 Tales of A Revolution

Australia : John Sands Pty. Ltd.

Harsono, Ganis  
1985

Cakrawala Politik Era Sukarno  
Jakarta: Inti Idayu Press

Hatta, Mohammad  
1960

Ekonomi Terpimpin  
Djakarta: Fasco

-----  
1974

Mendayung Antara Dua Karang  
Jakarta: Bulan Bintang

-----  
1967

Masalah Bantuan Perkembangan ekonomi  
Baqi Indonesia  
Djakarta: Djambatan

-----  
1983

Kumpulan Pidato II  
Jakarta: Inti Idayu Press

Hindley, Donald  
1966

The Communist Party of Indonesia  
Berkeley and Los Angeles: University  
of California Press

Jones, Howard Palferey  
1973

Indonesia: The Possible Dream  
Singapore: Mas Ayu Pte. Ltd.

Kahin, George McT.  
1952

Nationalism and Revolution in Indonesia  
Ithaca, New York: Cornell University  
Press

-----  
1956

The Asian-African Conference, Bandung  
Indonesia, April 1955  
Ithaca, New York: Cornell University  
Press

Kartodirdjo, Sartono  
1984

Modern Indonesia Tradition &  
Transformation  
Yogyakarta: Gajah Mada University  
Press

Koch, D.M.G., Riemers, J.W.F. (ed.)

- t.t. Het Geshilpunt West Nieuw Guinea Eist Een Oplossing  
(...)
- Lev, Daniel S.  
1966 The Transition to Guided Democracy  
Ithaca, New York: Cornell Modern  
Indonesia Project
- Lubis, Mochtar  
1986 Catatan- Catatan Subversif  
Jakarta: Obor, Gramedia
- Ma'arif, Ahmad Syafii  
1985 Islam dan Masalah Keneqaraan  
Jakarta: LP3ES
- McVey, Ruth T.  
1957 The Soviet View of The Indonesian  
Revolution  
Ithaca, New York: Modern Indonesia  
Project
- Moedjanto, G.  
1988 Indonesia Abad Ke-20, II  
Yogyakarta: Kanisius
- Mubyarto  
1979 Gagasan dan Metoda Berpikir Tokoh-  
Tokoh ...dst.  
Yogyakarta: Bagian Penerbit F.E.  
Universitas Gajah Mada
- Nasution, A. H.  
1974 Memenuhi Panggilan Tugas , IV  
Jakarta: Gunung Agung
- Ning, Hasjim  
1986 Pasang Surut Penqusaha Pejuang  
(Otobiografi)  
Jakarta: Grafitipers
- Noer, Deliar  
1987 Partai-Partai Islam di Pentas  
Nasional  
Jakarta: Temprint
- Notosoetardjo  
1956 Dokumen-2 Konperensi Medja Bundar,  
K. M. B.  
Djakarta : Penerbit Endang





(Kumpulan Pidato)

- 1963                    Dibawah Bendera Revolusi  
Djakarta: Penerbit Dibawah Bendera  
Revolusi
- Soen, Sie Kwat  
1968                    Prospects for Agricultural Developpmet  
in Indonesia  
Wegeningen: Centre Agricultural  
Publishing and Documentation
- Soewarno, P.J.  
1989                    Sejarah Birokrasi  
Yogyakarta: Penerbit Universitas  
Atmajaya
- Sutter, John D.  
1959                    Indonesianisasi: Politics in a  
Changing Economy , I, III, IV  
Ithaca, New York: Cornell University  
Press
- Tas, J.  
1974                    Indonesia: The Underdeveloped Freedom  
Indianapolis, New York: Bob Merrill  
Co. Inc.
- Tim Wartawan Kompas, et al.  
1980                    I.J. Kasimo, Hidup dan Perjuangannya  
Jakarta: Gramedia
- Wertheim, W. F.  
1969                    Indonesian Society in Transition  
W van Hoeve Publishers Ltd.  
The Hague

B. Suatu bab di dalam suatu buku:

- Aidit, D.N.  
1977                    "The Struggle of the People of Asia-  
Africa and Latin America" dalam  
Herbert Feith, Leon Castles,  
Indonesian Political Thinking, Ithaca,  
New York: Cornell University Press

- North, Douglas C.  
1972 " Economic History" dalam International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. 5  
New York: Macmillan & The Free Press
- Paauw, Douglas S.  
1967 From Colonial to Guided Economy" dalam Ruth McVey (ed.), Indonesia,  
New Heaven: HRAF Press
- Shills, Edward  
1981 "Angkatan Bersenjata dalam Pembangunan Politik Negara-Negara Baru" dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), Elite Dalam Perspektif Sejarah (Jakarta: LP3ES, 1981)
- C. Buku Terjemahan
- Apter, David E.  
1985 Pengantar Analisa Politik  
Jakarta: LP3ES
- Bartlett, Anderson G., et al.  
1986 Pertamina, Perusahaan Minyak Nasional  
Jakarta: Idayu
- Boland, B. J.  
1985 Perqumulan Islam di Indonesia  
Jakarta: Grafitipers
- Geertz, Clifford  
1976 Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia  
Jakarta: Bhratara
- Gottschalk, Louis  
1975 Mengerti Sejarah  
Jakarta: Penerbit U.I.
- Leifer, Michael  
1986 Politik Luar Negeri Indonesia  
Jakarta: Gramedia
- School, J.W.  
1982 Modernisasi, Pengantar Sosiologi

Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang  
Jakarta: Gramedia

Sundhaussen, Ulf  
1986

Politik Militer Indonesia 1945 - 1967  
Jakarta: LP3ES

Todaro, Michael  
1983

Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga  
Jakarta: Ghalia Indonesia

D. Artikel

Aboepriyadi S., " Jejak-Jejak Para Opsir Negara Kolonial"  
Tanah Air, No. 3, September 1988

Agung, Ide Anak Agung Gde, " Konferensi Meja Bundar Empat  
Puluh Tahun Lalu", I & II, Kompas , 2, 3  
November 1989

Ali, Fahry, "Kita Perlu Satu Parpol Lagi?", Kompas , 19  
Januari 1982

Bulkin, Farchan, "Nasib Publik Dalam Sebuah Republik" ,  
Prisma, No. 8, 1985

Gordon, Alec, "Mundurinya Produksi Gula", Prisma, No. 7  
Juli 1982

Hindley, Donald, "Aliran and The Fall of The Old Order"  
Indonesia , No. 9, April 1970

Kristiadi, Y., "Sejarah Perkembangan Organisasi Sosial dan  
Politik di Indonesia", Analisa, No. 8, Thn.  
8, 1984

Rahardjo, Dawam, "Wafatnya Seorang Sosialis Religius"  
(Obituari), Tempo, Pebruari 1989

Redaksi, "Zulkifli Lubis, Komandan Intelijen Pertama  
Indonesia " (Memoar), Tempo, No.25, Thn.  
XVII, Juni 1989

-----, "Roeslan Abdulgani, Dunia Tidak Hitam Putih"  
(Memoar), Tempo, Juni 1989

-----, "Jalan PKI Menuju Kehancuran" (Laporan Utama),

- , Tempo, Oktober 1988
- , "Gunting Sjafruddin", Tempo, 25 Pebruari 1989
- , ""Ikhtisar Perkembangan Partai Politik", Monitor,  
No. 7 Thn. 1, November 1978
- Roepke, Jochen, "Kewiraswastaan Dalam Perkembangan Ekonomi  
Indonesia", Prisma, No. 9 Thn. VII, 1978
- Sudarsono, Yuwono, "Teori Pembangunan: Sebuah Himbauan Untuk  
Pendekatan Ekonomi Politik", Prisma, Januari  
1980
- Wibisono, Christianto, "Profil dan Anatomi BUMN", Kompas,  
6 Oktober 1989

E. Berita:

- " Sari Warta Ekonomi" ,  
Kumpulan Majalah Basis, Oktober 1956 - September 1957  
Oktober 1957 - September 1958  
September 1958 - Oktober 1959
- " Wawasan Salebeting Negari":  
Peraba, No. 1 Thn. VIII, Januari 1956  
, No. 4 Thn. VIII, Peberuari 1956

LAMPIRAN No. 1

UNDANG-UNDANG NO. 86 TAHUN 1958  
TENTANG  
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA  
DI INDONESIA<sup>304</sup>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah terhadap perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka perjuangan Irian Barat adalah sesuai dengan kebijakan pembatalan KMB;

b. bahwa dalam taraf perjuangan pada masa ini dalam rangka pembatalan KMB dan perjuangan pembebasan Irian Barat tsb. di atas sudah tiba waktunya untuk mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia berupa nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk dijadikan milik negara;

c. bahwa dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tsb. dimaksudkan untuk memberi kemanfaatan sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia dan pula untuk memperkokoh keamanan dan pertahanan negara;

MENINGGAT : pasal-pasal 27 jo 38, 89 dan 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MENETAPKAN:

---

<sup>304</sup> Giok Siong, *op.cit.*, hlm. 170 - 172; atau Lembaran Negara No. 162 Tahun 1958

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN  
MILIK BELANDA YANG BERADA DI DALAM WILAYAH REPUBLIK  
INDONESIA

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Kepada pemilik perusahaan perusahaan tersebut dalam pasal 1 di atas diberi ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh sebuah Panitia yang anggota anggotanya ditunjuk pemerintah.

(2) Atas keputusan Panitia tersebut pada ayat 1 di atas maka baik pemilik perusahaan maupun pemerintah dapat meminta pemeriksaan banding kepada Mahkamah Agung yang akan memberi keputusan terakhir menurut acara pemeriksaan banding dihadapannya antara pemilik perusahaan dan Negara Republik Indonesia sebagai pihak yang bersengketa.

(3) Pembayaran ganti kerugian seperti termaksud di atas selanjutnya akan diatur dalam Undang Undang tersendiri.

Pasal 3

(1) Ketentuan ketentuan tersebut dalam "ontegeningsordonnantie (Stb. 1920 No. 574)" untuk nasionalisasi ini tidak berlaku.

(2) Ketentuan ketentuan pokok tentang pelaksanaan serta akibat akibat lebih lanjut daripada pernyataan seperti termaksud dalam pasal 1 di atas, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

(1) Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) di atas, dapat mengancam hukuman penjara selama lamanya empat tahun dan/ atau hukuman denda setinggi tingginya satu juta rupiah atas pelanggaran

aturan aturannya.

(2) Segala tindak pidana seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.

(3) Mereka yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan seperti termaksud dalam ayat (1) di atas dapat ditahan menurut yang dilakukan terhadap tersangka tersangka

atau terdakwa terdakwa yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau lebih.

(4) Semua peraturan tentang hukum acara pidana mengenai penahanan sementara dilakukan terhadap mereka yang dimaksudkan dalam ayat (3) di atas.

Pasal 5

Setiap perjanjian atau perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) di atas adalah batal karena hukum.

Pasal 6

Undang undang ini dapat disebut "Undang Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda".

Pasal 7

Undang Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 1958

*Presiden Republik Indonesia*

ttd.

diundangkan,

SOEKARNO

pada tanggal 31 Desember 1958

*Menteri Kehakiman*

*Perdana Menteri*

ttd.

ttd.

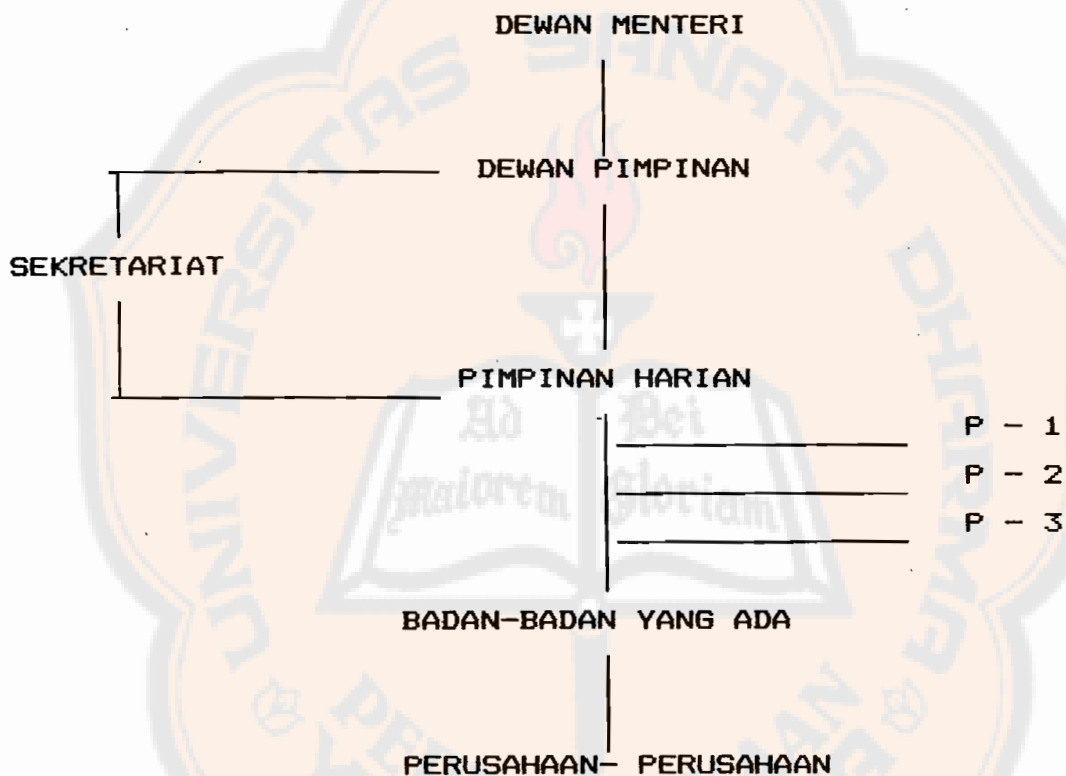
G.A. MAENGGOM

DJUANDA



LAMPIRAN No.2

SKEMA ORGANISASI BADAN NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA  
( BANAS )<sup>305</sup>



Keterangan:

DEWAN PIMPINAN : Perdana Menteri (Ketua)

---

<sup>305</sup> ibid., hlm. 183 dengan keterangan

**Menteri Keuangan (Wakil Ketua I)**  
**Menteri Stabilisasi Ekonomi(Wakil Ketua II)**

**Anggota:** **Menteri Perdagangan**  
**Menteri Perindustrian**  
**Menteri Pertanian**  
**Menteri Pekerjaan Umum**  
**Menteri Kehakiman**  
**Menteri Pelayaran**  
**Menteri Kesehatan**  
**Menteri Perburuhan**  
**Menteri Perhubungan**  
**Gubernur Bank Indonesia**

**SEKRETARIAT:** - Seorang sekretaris yang diangkat dan diber-  
hentikan oleh Perdana Menteri atas usul  
Pimpinan Harian

**PIMPINAN HARIAN :**

**Menteri Keuangan**  
**Menteri Stabilisasi Ekonomi**  
**Wakil Kementerian Pertahanan**

**P-1 :Staf Ahli sebagai Perencana**  
**P-2 :Dewan Direktur sebagai Pelaksana**  
**P-3 :Dewan Pengawas**

